

711
HAD
K ex

**KAJIAN PERTUMBUHAN KAWASAN SUBURBIA
SEBAGAI DASAR
MANAJEMEN PEMBANGUNAN KOTA
DI PERKOTAAN TEMANGGUNG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :
SAMSUL HADI
L4D000130



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UPT-POSTAR UNIDIP

KAJIAN PERTUMBUHAN KAWASAN SUBURBIA
SEBAGAI DASAR
MANAJEMEN PEMBANGUNAN KOTA
DI PERKOTAAN TEMANGGUNG

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :
SAMSUL HADI
L4D000130

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 4 Januari 2003

Dinyatakan LULUS
Sebagai syarat memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 4 Januari 2003

Pembimbing Pendamping

Ir. Djoko Suwandono, MSP

Pembimbing Utama

Prof.Dr.Ir. Sugiyono Soetomo, CES DEA



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota

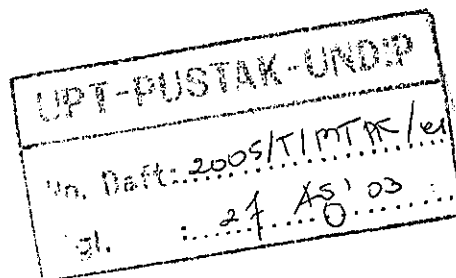
Prof. Dr. Ir. Sugiyono Soetomo, CES DEA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Selesai pendidikan bukanlah tujuan
Namun merupakan tonggak untuk berkarya lebih baik
Demi kemanusiaan yang prural.*

Kupersembahkan tesis ini untuk :

Semua yang peduli terhadap pruralitas manusia



ABSTRAK

Kajian atau penelitian ini merupakan upaya untuk menggambarkan tentang bagaimana gambaran perkembangan kota-kota kecil seperti kota kabupaten, yang oleh Rondenelly (1983) disebut sebagai kota-kota kedua atau *secondary city*. *Secondary City* diartikan sebagai suatu tempat yang mempunyai fungsi penyangga dalam kebijaksanaan pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi antara daerah perkotaan (pusat) dengan wilayah/daerah belakangnya. Kota Temanggung, seperti halnya kota-kota kedua lainnya, dewasa ini telah mengalami perkembangan yang ditandai dengan tumbuhnya kawasan pinggiran atau kawasan Suburbia (*fringe*). Kasus perkembangan Kota Temanggung dikaitkan dengan masalah manajemen pembangunan kota menarik untuk dikaji, karena disamping yang merupakan prototipe ibukota kabupaten pedalaman di Jawa, juga menjadi sangat relevan dalam lingkup penyelenggaraan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan tingkat urbanisasi yang terjadi dan mengetahui implementasi manajemen pembangunan kota yang didasarkan pada kebutuhan kota di kawasan suburbia kota Temanggung. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif sekaligus eksploratif, yaitu mencoba menggambarkan fenomena-fenomena obyek penelitian sekaligus membuka peluang untuk menemukan fenomena/premis-premis hal baru berdasarkan kondisi empirik di lapangan. Data diperoleh dengan pendekatan total sampling maupun multistage sampling untuk sasaran-sasaran tertentu, dan selanjutnya dianalisa secara kuantitatif (distribusi frekwensi, tabelaris, regresi, *cross tabulation*) dan kualitatif yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode induktif.

Dari hasil penelitian diperoleh beberapa temuan penting yaitu (1) pertumbuhan morfologi (kenampakan fisik kota) tumbuh 3,79% lebih cepat dibanding pertumbuhan penduduk (1,3%). (2) pertumbuhan morfologi kota berbanding lurus dengan jarak kawasan dari pusat kota namun perkembangan cenderung acak dan meloncat-loncat (*leap frog development*) (3) pertumbuhan kenampakan fisik (morfologi) dominan dipengaruhi oleh pembangunan unit permukiman/perumahan dan adanya jaringan transportasi. (4) Perkembangan penduduk pada kawasan karena faktor kelahiran (54%), selebihnya merupakan penduduk pendatang yang sebagian besar berasal dari kampung/permukiman dalam kota (67%). (5) Tingkat pendidikan dan mata pencaharian (*segregasi sosial*) penduduk kawasan suburbia berbeda secara nyata dengan penduduk kota utama, namun variabel ini tidak terkait dengan struktur ruang sebagaimana konsep John Turner dan Shevky & Bell, sebagaimana lazim terjadi di kota besar. ; (5) Sarana/prasarana pelayanan kota (pendidikan dan kesehatan) sudah memadai, sedangkan untuk jalan, persampahan dan air bersih perlu ditingkatkan; (6) Pelaksanaan manajemen pembangunan kota di Temanggung belum didukung dengan aspek kelembagaan yang efektif; pada tingkat kabupaten masih ditangani oleh Sub Dinas dan pada kawasan/desa yang sudah urban masih berstatus desa

Kesimpulan penting yang didapat adalah bahwa pertumbuhan kawasan Suburbia kota Temanggung lebih dominan ditandai dengan percepatan pertumbuhan morfologi kota/kenampakan fisik dari pada pertumbuhan penduduk (*population growth*). Perkembangan morfologi kota secara signifikan dipengaruhi oleh pembangunan unit permukiman/perumahan dan peningkatan jaringan jalan/transportasi. Pola pertumbuhan morfologi bersifat acak/melonca (*leap frog development*). Pertumbuhan penduduk kawasan suburbia, adalah orang-orang dari dalam kota yang ingin mencari tempat hunian yang dianggap kondusif bagi pertumbuhan anak-anak (*generasi penerus*), disamping mencari hunian yang segar dan alami. Lembaga yang menangani manajemen pembangunan kota di Temanggung belum menunjukkan perhatian yang besar terhadap sisi pertumbuhan kawasan suburbia.

Rekomendasi pelaksanaan manajemen pembangunan kota, harus mulai diarahkan *pen-zoning-an* yang fleksibel, sehingga dapat menuju kawasan penyangga *'bufferzone ekologis'* antara pusat kota (*core city*) dengan kawasan *'rural'*. Disamping perlunya peningkatan status kelembagaan dari Sub Dinas menjadi Badan/instansi yang mandiri dan peningkatan desa menjadi kelurahan bagi kawasan yang sudah bersifat urban.

THE STUDY OF URBAN FRINGE GROWTH
TO BASE URBAN DEVELOPMENT MANAGEMENT
AT TEMANGGUNG

Oleh : Samsul Hadi

ABSTRACT

The research to descriptive of the town growth like regent city, that by Rondenelly (1983) was defined the settlement has bufferzone the developing policies and economic growth, between core area with hinterland area. The Temanggung town, likely the great number of secondary city had been developing, that signed of suburban (urban fringe). The case of Temanggung town developing to relate the urban development management has interested, especially this town is the prototype of the outback regent city and related to decentralization system based on Indonesian Regulation number 1999, 22th for the regional government.

The aims of the study are knowing development and urbanization growth of the urban fringe at Temanggung town. The study is descriptive and explorative research category, that to descriptive the research object and finding to new premises based on empiric area. The data collecting from the secondary and primary by total and multistage sampling. The data collection to be analyzed by quantitative and qualitative method (distributive frequency; tabularis, regression statistic, cross tabulation etc), so to take conclusion by inductive approach.

Result the study shows (1) the urban sprawl development (morphology) growth 3,7 percent, faster than the urbanization growth, 1,3 percent. (2) morphology growth as same as the distance area from core city, but the growth tend to urban sprawl of leap frog development. (3) morphology growth as tend influenced by housing and transportation development. (4) The factor of the population growth is birth rate, 54 percent and move from out area, 46 percent. (5) There were significance of different education and household activity between suburban and core city, but the both variable is not related spatial structure from Turner and Shevky & Bell, likely usual at big city. (6) The public services, road, garbage waste and water supply is developing necessary. (7) urban management is related the regional government system; so like this the change of "desa" (rural govern) to become "kelurahan" (urban govern) should be the first stage decision for the urban management implementation.

The important conclusion of this study, that suburban development tends to signed the acceleration of the morphology growth more influenced by the housing development, but this growth is random (leap frog development), that can impacted ecology of agriculture for next time. So the urban management should be begin objected to transit point or toward of bufferzone ecology, that has been related rural and urban.

The recommended of this study is begin to regulate urban sprawl by zoning regulation and improving the structure institution for the urban management.

Key words : Urban fringe/Suburbia growth

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena setelah melalui perjuangan yang bagi saya sungguh berat, mulai dari penyusunan design penelitian (proposai), melakukan survey awal, melakukan penelitian, menganalisa sampai pada menyusun laporan tesis, namun akhirnya pekerjaan menyelesaikan tugas akhir studi ini dapat selesai dan telah diujikan dalam sidang ujian yang sangat kredibel.

Sebagai seorang lulusan S-1 jurusan Sosial Politik , dapat memperoleh kesempatan pendidikan di jurusan MTPK ini dan bahkan dapat menyelesaikan studi adalah satu kebanggaan tersendiri. Namun saya akan lebih bangga apabila ilmu-ilmu yang sudah saya peroleh selama 2 tahun mengikuti studi ini dapat saya pergunakan dan saya implementasikan dalam lapangan pekerjaan saya sebagai seorang pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Pada kesempatan ini, secara tulus saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam pada pihak CBUIM selaku penyandang dana, khususnya Mr. Elman yang banyak mengurus, kepada Profesor Sugiyono dan Ir. Djoko Suwandono, terimakasih atas bimbingan/arahannya serta seluruh dosen/karyawan MTPK, mbak Luluk dan special kepada teman-temanku CBUIM IV maupun teman sekantor di Bappeda Temanggung.

Terimakasih untuk istri tercinta yang banyak mendorong dan anak-anakku Hedar dan Rehan yang menemani (kadang-kadang nakali) Papa selama menulis dirumah.

Akhirnya meskipun telah selesai, saya yakin tesis ini jauh dari sempurna. Namun saya tetap berharap, meskipun seberat 'biji sawi' tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Temanggung, Januari 2003

SAMSUL HADI

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR/PETA	xii

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan masalah	8
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1.5.1. Ruang Lingkup Substansi.....	12
1.5.2. Ruang Lingkup Spatial	13
1.6. Kerangka Pemikiran	15
1.7. Metodologi Penelitian.....	19
1.7.1. Pengertian dan Jenis Penelitian	19
1.7.2. Populasi dan Sampel Penelitian	20
1.7.3. Teknik Pengambilan Sampel.....	21
1.7.4. Kebutuhan, Penyajian dan Analisa data.....	22
1.8. Sistematikan Penulisan Hasil Penelitian	27

II.KAJIAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

2.1. Tinjauan Geografis Kabupaten Temanggung	28
2.1.1. Kondisi Fisik Wilayah	29
2.1.1.1 Topografi	29
2.1.1.2 Hidrografi dan Klimatografi	30
2.1.1.3 Penggunaan tanah	31
2.1.1.4 Kependudukan	32
2.2 Kota Temanggung dalam konstelasi regional	32
2.3 Kondisi Geografi dan Fisik Perkotaan Temanggung	36
2.4. Penggunaan tanah	39
2.5 Fungsi dan Peran Kota.....	41
2.6 Kependudukan.....	41
2.6.1 Jumlah dan sebaran penduduk	41
2.6.2 Kepadatan penduduk.....	42
2.6.3 Mata pencaharian	44
2.7. Sarana dan prasarana perdagangan	45
2.8. Sarana dan prasarana perhubungan	46

III. KONSEP PERTUMBUHAN DAN MANAJEMEN KAWASAN SUBURBIA.

3.1. Konsep Kota kedua (secondary City)	48
3.2 Pertumbuhan kawasan Suburbia	52
3.2.1 Perkembangan fisik kota (urban sprawl).....	62
3.2.2 Struktur social dan ekonomi perkotaan	65
3.2.3 Standart Sarana dan Prasarana Pelayanan Kota.....	71
3.3 Manajemen pembangunan kota (urban management).....	74
3.4 Kelembagaan dalam Manajemen pembangunan kota	81
3.5 Rangkuman teori	88

IV. KAJIAN PERTUMBUHAN KAWASAN SUBURBIA SEBAGAI DASAR MANAJEMEN PEMBANGUNAN KOTA	
4.1. Kajian Aspek Morfologi Kota	91
4.1.1 Tata Guna Lahan	91
4.1.2 Jaringan Jalan	97
4.1.3 Pola Sebaran Kenampakan Fisik Kota	102
4.2 Kajian Aspek Demografi dan Sosial Ekonomi	108
4.2.1 Pertumbuhan penduduk	108
4.2.2 Kepadatan penduduk	113
4.2.3 Tingkat pendidikan	115
4.2.4 Mata Pencaharian	119
4.3 Kajian Sarana dan Prasarana Pelayanan Kota	126
4.3.1 Sarana Pendidikan	130
4.3.2 Sarana Kesehatan	134
4.3.3 Sarana Transportasi	136
4.3.4 Sarana Permukiman	138
4.4. Kajian Manajemen Pembangunan Kota	141
4.4.1 Kelembagaan dan Aparatur	142
4.4.2 Keuangan	150
4.4.3 Kebijaksanaan Perencanaan	152
 V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Temuan	156
5.2 Kesimpulan	164
5.2 Rekomendasi	166
 DAFTAR PUSTAKA	167
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : HASIL PENGHITUNGAN SPSS	
Lampiran 2 : DAFTAR PERTANYAAN	

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel I.1 Daftar Tujuan, Sasaran, Variabel , Indikator, Kebutuhan Data dan Teknik Analisa Penelitian.....	26
Tabel II.1.Pembagian Wilayah Kota Temanggung (per BWK dan Desa.....	37
Tabel II.2 Penggunaan Lahan Perkotaan Temanggung	39
Tabel II.3 Jumlah penduduk, Sebaran dan Kepadatan per kawasan Perkotaan Temanggung tahun 2000.....	42
Tabel II.4 Jenis Mata pencaharian Rumah Tangga penduduk Perkotaan Temanggung Tahun 2000	45
Tabel IV.1 Tata Guna Lahan Perkotaan Temanggung Menurut Jenis dan Desa/Keurahan tahun 2000.....	91
Tabel IV.2 Perkembangan Luas Lahan Terbangun Perkotaan Temanggung Menurut Desa/kelurahan Tahun 1990 – 2000.....	94
Tabel IV.3 Hubungan Perkembangan Lahan Terbangun dengan Jarak Kawasan dari Pusat Kota.....	96
Tabel IV.4 Pengkategorian Perkembangan Lahan Terbangun dan Perkembangan Jaringan Jalan/Transpotasi	101
Tabel IV.5 Tabulasi Silang Hubungan antara Perkembangan Area Terbangun Dengan Jaringan Jalan/Transpotasi	102

Tabel IV.6 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Perkotaan Temanggung Tahun 1999 – 2000.....	109
Tabel IV.7 Sampel Mutasi Penduduk Kawasan Suburbia Tahun 2000	110
Tabel IV.8 Hubungan Jumlah Perumahan dengan Pertumbuhan Penduduk Dan Pertumbuhan Lahan Terbangun	111
Tabel IV.8a Alasan bertempat tinggal di kawasan suburbia.....	114a
Tabel IV.9 Tingkat Kepadatan Penduduk Perkotaan Temanggung Tahun 1990 – 2000	114
Tabel IV.10 Tingkat Pendidikan Penduduk Perkotaan Temanggung Tahun 2000	115
Tabel IV.11 Hubungan Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Dengan Tipe rumah yang dihuni pada Sampel Kawasan Pemukiman/perumahan.....	118
Tabel IV.12 Banyaknya Rumah Tangga Perkotaan Temanggung Menurut Sektor ekonomi	120
Tabel IV.13 Hubungan Rang Sosial dengan Struktur Ruang Kota/ Lahan Terbangun	123
Tabel IV.16 Penilaian Sarana dan Prasarana pelayanan Kota Dengan metode skalogram pada kawasan Suburbia Perkotaan Temanggung..	129

Tabel IV.17 Jumlah Sarana Pendidikan Perkotaan Temanggung Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2000.....	131
Tabel IV.18 Distribusi Sarana Kesehatan Perkotaan Temanggung Tahun 2000	135
Tabel IV.19 Pendapat Responden tentang Kecukupan Fasilitas Kesehatan	136
Tabel IV.20 Pendapat Responden tentang Kecukupan Pelayanan Transpotasi..	137
Tabel IV.21 Jumlah dan Proporsi Pelanggan PDAM Perkotaan Temanggung Menurut Desa/Kelurahan	139
Tabel IV.22 Alokasi Anggaran Pembangunan Sektor Perkotaan Temanggung Tahun 1992 – 2001	151

DAFTAR GAMBAR/PETA

	HALAMAN
Gambar 1.1.Peta Wilayah Penelitian	14
Gambar 1.2. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian	18
Gambar 2.1 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Temanggung.....	34
Gambar 2.2 Peta Orientasi Kawasan Perkotaan Temanggung dalam Wilayah Kabupaten	35
Gambar 2.3 Peta Administrasi dan BWK Perkotaan Temanggung.....	38
Gambar 2.4 Peta Kawasan Terbangun Perkotaan Temanggung.....	40
Gambar 2.5 Peta Tata Guna Lahan Perkotaan Temanggung.....	41
Gambar 2.6 Peta Kepadatan Penduduk per kawasan Perkotaan Temanggung.....	43
Gambar 2.7 Peta Mata Pencarian Penduduk per Kawasan Perkotaan Temanggung..	47
Gambar 3.1 Under Bounded City.....	56
Gambar 3.2 Arah Kekuatan Dinamis Pertumbuhan Kota ; C. Colby	62

Gambar 3.3 Model Perembetan Konsentris	64
Gambar 3.4 Model Perembetan Linier.....	65
Gambar 3.5 Model Perembetan Meloncat (checkerboard devl.).....	66
Gambar 3.6 Mobilitas Tempat Tinggal Model Turner	72
Gambar 4.1 Komposisi Tata Guna Lahan Perkotaan Temanggung	92
Gambar 4.2 Pola Jaringan Jalan Konsentrik Perkotaan Temanggung.....	97
Gambar 4.3 Contoh lahan Terbangun Baru yang bersifat sporadic	99
Gambar 4.4 Contoh Kerapatan Bangunan pada Beberapa Bagian Kota	100
Gambar 4.5 Pola sebaran kenampakan fisik meloncat (leap frog development) dan pola Over bounded city	105
Gambar 4.6 Contoh Kenampakan Fisik (lahan Terbangun) salah satu Sudud Kawasan Suburbia.....	107
Gambar 4.7 Peta Kondisi tingkat urban Desa-desa Kawasan Suburbia.....	130a

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di sekeliling suatu kota selalu terdapat wilayah dengan macam-macam peruntukkan lahan seperti untuk perumahan penduduk, industri, pergudangan dan lain-lain. Wilayah tersebut dari waktu ke waktu semakin luas sampai menjorok jauh dari pusat kota dan bersinggungan dengan desa-desa pinggiran sekitar kota. Dalam literatur perkotaan, wilayah ini disebut sebagai wilayah '*pinggiran*' dan dalam geografi disebut Sub-urban atau '*Suburbia*'. Suburbia berasal dari kata latin '*suburbis*' yang berarti *bawah kota*.

Pengertian ini awalnya berasal dari zaman Romawi, karena kota-kota pada waktu itu berupa benteng yang tinggi, maka yang diluar kota otomatis berada dibawah. Lebih keluar lagi disebut '*rus*' yaitu pedesaan. Pada tahap berikutnya kata '*Rus*' ini berkembang menjadi *Rural* yang artinya *perdesaan*.

Dalam bahasa Inggris, istilah Suburbia dikenal dengan istilah '*Fringe*' yang jika dibahasa Indonesiakan berarti *pinggiran*. Dalam tahap perkembangan kota dan pedesaan sendiri dilanda urbanisasi (artinya proses mengkota), maka muncul diantara kota dan desa suatu *rural-urban fringe*, yang dapat diartikan sebagai bagian kota maupun bagian desa.

Kurtz dan Eicher (N. Daljoeni, 1986 hal. 206) memberikan lima definisi dari *Rural-urban fringe*, yang diintisarikan dari berbagai literatur, sebagai berikut :

1. Kawasan dimana tataguna lahan rural dan urban saling bertemu dan mendesak ke pheriferi kota.
2. Rural-urban fringe meliputi semua suburbia, kota satelit dan teritorium lain yang langsung di luar kota dimana tenaga kerja terlibat dibidang non agraris.
3. Suatu kawasan yang letaknya diluar perbatasan kota yang resmi, tetapi masih dalam jarak melajo (*commuting distance*).
4. Kawasan diluar kota yang penduduknya berkiblat ke kota (*urban oriented resident*).
5. Suatu kawasan pedesaan yang terbuka, yang dihuni oleh orang-orang yang bekerja di kota.

Selanjutnya menurut geografer **Whyne-Hammond** (N. Daldjoeni hal.207) tumbuhnya wilayah pinggiran dipengaruhi oleh empat alasan, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan transportasi kota;
2. Bertambahnya penduduk suburban;
3. Meningkatnya tarap hidup suburbia;
4. Gerakan mendirikan bangunan pada masyarakat yang dibantu pemerintah (lewat kredit).

Tumbuhnya kawasan **Suburbia**, tidak dapat dilepaskan dari faktor urbanisasi; perpindahan penduduk dari desa ke kota, maupun adanya migrasi yaitu perpindahan penduduk antar daerah. Di negara-negara maju dan kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang dan Medan, urbanisasi terjadi karena orang ingin pekerjaan di kota khususnya di bidang Industri (pabrik-pabrik). Demikian pula dengan

migrasi, atau orang yang melakukan perpindahan (sekedar mobilitas ulang-ulik atau musiman) adalah dalam rangka mencari pekerjaan/pendapatan. Akibat adanya migrasi ini maka di kota-kota besar muncullah pusat-pusat hunian, perdagangan, industri yang sebagian besar meliputi wilayah pinggiran kota hingga mencapai batas atau bahkan diluar batas administrasi kota yang bersangkutan.

Banyak penelitian tentang migrasi maupun urbanisasi dan berbagai dampaknya baik yang positif maupun negatif, yang dilakukan di kota-kota besar. Sebuah studi yang dilakukan oleh **JMPDR** (Jakarta Metropolitan Development Region), sebagaimana ungkapkan oleh **Nining L Susilo** (2000; hal.5.10) mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran migrasi penduduk yang semula ke Jakarta menjadi disekitar Jakarta, yaitu Bogor, Tangerang dan Bekasi (Botabek). Penelitian ini selanjutnya mengungkapkan bahwa penduduk Jakarta dalam Jabotabek, menurun dalam kurun waktu 1980 sampai 1990 dari 54,6% menjadi 43,2% . Dan sebanyak 84,4% yang tinggal di daerah **suburbia Jakarta** setiap harinya datang ke Jakarta sebagai 'penglajo'.

Kawasan **pinggiran (suburbia)** tidak hanya terdapat dikota-kota besar seperti Jakarta dan ibukota-ibukota propinsi saja, tetapi juga terjadi di kota-kota kecil atau kota-kota yang mengemban **fungsi kedua** dalam perkembangan regional (**Secondary City**) . Kota-kota dengan fungsi kedua di Indonesia, khususnya Jawa Tengah memegang peranan penting dalam perkembangan wilayah. Kota-kota meliputi hampir semua kota dan ibukota kabupaten seperti Magelang, Tegal, Pekalongan, Wonosobo, Temanggung, Boyolali, Pemalang, Kudus, Pati dan lain sebagainya), ditambah dengan kota-kota kecamatan yang telah berkembang (kota eks kawedanan seperti Muntilan, Majenang, Weleri, Ambarawa,

Kutoarjo dan Parakan). Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sejumlah 82,86% penduduk perkotaan di Jawa Tengah ternyata tersebar di kota-kota kedua, di luar Semarang dan Surakarta. (Prihadi Nugroho, 1998 hal. 34).

Rondinelli (1983, hal.104) dalam bukunya *Secondary Cities in Developing Countries* berkaitan dengan masalah *Secondary City* ini mengatakan bahwa di kebanyakan negara-negara sedang berkembang (seperti Indonesia) seharusnya pengembangan kota-kota kedua adalah menjadi solusi yang sangat tepat untuk menjembatani antara pembangunan daerah perkotaan, terutama kota-kota besarnya dengan daerah belakangnya, berkaitan dengan mayoritas penduduknya yang masih agraris.

Sampai saat ini hampir tidak ada studi khusus perkotaan yang mengkaji bagaimana perkembangan kota-kota kedua seperti Temanggung, kecuali hanya merupakan materi sampingan dari penelitian-penelitian sosial seperti dilakukan oleh Clifford Geertz (*The Religion of Java*) Ecklund, J (*Wessing, Cosmology and Social Behavior in West Java*) M. Schools (*Behavior of law berucration; studi in central Java*) dan Mark R. Woodward (*Islam in Java; Normative and Mysticism*). Beberapa sarjana yang pernah mengadakan penelitian/penulisan mengenai struktur kota-kota di Jawa, khususnya yang berkaitan dengan kota warisan kerajaan antara lain Tillema (1920) dan Koentjaraningrat yang menguraikan tataletak dasar kota-kota di Jawa yang dikaitkan dengan pandangan raja-raja. (N. Daljoeni 1996).

Kota Temanggung adalah salah satu dari 35 ibukota kabupaten/kota di Jawa Tengah, disamping merupakan sebuah kota kedua (*Secondary City*) juga merupakan satu profil kota-kota kecil pedalaman (non pesisir) dimana mata pencaharian penduduknya

masih sangat didominasi oleh kultur agraris subsisten. Sebagaimana lazimnya ibukota kabupaten, perkotaan Temanggung juga meliputi kawasan **kota utama** (*core city*) dimana pada awalnya di kawasan ini terdapat situs-situs atau tempat yang merupakan cikal bakal kota. Penduduk di kawasan ini juga menganggap dirinya sebagai **Wong kutho** (orang kota=untuk membedakan dirinya dengan orang yang tinggal di desa-desa pinggiran dan desa pelosok jauh dari kota yang mereka anggap sebagai **Wong nDeso**). Disamping kawasan kota utama tersebut, saat ini perkotaan Temanggung juga telah mencakup **kawasan pinggiran** (*Suburbia*), yang sebagian besar merupakan kawasan hunian/perumahan dan beberapa pabrik/pegudangan.

Salah satu ciri kekotaan di kawasan Suburbia tersebut adalah adanya penampakan **fisik kekotaan** (*urban sprawl*) terutama pertumbuhan lahan terbangun, penambahan dan pelebaran jaringan jalan serta fasilitas perkotaan lain seperti jaringan air bersih, drainase dan adanya depo-depo sampah. Pertumbuhan lahan terbangun di kawasan Suburbia Temanggung ini mulai terlihat di permukaan sejak awal 1980-an, yaitu dengan *dibangunnya dua lokasi perumahan baru* yaitu Perumahan Srimpi Baru dan Perumahan Sukosari Indah serta dua lokasi *lahan siap bangun* (*kapling*). Secara administratif, pada waktu itu perumahan baru tersebut termasuk dalam wilayah desa 'hinterland', yaitu Desa Padureso dan Desa Kebonsari. Sedangkan untuk per-kaplingan terletak di Desa Sidorejo dan Desa Mungseng.

Latar belakang dibangunnya perumahan tersebut adalah sebagai solusi dari meningkatnya kebutuhan perumahan akibat penambahan penduduk, baik yang asli dalam kota Temanggung maupun para pendatang dari kota-kota lain ataupun atau desa-desa

dalam wilayah regional Temanggung yang kebetulan sudah bekerja atau mencari pekerjaan dalam kota Temanggung.

Pada tahun 1980 Kota Temanggung terdiri dari 8 wilayah kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota (Temanggung). Kecamatan Temanggung sendiri pada waktu itu terdiri dari 45 desa/kelurahan¹. Pada tahun 1994 pembangunan perkotaan mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya setelah Pemerintah Pusat mencanangkan **Program P3KT (Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu)**, yaitu *suatu program pembangunan penyediaan prasarana kota pada kota-kota kecil di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY, atau yang lebih dikenal dengan SCUDP (Scoundary City Urban Development Program)*. Untuk keperluan pelaksanaan program yang dibiayai secara konsorsium dari Pemda Tingkat II, Pemda Tk.I, Pemerintah Pusat dan ADB tersebut, disusunlah **Dokumen PJM (Pembangunan Jangka Menengah)** yang berisi analisis, konsep serta prospek perkembangan kota Temanggung 5 tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan program P3KT tersebut dibangun utilitas umum prasarana dasar perkotaan yang meliputi komponen-komponen jalan kota, air bersih, drainase, Perbaikan kampung (KIP), Sanitasi dan Persampahan . Program tersebut dilakukan di 8 wilayah kelurahan dan sebagian pada desa-desa pinggiran (kawasan Suburbia), yang nantinya akan dipersiapkan menjadi wilayah pengembangan dari perkotaan Temanggung .

¹ (8 kelurahan dalam kota Temanggung dibentuk pada tahun 1978, didasarkan UU 5 tahun 1974, yang menyebutkan bahwa desa-desa yang sudah bersifat kota pada kota kabupaten dapat dirubah menjadi kelurahan.

Menurut Konsep Pembangunan Jangka Menengah (PJM) kawasan pengembangan kota tersebut akan mencakup 12 wilayah desa pinggiran.)²

Pada tahap selanjutnya, jika 12 desa-desa pinggiran tersebut, sudah layak dan secara normatif sudah memenuhi standart ketentuan, direncanakan akan dirubah status administratifnya menjadi **kelurahan**, yaitu wilayah terkecil dari hirarkhi pemerintahan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak dapat mengatur rumah tangganya sendiri sebagaimana ketentuan yang ada pada **Desa**³).

Dilihat dari data selama 20 tahun terakhir, yaitu tahun 1980 dan 2000, perkembangan penduduk antara 8 kelurahan yang merupakan kawasan kota utama (*core city*), dan 12 desa kawasan *Suburbia (fringe)* tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Pada tahun 1980 jumlah penduduk kota utama , berjumlah 31.361 jiwa, sedangkan jumlah penduduk kawasan pengembangan 21.410 jiwa. Tetapi pada tahun 2000, penduduk kota utama hanya naik **2,73%** atau menjadi 32.361 jiwa. Sedangkan wilayah pengembangan naik **42,65%** atau menjadi berjumlah 30.542 jiwa. Total penduduk perkotaan

² Delapan kelurahan tersebut : Temanggung I, Temanggung II, Butuh, Jampiroso, Jampirejo, Kertosari, Banyurip dan Kowangan. Sedangkan 12 desa yang termasuk wilayah pengembangan perkotaan adalah Ds. Manding, Kebonsari, Jurang, Sidortejo, Walitelon, Madureso, Mudal, Purworejo, Giyanti, Mungseng, Joho dan Tlogorejo.

³ Berdasarkan ketentuan dalam UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dimana pemerintahannya langsung dibawah Camat dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai konsekwensi wewenang mengatur rumah tangganya sendiri ini, maka didesa dibentuk LMD (Lembaga Masyarakat Desa) yang berfungsi sebagai lembaga legeslasi di tingkat desa. Sedangkan di Kelurahan tidak dibentuk LMD, namun kebijaksanaannya yang mengatur adalah Camat dan langsung dikerjakan oleh lembaga pelaksana yang bernama LKMD.

Temanggung pada tahun 1980 berjumlah 52.771 jiwa sedangkan pada tahun 2000 menjadi 62.760 jiwa atau bertambah 18,93%.

Gejala lain yang terekam dari kondisi wilayah suburbia Temanggung adalah bermunculannya kompleks perumahan, dan pengkaplingan tanah-tanah yang dipersiapkan untuk siap bangun. Komplek perumahan misalnya berkembang 2 unit pada tahun 1980 menjadi 13 unit pada tahun 2000. Sedangkan untuk pengkaplingan lahan siap bangun, hampir terjadi pada sebagian besar desa-desa wilayah pengembangan. Demikian pula dengan harga tanah, selama dua puluh tahun terakhir mengalami peningkatan hampir 400%.

1.2 Perumusan Masalah

Gejala pertumbuhan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar sampai desa-desa pinggiran atau yang dikenal dengan '*urban Sprawl*' seperti yang terjadi di kota Temanggung ini, disatu sisi dapat dipandang sebagai sesuatu yang positif, tetapi juga bisa negatif. Sebagai contoh, pertumbuhan kota dipandang positif apabila berdampak pada meningkatnya fungsi pelayanan kota kepada masyarakat seperti tersedianya sarana dan prasarana kota secara lebih lengkap. Namun sebaliknya bersifat negatif apabila, gejala pertumbuhan sifat-sifat kekotaan tersebut tidak disertai dengan meningkatnya fungsi pelayanan perkotaan kepada masyarakat.

Ditinjau dari sisi normatif fungsi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun

1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan. Sedangkan untuk lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung, hal-hal mengenai kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang *Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan*.

Menurut ketentuan umum dari Peraturan Perundangan dimaksud, disebutkan bahwa *dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di kawasan perkotaan maka dimungkinkan dibentuk kelurahan*. Selanjutnya menurut pasal (8) Kepmendagri Nomor 65 tahun 1999 dijelaskan bahwa Pembentukan kelurahan antara lain diartikan sebagai *perubahan status Desa menjadi Kelurahan*. Pembentukan kelurahan dalam konteks perkotaan, dapat dianggap sebagai kebijaksanaan publik (*public policy*) pada sisi perencanaan yang pada akhirnya akan dapat memberikan pelayanan kota yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini di Kabupaten Temanggung sedang berkembang wacana tentang dimungkinkannya merubah status desa-desa pinggiran dalam wilayah kecamatan kota Temanggung untuk diubah menjadi Kelurahan. Merebaknya wacana tersebut disinyalir sebagai dampak dari kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten yang menetapkan seluruh desa di kawasan Suburbia menjadi daerah perkotaan sebagai dasar penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang secara otomatis menaikkan jumlah pajak terhutang yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Langkah Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan desa-desa sebagai kawasan perkotaan untuk menetapkan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut, berlatar belakang bahwa di desa-desa tersebut telah muncul kondisi-kondisi atau gejala-

gejala perkotaan ditinjau dari sarana dan prasarana dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Berkaitan dengan hal diatas maka permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pertumbuhan kawasan suburbia perkotaan Temanggung dan hendak dikaji dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pertama; bagaimana sebenarnya kecenderungan perkembangan kawasan Suburbia yang terjadi di Kota Temanggung ?.

Kedua; bagaimana implementasi manajemen pembangunan kota didasarkan pada aspirasi/kebutuhan pelayanan kota dan pertumbuhan kawasan Suburbia Kota Temanggung?.

1.3 . Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penelitian ini, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan dan tingkat urbanisasi yang terjadi di kawasan Suburbia kota Temanggung.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi/pelaksanaan manajemen pembangunan kota yang didasarkan pada pertumbuhan suburbia dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat kota Temanggung.

Dalam rangka mencapai tujuan pertama, yaitu mengetahui perkembangan dan tingkat urbanisasi yang terjadi di kawasan Suburbia, maka harus dicapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Mengkaji dan mengetahui pertumbuhan morfologi kota di kawasan suburbia;
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan morfologi kota di kawasan suburbia;
3. Mengkaji dan mengetahui perkembangan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat di kawasan suburbia;
4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penduduk di kawasan suburbia;

Sedangkan untuk tujuan kedua, yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen pembangunan kota yang didasarkan pertumbuhan suburbia dan tuntutan pelayanan masyarakat, maka sasaran-sasaran yang hendak dicapai adalah :

5. Mengkaji dan mengetahui tingkat kecukupan sarana dan prasarana pelayanan kota di kawasan suburbia;
6. Mengkaji dan mengetahui aspek-aspek dalam pelaksanaan manajemen pembangunan kota perkotaan Temanggung.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini, antara lain :

1. *Bagi peneliti* ; dapat dijadikan upaya pembelajaran mengenai pertumbuhan perkotaan berdasarkan teori dan kejadian di lapangan yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas, selaku aparatur Pemerintah Kabupaten , khususnya yang

berkenaan dengan kebijaksanaan manajemen pemerintahan dan perencanaan perkotaan.

2. *Bagi ilmu pengetahuan*; dapat dijadikan referensi awal bagi studi-studi atau penelitian lanjutan tentang pertumbuhan kota-kota kecil di Indonesia, dengan prototipe kota Temanggung
3. *Bagi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten*; dapat dijadikan masukan tentang kebijaksanaan terbaik apa yang perlu ditempuh berkaitan dengan gejala pertumbuhan perkotaan dan kaitannya dengan menciptakan pola serta strategi manajemen perencanaan kota.

1.5. Ruang Lingkup

Lingkup materi/subtansi ; Lingkup materi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah analisa terhadap aspek-aspek pertumbuhan perkotaan, meliputi kajian aspek morfologi (kenampakan fisik), demografi, kondisi sosial ekonomi, aspek pelayanan prasarana kota, kelembagaan serta aspek aspirasi masyarakat berkaitan dengan formulasi rencana kebijakan perencanaan kota.

Sedangkan *Lingkup spatial* dalam penelitian ini adalah cakupan wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan Temanggung, meliputi 8 kelurahan yang termasuk dalam kota utama, yaitu : (lihat peta Nomor I.1)

1. Kelurahan Temanggung I;
2. Kelurahan Temanggung II;
3. Kelurahan Jampiroso ;

4. Kelurahan jampirejo ;
5. Kelurahan Banyurip ;
6. Kelurahan Butuh ;
7. Kelurahan Kertosari ;
8. Kelurahan Kowangan.

dan 12 (duabelas) wilayah desa pinggiran (suburbia) kawasan perkotaan, yaitu :

1. Desa Manding ;
2. Desa Kebonsari ;
3. Desa Jurang ;
4. Desa Sidorejo ;
5. Desa Walitelon ;
6. Desa Madureso ;
7. Desa Mudal ;
8. Desa Purworejo ;
9. Desa Giyanti ;
10. Desa Mungseng ;
11. Desa Joho dan
12. Desa Tlogorejo.

1.6. Kerangka Pemikiran Penelitian

Pertumbuhan dari suatu kota hampir selalu ditandai dengan munculnya kawasan (wilayah-wilayah) pinggiran kota yang disebut **Suburbia** (Inggris = fringe). Selanjutnya pada kawasan suburbia ini, akan terlihat adanya *kenampakan fisik kota (urban sprawl)* seperti adanya kompleks perumahan, industri, kawasan perdagangan/jasa maupun jalan-jalan yang semakin lebar dan beraspal. Merebaknya kompleks perumahan diawali oleh pembangunan perumahan oleh developer (perusahaan pengembang) maupun yang dibangun sendiri oleh masyarakat, pada kapling-kapling siap bangun yang telah dipersiapkan.

Kawasan suburbia tumbuh karena adanya *pertumbuhan penduduk kota* yang diakibatkan oleh adanya *migrasi penduduk* termasuk didalamnya urbanisasi, dalam pengertian perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan maksud untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Pemukim kawasan suburbia di wilayah perkotaan Temanggung, bukan merupakan migran atau kaum urban yang *bekerja di industri atau pabrik*, karena di kota ini pertumbuhan industrinya tidak terlalu pesat, dan walaupun ada industri (biasanya pabrik kayu= jointing board), ia terletak dikawasan industri yang letaknya jauh dari kota, sehingga para pekerjanya juga mencari tempat tinggal di daerah atau desa-desa sekitar pabrik.

Gejala pertumbuhan kota Temanggung, yang mulai nampak sejak awal tahun 80-an, ditanggapi secara positif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Pada tahun tahun 1985-1986 pada beberapa desa pinggiran mulai dilaksanakan program KIP (*Kampung Invironment Project*) yang dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Tengah. Kebijakan dan upaya menjadikan desa-desa pinggiran sebagai kawasan perkotaan terus dilaksanakan dengan masuknya *Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT)* yang sebagian besar

dananya merupakan pinjaman dari *Asean Development Bank* (ADB) melalui kontrak *Sub Loan Agreement* (SLA) - LOAN ADB-1138.

Kebijaksanaan perencanaan perkotaan mencapai puncaknya dengan disusunya RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) pada tahun 1997)⁴. Saat ini muncul isu bahwa jika memang kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan, sudah pantas desa-desa di wilayah tersebut dijadikan kelurahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Sehingga kebijaksanaan pembangunan yang mencakup keseluruhan kawasan tersebut terintegrasi dalam suatu kebijakan manajemen/perencanaan perkotaan yang bersifat terpadu dan meliputi berbagai aspek perkotaan.

Tumbuhnya gejala perkotaan sampai pada kawasan suburbia ini dapat diamati melalui *variabel morfologi, demografi, kondisi sosial ekonomi dan kondisi pelayanan kota*. Dari analisa terhadap variabel-variabel tersebut akan diketahui apakah *desa-desa pinggiran (suburbia)* tersebut sudah layak dijadikan kelurahan, sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan manajemen/perencanaan kota secara terpadu dan terintegrasi. Dengan pengertian lain, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu rekomendasi mengenai kelayakan wilayah pinggiran kota Temanggung sebagai kawasan perkotaan, yang pada akhirnya sebagai acuan bagi pengembangan konsep manajemen perkotaan (*urban manajemen*) yang lebih baik.

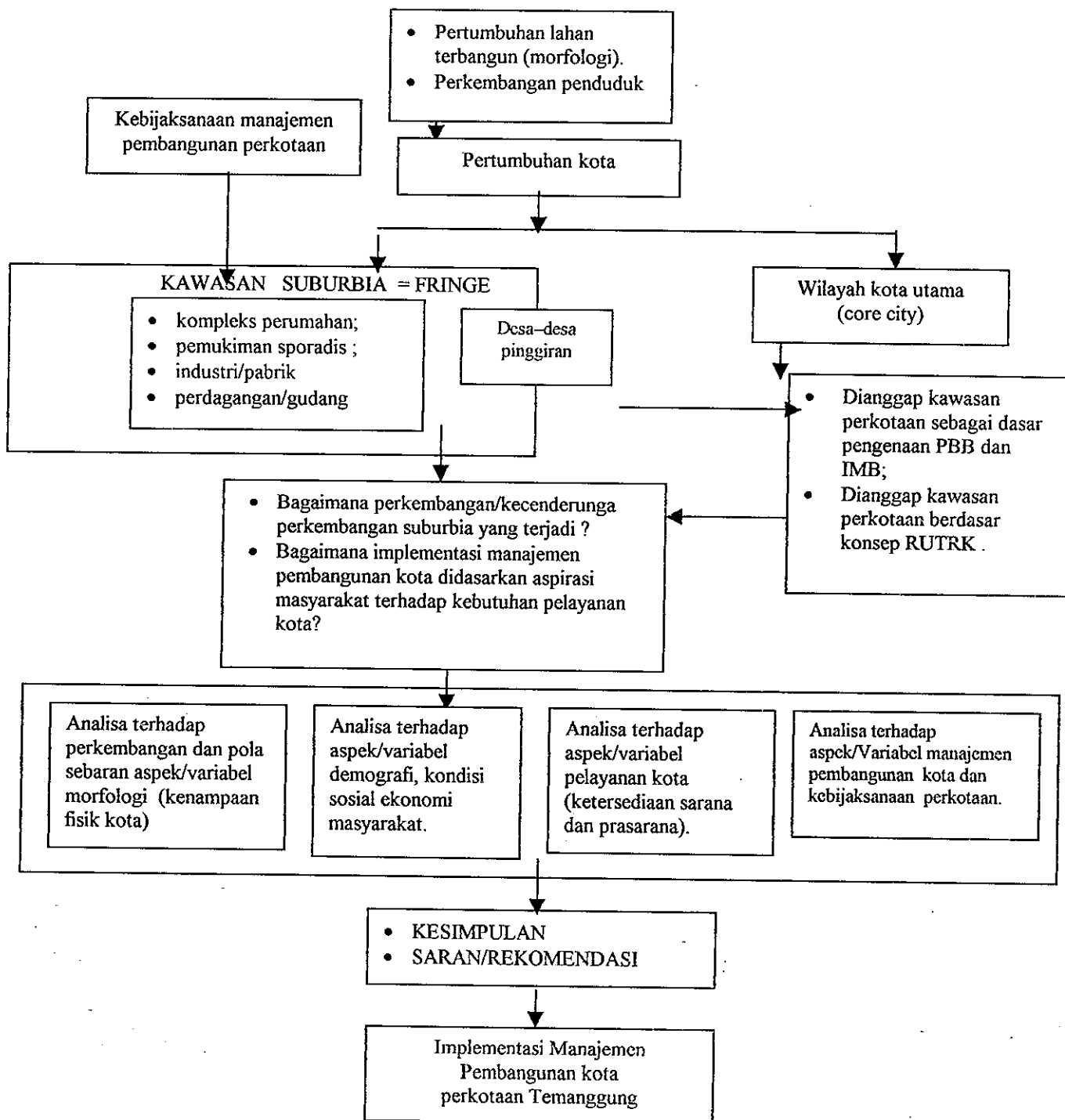
Hasil penelitian ini juga diharapkan akan menjadi referensi yang terbatas mengenai studi, tentang pertumbuhan *kota-kota kecil (kota dengan fungsi kedua = Secondary city)* di

⁴ Sampai saat ini RUTRK tahun 1997 yang menetapkan 12 desa pinggiran sebagai kawasan perkotaan masih belum di PERDA-kan, namun beberapa kebijakan Pemerintah telah menjadikan wilayah tersebut sebagai kawasan perkotaan antara lain sebagai dasar penerapan fiskal (PBB) dan IMB.

Indonesia, khususnya di Jawa, dengan kasuistik perkotaan Temanggung yang lebih dekat dengan profil kota pedalaman (non pesisir).

Rangkuman kerangka pemikiran diadakannya penelitian sebagaimana diuraikan diatas, dapat digambarkan melalui skema atau bagan sebagai berikut :

GAMBAR 1.1
BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN



I.7 Metode Penelitian.

I.7.1 Pengertian dan Jenis Penelitian

Mengenai pengertian penelitian ini, **Sumadi Suryabarata** (1988) memberikan penjelasan bahwa penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana, sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Sedangkan **Winarno Surachmad** (1993) mengartikan penelitian sebagai kegiatan ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru dari sumber-sumber primer, dengan tekanan tujuan pada penemuan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan-ramalan generalisasi di luar sampel yang diselidiki.

Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya **penelitian** adalah *rangkaian kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis, menggunakan kaidah ilmiah guna mencari generalisasi prinsip-prinsip baru atau menemukan pemecahan sebuah masalah/pertanyaan.*

Sedangkan dilihat dari ciri-ciri serta cakupan wilayah, yang hanya melihat pada satu obyek (yaitu wilayah perkotaan meliputi kawasan suburbia Temanggung) maka penelitian ini disebut sebagai *Studi Kasus (case study)*. Penggolongan sebagai tipe studi kasus ini mengacu pada pendapat **Black dan Champion** (Moh. Amaludin, 1992;45), yaitu *suatu penelitian terhadap suatu kesatuan wilayah/sosial yang dipilih sebagai bahan kajian terhadap agregat sosial (wilayah) yang lebih luas.*

Dilihat dari tujuan serta sasarnya yang secara garis besar untuk melihat dan mengetahui secara lebih detail pola pertumbuhan kawasan suburbia, maka **penelitian** ini dapat digolongkan sebagai kombinasi antara *penelitian deskriptif dan penelitian eksploratif (Masti*

Singarimbun dan Sofyan Effendi 1987;28). Penelitian deskriptif karena bertujuan untuk mengetahui dan mendeskritifkan fenomena kawasan suburbia baik dilihat dari aspek fisik, demografi, sosial ekonomi maupun kebutuhan prasarananya. Penelitian eksploratif karena penelitian ini sifatnya masih terbuka, dan berusaha mencari temuan-temuan atau pengetahuan baru dan apa yang terjadi pada obyek penelitian.

1.7.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi atau dikenal dengan *universe*, dapat diartikan sebagai *himpunan individu atau obyek yang sifatnya terbatas*. **Populasi geografi** (*geographical population*) adalah himpunan dari obyek yang masing-masing mempunyai sifat sama atau dianggap sama. Universe dari penelitian ini adalah seluruh kawasan perkotaan Temanggung meliputi seluruh elemen yang akan diteliti, yaitu :

- Variabel kenampaan fisik kota (morfologi) ,
- Variabel demografi dan sosial ekonomi;
- Variabel Sarana dan Prasarana pelayanan kota ;
- Variabel Manajemen Pembangunan kota.

Sedangkan **sampel** adalah sebagian dari populasi yang akan dikenakan *treatment* (*perlakuan*) penelitian tertentu. Karena nantinya sampel akan dijadikan bahan untuk menarik generalisasi terhadap fenomena populasi, maka sampel harus mempunyai sifat atau karakteristik yang sama dengan populasi, hanya cakupan wilayah atau satuan kuantitasnya yang berbeda. Menurut Peter Haget (dalam R.Bintarto, 1979) populasi geografi

(*geographical population*) adalah merupakan himpunan semua obyek yang akan diselidiki. Populasi disebut juga sebagai 'Universe'. Namun apabila populasi yang akan diselidiki tersebut sangat luas, maka penyelidikan/penelitian hanya dilakukan pada sampel-nya saja. Sedapat mungkin sampel harus memiliki derajat keterwakilan (*representatif*) tinggi dari populasi.

1.7.3 Teknik Pengambilan Sampel

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagian tulisan ini diatas, bahwa sampel yang dipilih untuk penelitian ini adalah hanya untuk memperoleh data-data tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pandangan atau persepsi masyarakat (lihat perincian data) . Kepada sampel terpilih akan dilakukan '*treatment*' penelitian berupa pemberian questioner (daftar pertanyaan) dan interview/wawancara.

Pada prinsipnya dalam pengambilan sampel, penelitian ini akan menggunakan gabungan/kombinasi dari beberapa teknik, baik secara random, purposive maupun tingkatan/tahap pengambilan (*multistage sampling*). Selengkapnya struktur dan cara pengambilan sampel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Tahap I**; untuk memperoleh gambaran tentang proporsi lahan terbangun, mutasi dan penduduk, dari seluruh kawasan suburbia yang terdiri dari 12 desa pengembangan, dipilih 2 desa yang secara *proporsional* menunjukkan desa/kawasan yang paling mewakili populasi.

- **Tahap II;** untuk mengetahui gambaran tingkat pendidikan, mata pencaharian dan tipe rumah, diambil satu sampel kawasan hunian/perumahan dari salah satu desa terpilih.
- **Tahap III;** Untuk mengetahui tingkat aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan sarana/prasarana kota dan terhadap kelembagaan manajemen perkotaan, akan dipilih responden dari masyarakat yang direpresentasikan oleh rumah tangga diambil secara acak pada desa kawasan suburbia sampel.

1.7.4 Kebutuhan , Penyajian dan Analisa Data

Pada prinsipnya data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu **data primer**, yang diperoleh berdasarkan dari jawaban questioner, observasi langsung (on the spot observation) dan dept-interview serta **data skunder**, yang diperoleh dari meneliti buku-buku, laporan-laporan dan dokumen tertulis lainnya. Data-data skunder dapat berbentuk tabelaris (struktur angka-angka) maupun peta, gambar maupun skema.

Dari data-data yang diperoleh kemudian akan dilakukan coding dan editing, yaitu pengelompokan data-data sejenis, kemudian meng-entri dalam tabulasi. Penyajian beberapa data disamping dalam bentuk tabel juga akan dilakukan pemetaan (dituangkan dalam peta tematik) sehingga memudahkan dalam melakukan analisa keruangnya.

Beberapa analisa akan dilakukan terhadap data yang ada. Pada variabel Morfologi (kenampaan fisik kekotaan), untuk melihat sifat dan pola penyebarannya akan dipergunakan dengan **Analisa Tetangga-Terdekat/Analisa TT** (*nearest-neighbour analysis*). Pada hakekatnya Analisa T-T sesuai dipergunakan untuk wilayah, dimana titik-titik areal

terbangun (pemukiman) dapat berhubungan (dicapai) secara wajar dan tidak ada hambatan alamiah yang berarti, seperti dipisahkan oleh jurang dll. (R. Bintarto, 1979 hal.75) .

Analisa T-T adalah mencari besaran T = parameter Tetangga-Terdekat (nearest-neighbour statistic) yang dicari dengan persamaan :

Model Analisa Tetangga-Terdekat

$$(1) \dots\dots\dots \boxed{T = \frac{J_u}{J_n}}$$

Keterangan :

T = Indeks penyebaran tetangga-terdekat

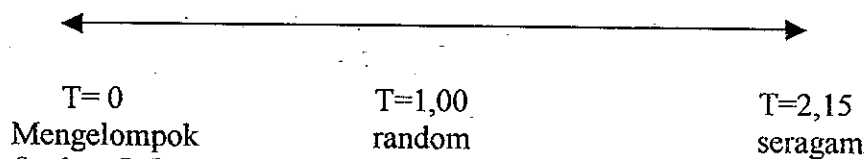
J_u = jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya yang terdekat

J_n = Jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua mempunyai pola random

$$(2) \dots\dots\dots \boxed{J_n = \frac{1}{\sqrt{2P}}}$$

P= kepadatan titik dalam tiap Km², yaitu jumlah titik (N) dibagi dengan luas wilayah dalam Km² (A), sehingga menjadi N/A

Selanjutnya kontinum nilai T ditentukan sbb :



Sumber : R. Bintarto ; 1979 hal.76

Penentuan pola penyebaran areal terbangun yang diketahui dari nilai kontinumnya (T) akan berguna untuk perancangan letak dari pusat-pusat pelayanan/penyediaan sarana dan prasarana kota maupun dalam rangka pengelolaan manajemen. Pola 'mengelompok/konsentris' merupakan pola yang paling efisien, Sedangkan pola 'random/meloncat' adalah pola yang paling tidak efisien dan paling berbahaya dikaitkan dengan tata ruang kawasan.

Untuk menganalisa dan membuktikan tentang keterkaitan antar beberapa variabel yang bersifat korelasi, assosiatif, komparasi ataupun pengaruh, akan digunakan Uji Statistik, yang disesuaikan dengan jenis data yang ada. Seperti *Regresi, Pearson Correlation, Chi-Square, Korelasi Bivariate* ataupun *Uji-T (T-Test) atau Compare-mean*. (Sidney Siegel 1990. hal 130).

Analisa untuk melihat desa-desa kawasan suburbia dalam hal kebutuhan dan kelengkapan sarana dan prasarana kota dan fasilitas umum yang meliputi : sarana kesehatan, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan fasilitas persampahan akan dilakukan dengan menggunakan Angka Ratio Pelayanan dan membandingkan dengan standart/ukuran ratio yang dikeluarkan oleh pihak berwenang (Dirjen Cipta Karya Dep. Kimpraswil).

Selanjutnya untuk mengetahui rangking/score fasilitas sarana/prasarana masing-masing desa pengembangan akan dipergunakan *Metode Skalogram*. Desa-desa yang paling tinggi score kelengkapan sarana dan prasarana kotanya, dapat diindikasikan sebagai desa yang paling urban, sehingga dapat diambil kesimpulan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen pembangunan kota.

Untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif, khususnya data dari variabel manajemen pembangunan yang meliputi kelembagaan, aparatur, kebijaksanaan Tata ruang dan kebijaksanaan pengaturan desa/kota, akan dilakukan dengan cara kualitatif.

Rencana kebutuhan data secara logik dan sistematis, mulai tujuan, sasaran, variabel penelitian sampai pada analisa masing-masing variabel/indikator secara terperinci dikemukakan dalam Tabel I.1 berikut :

TABEL 1.1
DAFTAR VARIABEL PENELITIAN, INDIKATOR, DATA PENDUKUNG DAN ANALISA

NO	TUJUAN	SASARAN	VARIABEL PENELITIAN	INDIKATOR	JENIS DATA	SUMBER DATA	TEKNIK ANALISIS
1	Untuk mengetahui perkembangan dan tingkat urbanisasi yang terjadi di kawasan suburbia kota Temanggung.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji dan mengetahui perkembangan morfologi kota kawasan suburbia ; - Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan morfologi kota. 	MORFOLOGI	<ul style="list-style-type: none"> • Tataguna lahan • Jaringan jalan • Lahan terbangun/kenampakan fisik 	- data ratio	Bappeda/BPN /Desa DPU/	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa proporsi pertumbuhan. - Analisa Regresi - Analisa Chi-Quadrat. - Analisa Tetangga-Terdekat - (Neighbour-Nearest Analisys)
2	Untuk mengetahui implementasi manajemen pembangunan kota didasarkan pada kebutuhan pelayanan dan pertumbuhan kawasan suburbia kota Temanggung.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji dan mengetahui tingkat kecukupan sarana dan prasarana pelayanan kota di kawasan suburbia. - Mengkaji dan mengetahui kecukupan sarana/prasarana pelayanan kota kawasan suburbia. - Mengkaji aspek-aspek dalam pelaksanaan manajemen pembangunan kota. 	SARANA/PRASARANA PELAYANAN KOTA MANAJEMEN	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana pendidikan • Kesehatan. • Transportasi/perhubungan. • Perdagangan. • Komunikasi • Air bersih. • Permukiman. • Kelembagaan. • Aparatur. • Keuangan. • Kebijakan/ perencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - data ratio - data interval - data nominal 	Statistik/kecamatan/desa	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa Regresi - Analisa kerruangan. - Cross tabulation. - Compare-mean - Analisa kualitatif

I.8 Sistematika Penulisan Hasil Penelitian

Sistematika penulisan Laporan penelitian dengan judul *Kajian Pertumbuhan Kawasan Suburbia Sebagai Dasar Manajemen Pembangunan Kota di Perkotaan Temanggung.*, ini disusun sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan; mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, runag lingkup penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Kajian Umum Wilayah Penelitian; mencakup kondisi geografis, demografis dan kondisi administratif manajemen pemerintahan.
- Bab III Kajian Teori ; mencakup pengertian dan teori tentang pengertian kota, teori pertumbuhan kota, teori perembetan kenampakan kekotaan (urban sprawl), manajemen pemerintah kabupaten dan teori manajemen perencanaan kota
- Bab IV Kajian Pertumbuhan Kawasan Suburbia sebagai Dasar Manajemen Pembangunan Kota. Kajian ini meliputi Kajian aspek morfologi (kenampaan fisik kekotaan), Kajian aspek demografi dan Sosial ekonomi penduduk perkotaan, Kajian aspek Sarana dan prasarana Pelayanan Kota dan Kajian aspek Manajemen Pembangunan Kota.
- Bab V Penutup, berisikan kesimpulan-kesimpulan hasil kajian dan saran rekomendasi sebagai usulan rencana tindak bagi peningkatan manajemen/pengelolaan Temanggung pada khususnya dan kota-ota kedua (secondary city) pada umumnya.

BAB II

KAJIAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

2.1 Tinjauan Geografis Kabupaten Temanggung

Secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak pada posisi $110^{\circ} 23' - 110^{\circ} 46' 30''$ Bujur Timur (BT) dan $7^{\circ} 46' - 7^{\circ} 32' 35''$ Lintang Selatan (LS). Batas-batas administrasi wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

Jumlah luas wilayah Kabupaten Temanggung adalah **870,65 Km² (87.065 Ha)** atau kurang lebih 1/60 dari luas wilayah Jawa Tengah. Secara *administrasi pemerintahan* wilayah Kabupaten Temanggung terbagi menjadi **20 wilayah kecamatan**, dan terbagi menjadi **280 desa dan 8 kelurahan**)¹. Pembagian wilayah kecamatan tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Temanggung ;
2. Kecamatan Tembarak ;
3. Kecamatan Kranggan ;

¹) Pembagian wilayah administrasi menjadi 20 kecamatan merupakan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Temanggung di era otonomi, yang memekarkan dari 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan. Tujuh kecamatan baru merupakan hasil pemecahan dari kecamatan yang sudah ada, atau penggabungan dari beberapa desa yang secara geografis berdekatan dari 2 kecamatan yang berbeda dan dibentuklah kecamatan baru.

4. Kecamatan Selopampang ;
5. Kecamatan Tlogomulyo ;
6. Kecamatan Pringsurat ;
7. Kecamatan Kranggan ;
8. Kecamatan Kandangan ;
9. Kecamatan Kaloran ;
10. Kecamatan Bulu ;
11. Kecamatan Parakan ;
12. Kecamatan Bansari ;
13. Kecamatan Kledung ;
14. Kecamatan Ngadirejo ;
15. Kecamatan Candiroto ;
16. Kecamatan Bejen ;
17. Kecamatan Wonobojo ;
18. Kecamatan Tretep ;
19. Kecamatan Jumo dan
20. Kecamatan Gemawang.

2.1.1 Kondisi Fisik Wilayah

2.1.1.1 Topografi

Wilayah Kabupaten Temanggung terletak pada *ketinggian 500 m sampai 1450 m* diatas permukaan laut (dpl) dengan bentuk permukaan hampir menyerupai sebuah *cekungan*

raksasa yang terbuka dibagian Tenggara. Dinding cekungan bagian Selatan dan Barat berupa 2 buah gunung yaitu Sumbing dan Sindoro, dan pada bagian Utara sampai Timur dibatasi oleh deretan pegunungan tua yang menurut **Van Bemmelen (1949)** termasuk dalam deretan Pegunungan Serayu Utara dengan penutup mandala pada bagian Barat adalah hasil endapan muda Gunung Slamet (3.428 m dpl), bagian tengah Pegunungan Dieng, Gunung Prahu dan pada bagian timur ditutup oleh Gunung Ungaran (2.050 m dpl). Pegunungan pada sisi utara wilayah Temanggung antara lain gunung Botak, Pegunungan Gede, Sewakul, Beser, Krincingan, Terongan, Krukup dan Pegunungan Sibunder serta Sapuangin pada bagian timur.

Dengan kondisi topografi tersebut wilayah Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 4 kelompok kemiringan lahan yaitu :

- Kemiringan antara 0° – 2° meliputi lahan seluas 968 Ha;
- Kemiringan antara 2° – 15° meliputi lahan seluas 25.468 Ha;
- Kemiringan antara 15° – 40° meliputi lahan seluas 31.253 Ha;
- Kemiringan 40° keatas meliputi lahan seluas 16.811 Ha

2.1.1.2 Hidrografi dan Klimatografi

Dari aspek Hidrografi, Kabupaten Temanggung termasuk dalam wilayah SWS (Satuan Wilayah Sungai) Progo-Opak dengan DAS Progo hulu serta Sub DAS Bodri. Sesuai dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit dan sebagian wilayahnya merupakan lerang gunung, maka wilayah Temanggung memiliki banyak mata air dan sungai. Diantara sungai-sungai yang besar adalah sungai Progo, Galeh, Kuas dan Sungai Tingal. Sungai-sungai ini mengalir ke Selatan dan menyatu dengan Sungai Progo sampai ke DAS Progo Hilir yang

melewati wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulonprogo. Sedangkan sungai Elo dan sungai Lutut mengalir ke Utara dan menyatu dengan Sungai Bodri.

Kabupaten Temanggung memiliki sifat iklim tropis dengan kondisi udara yang sejuk dengan suhu rata-rata harian 22° C sampai 23,6° C. Curah hujan di wilayah Kabupaten Temanggung mencapai rata-rata 2.877 mm/tahun dengan curah hujan yang besar terjadi pada wilayah bagian timur yaitu sekitar wilayah kecamatan Kandangan, Jumo, Gemawang dan Pringsurat.

2.1.1.3 Kondisi dan penggunaan tanah.

Sebagian besar dari luas wilayah Kabupaten Temanggung merupakan *tanah latosol coklat dan coklat kemerahan*, sedangkan sisanya terdiri dari kompleks *regosol kelabuan dan litosol, aluvial coklat tua kemerahan dan asosiasi andosol coklat dan regosol coklat*. Berdasarkan data penggunaan tanah yang terdapat dalam Buku Renstra Kabupaten Temanggung, pada tahun 2000 penggunaan tanah di Kabupaten Temanggung dapat diperinci sebagai berikut :

- Tanah sawah : 20.653 Ha (23,13%)
- Tanah pekarangan/bangunan : 9.110 Ha (12,01%)
- Tanah tegalan : 29.099 Ha (30,03%)
- Kolam/empang : 28. Ha (0,02%)
- Hutan negara/rakyat : 15.684 Ha (15,99%)
- Perkebunan : 10.350 Ha (7,59%)
- Tanah lainnya : 2.137 Ha (2,90%)

2.1.2 Kependudukan

Berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun 2000, total penduduk Kabupaten berjumlah 661.429 jiwa yang terdiri dari 332.190 perempuan (50,22%) dan 329.239 laki-laki (49,78%). Dengan jumlah tersebut berarti tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung adalah 759 jiwa/Km². Struktur penduduk umur 15 – 64% adalah 67,08% dengan ratio ketergantungan 49%.

Dilihat dari tingkat pendidikan sebanyak 46,49% hanya tamatan Sekolah Dasar/ sederajat (SD), 7,43% tamat SLTA dan hanya 1,51 % tamatan perguruan tinggi (D2, D3 dan S1). Untuk tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari proporsi Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu 4,9% dan Angka BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) 2,8%. Sedangkan ratio tenaga medis (dokter, perawat, bidan) terhadap penduduk 1 : 095.

2.2 Kota Temanggung Dalam Konstelasi Regional Jawa Tengah

Kota Temanggung adalah Ibukota Kabupaten dan juga merupakan salah satu dari 3 daerah perkotaan yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung, yaitu kota Parakan dan Kota Ngadirejo. Kedua kota tersebut terakhir desa ibukota kecamatan dari 20 kecamatan yang ada. Dalam konteks potensi dan kerangka pengembangan wilayah regional Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung termasuk dalam Wilayah Pembangunan (WP) VII yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo dengan pusat pengembangan ada di Kota Magelang.

Sedangkan dalam arahan dan pengembangan sistem/hirarki kota-kota di Jawa Tengah yang tertuang dalam Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah (RSTRP)

1991 – 2005 Kota Temanggung termasuk dalam Orde III. Selengkapnya Hirarkhi kota-kota di Jawa tengah adalah sebagai berikut :

Orde I : Kota Semarang

Orde II : Kota Surakarta, Magelang, Kudus, Pekalongan, Tegal dan Kota Cilacap.

Orde III : Kota Brebes, Purwokerto, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Ungaran, Boyolali, Pati, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Slawi, Pemalang, Batang, Jepara, Rembang, Blora, Wonogiri, Karanganyar, Purwodadi dan Weleri.

Orde IV : Kota-kota ibukota kecamatan yang sudah bersifat kekotaan di Jawa Tengah, seperti Muntilan, Ambarawa, Majenang, Kutoarjo, Kartosuro, Parakan dan Banyumas.

Orde V : Adalah kota kecamatan selain kota-kota yang tersebut diatas dan memiliki orde yang lebih kecil.

Selanjutnya jika dilihat dari konstelasi jalur transportasi regional Kota Temanggung dilewati oleh sistem jaringan jalan arteri regional maupun sistem transportasi Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi seperti Cilacap Purwokerto, Semarang, Magelang, Surakarta dan Yogyakarta. Radius dari Kota Semarang kurang lebih 77 Km dengan waktu tempuh rata-rata 1,5 sampai 2 jam perjalanan.

Selanjutnya untuk melihat posisi Kabupaten Temanggung dalam orientasi Jawa Tengah serta posisi Perkotaan Temanggung dalam konstelasi wilayah kabupaten, dapat dilihat secara jelas pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 sebagai berikut :










MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2002

KAJIAN PERTUMBUHAN
KAWASAN SUBURBIA
SEBAGAI DASAR MANAJEMEN KOTA
DI PERKOTAAN TEMANGGUNG

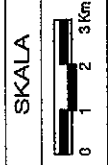
PETA WILAYAH PENELITIAN
(KAWASAN PERKOTAAN TEMANGGUNG)
DALAM WILAYAH KABUPATEN

LEGENDA :

-  : Batas Kabupaten
-  : Batas Kecamatan
-  : Jalan Negara
-  : Jalan Propinsi
-  : Jalan Kabupaten
-  : Wilayah Perkotaan Temanggung (WILAYAH PENELITIAN)
-  : Wilayah desa dalam kecamatan Temanggung yang tidak termasuk perkotaan.

SUMBER

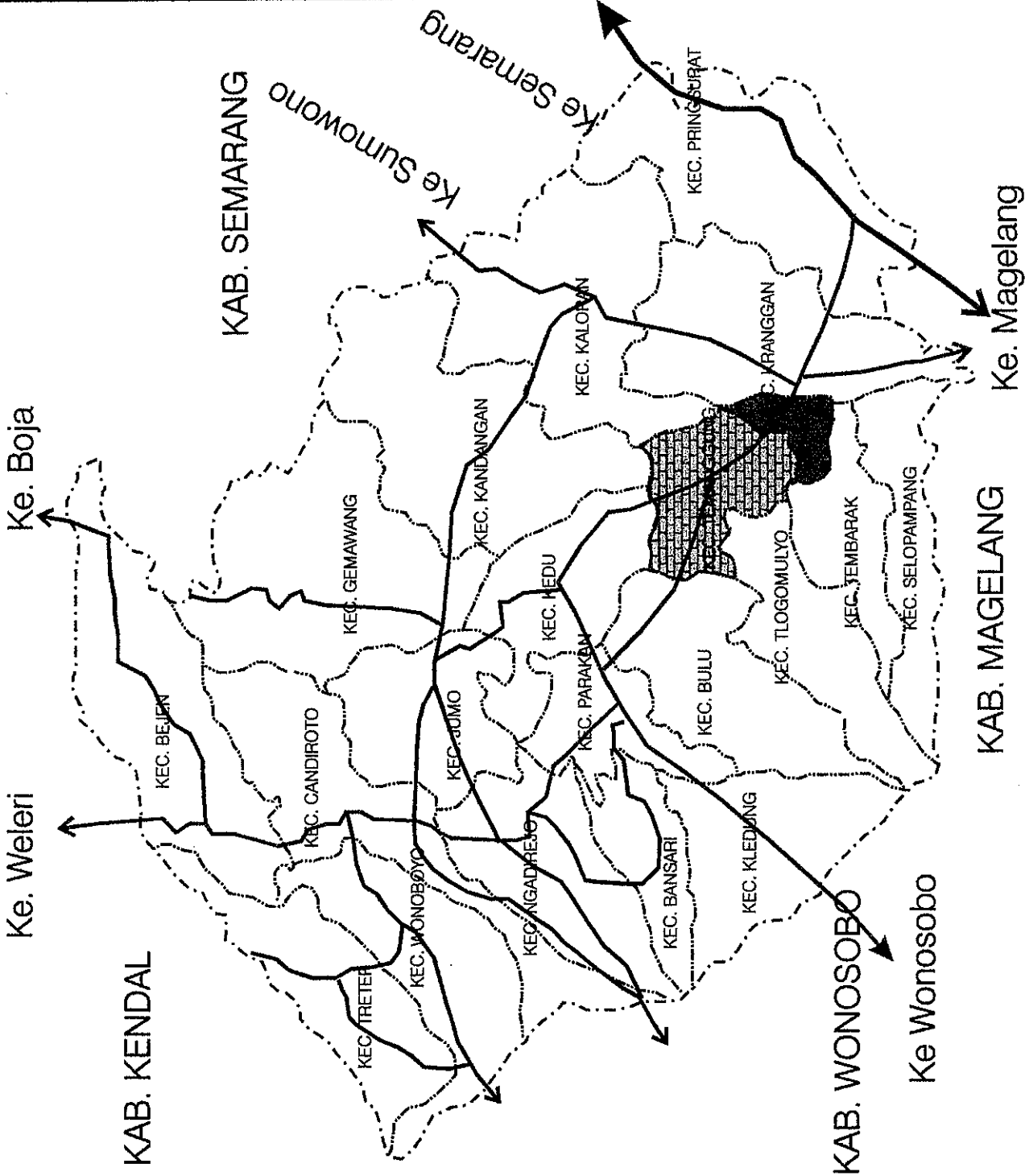
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG



No. Gambar
2.2

SKALA

UTARA



2.3 Kondisi Geografis dan Fisik Perkotaan Temanggung

Dalam konstelasi pertumbuhan regional wilayah kabupaten, Kota Temanggung merupakan salah satu **pusat pertumbuhan** untuk *Wilayah Pembangunan (WP) I* yang meliputi 4 kecamatan sekitar, yaitu Kecamatan Tembarak, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kedu dan Kecamatan Kranggan. Dua ibokuta kecamatan lainnya yang juga mengalami pertumbuhan pesat yaitu **Parakan (WP II)** dan **Ngadirejo (WP III)**.

Sebagaimana kondisi topografi wilayah Kabupaten yang sebagian besar merupakan daerah lereng gunung, kondisi fisik Kota Temanggung merupakan dataran dengan *tingkat kemiringan sekitar 1 – 10°*, dengan permukaan yang lebih rendah ada bagian timur dan yang lebih tinggi pada bagian barat kota.

Luas wilayah perkotaan Temanggung adalah **2.885,02 Ha** yang terbagi secara administratif menjadi **8 kelurahan dan 12 desa**. Berdasarkan pada RUTRK 1996 Kota Temanggung terbagi menjadi *4 Bagian Wilayah Kota (BWK)*, yaitu **BWK A** yang merupakan pusat kota meliputi 4 kelurahan, **BWK B** meliputi 1 kelurahan dan 7 desa, **BWK C** meliputi 3 kelurahan dan 1 desa serta **BWK D** meliputi 4 desa. Pembagian wilayah administrasi dan BWK dapat diperjelas melalui **Tabel II.1** dan **gambar 2.3** sebagai berikut :

TABEL II.1
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI
DAN LUAS WILAYAH PERKOTAAN TEMANGGUNG

NO	BWK	DESA/KELURAHAN	LUAS (Ha)	
1	2	3	4	
1	BWK A	Kel. Temanggung I	29.9	
		Kel. Temanggung II	67.9	
		Kel. Jampiroso	56.9	189.20
		Kel. Butuh	34.5	6.90%
2	BWK B	Ds. Sidorejo	188	
		Ds. Walitelon	362.2	
		Kel. Banyurip	57.4	
		Ds. Kebonsari	89.8	
		Ds. Manding	157.4	
		Ds. Jurang	120.3	
		Ds. Joho	104.8	1,314.10
	Ds. Tlogorejo	234.2	47.90%	
3	BWK C	Kel. Kertosari	152.9	
		Kel. Jampirejo	102.8	
		Kel. Kowangan	212.1	674.40
		Ds. Madureso	206.6	24.58%
4	BWK D	Ds. Giyanti	77.3	
		Ds. Mungseng	112.6	
		Ds. Purworejo	121.8	565.50
		Ds. Mudal	253.8	20.61%
	JUMLAH	KOTA	2,885,02	

Sumber : RUTRK Temanggung 1997 diolah

Dari data tersebut ternyata dapat diketahui bahwa **BWK A** merupakan pusat kota (core city) dan kesemuanya terdiri dari kelurahan. Sedangkan **BWK B** merupakan bagian yang terluas, yaitu 1.314 Ha, meliputi 7 desa dan hanya 1 kelurahan.



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2002

KAJIAN PERTUMBUHAN
KAWASAN SUBURBIA
SEBAGAI DASAR MANAJEMEN KOTA
DI PERKOTAAN TEMANGGUNG

PETA ADMINISTRASI & BAGIAN WILAYAH KOTA
(BWK) PERKOTAAN TEMANGGUNG

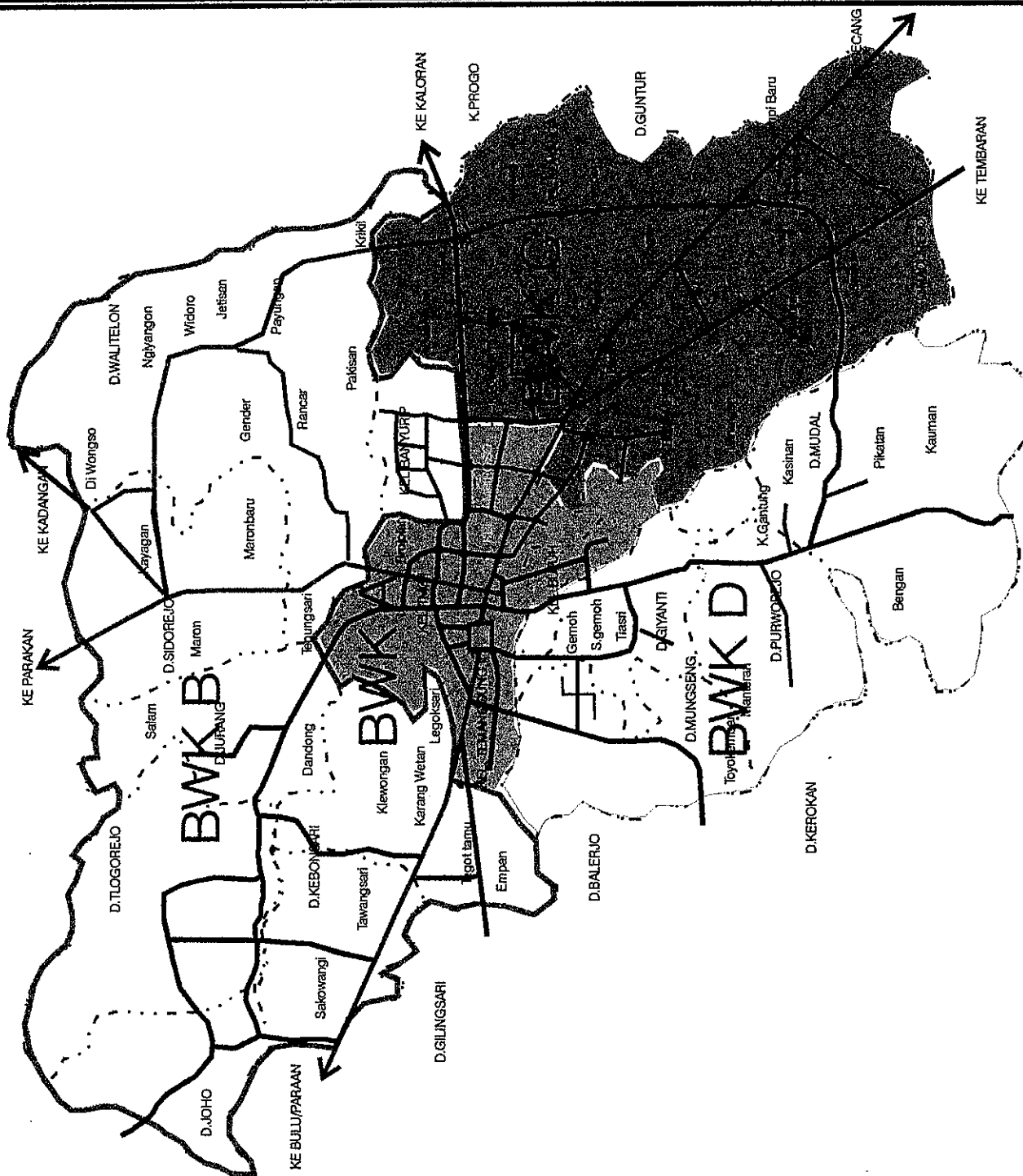
LEGENDA :

- : Batas Kota
- - - - : Batas Desa / Kelurahan
- ==== : Jalan kota
- ==== : Jalan propinsi
- ==== : Sungai
- : BWK A
- : BWK B
- : BWK C
- : BWK D

SUMBER

BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

No. Gambar	SKALA	
2.3		UTARA



2.4 Penggunaan Tanah

Penggunaan lahan di Kota Temanggung secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu *lahan terbangun* dan *lahan belum terbangun*. Untuk lahan yang sudah terbangun meliputi wilayah seluas **467,63 Ha** atau **22,73%** dari total luas wilayah kota 2.885,02 Ha. Lahan terbangun tersebut meliputi *penggunaan pemukiman, fasilitas perdagangan dan jasa, industri/perdagangan, jaringan jalan, dan fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan)*. Untuk lahan yang belum terbangun di perkotaan Temanggung **77,27%** dari total luas wilayah. Area belum terbangun yang terbesar adalah berupa **lahan pertanian (sawah)** 1.205,42 Ha, **tegalan/kebun** 325,24 Ha dan **tanah lain (kapling, lapangan, open space)** meliputi 165,79 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai informasi kawasan terbangun dan pola penggunaan lahan dapat dilihat pada **tabel II.2** dan **gambar 2.4** dan **gambar 2.5** sebagai berikut :

TABEL II.2
PENGUNAAN LAHAN PERKOTAAN TEMANGGUNG
MENURUT KAWASAN

NO	KAWASAN	LUAS (Ha)	AREA TERBANGUN	PROSE TASE (%)	SAWAH (Ha)	TEGALAN (Ha)	TANAH LAIN (Ha)
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Kota Utama (core city) Terdiri dari 8 kelurahan	827.96	308.46	37.26	279.14	140.04	66.2
2	Kawasan Suburbia Terdiri dari 12 desa Pengembangan	2,057.06	467.63	22.73	1,205.42	325.24	165.79
	Total	2,885.02	776.09	26.90	1484.56	465.28	231.99

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung diolah



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2002

KAJIAN PERTUMBUHAN
KAWASAN SUBURBIA SEBAGAI DASAR
MANAJEMEN PEMBANGUNAN KOTA
DI PERKOTAAN TEMANGGUNG

PETA TATA GUNA LAHAN
PERKOTAAN TEMANGGUNG

LEGENDA :

- : Batas Kota
- : Jalan Kota
- : Jalan propinsi
- : pemukiman
- : Lapangan/open space
- : perdagangan/jasa
- : pasar/CBD
- : campuran
- : rekreasi & OR
- : perkantoran pemerintah
- : pertanian(sawah/tegalan)
- : industri/perdagangan
- : tanah kuburan
- : pendidikan(sekolah SLTP/SMU)
- : rumah sakit/balai pengobatan
- : hotel/losmen

SUMBER

BAPPEDA & KANTOR BPN

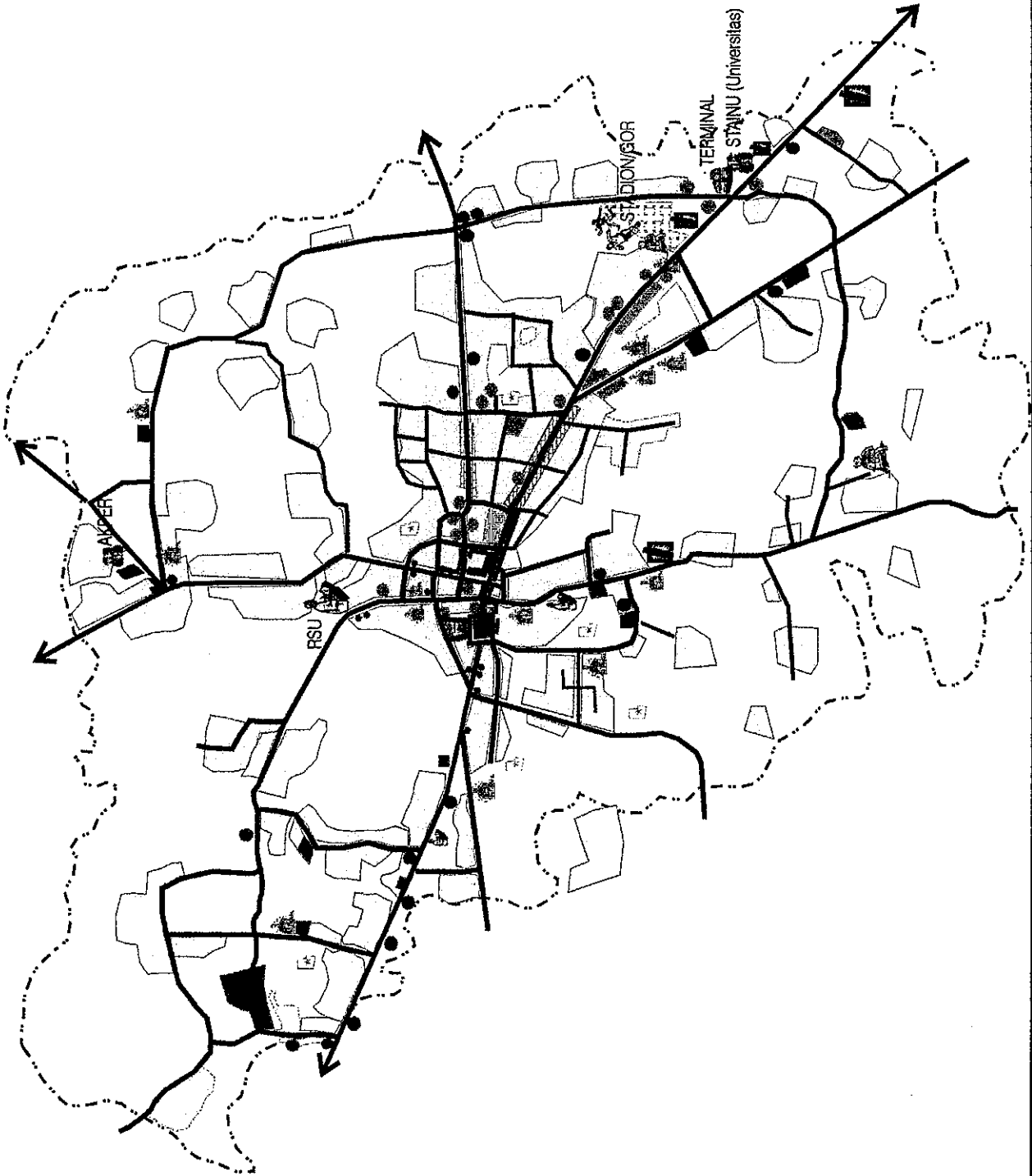


UTARA

No. Gambar

2.5

SKALA



2.5 Fungsi dan Peran Kota

Kota Temanggung sebagai Ibukota Kabupaten dan juga merupakan pusat pertumbuhan untuk beberapa wilayah kecamatan/desa sekitarnya mempunyai fungsi dan peran kota yang beraneka macam. Fungsi dan peran kota tersebut adalah :

- Sebagai pusat administrasi pemerintahan tingkat kabupaten ;
- Sebagai pusat pendidikan;
- Sebagai pusat perdagangan;
- Sebagai pusat pelayanan sosial dan kesehatan;
- Sebagai transit arus barang dan penumpang;
- Sebagai pusat pelayanan transportasi lokal;

2.6 Kependudukan

2.6.1 Jumlah dan sebaran penduduk

Pada tahun 2000, penduduk perkotaan Temanggung berjumlah 64.587 jiwa atau hampir 1/10 dari total penduduk Kabupaten Temanggung. Jika dilihat dari persebarannya sebanyak 32.517 orang tinggal di kota utama (core city) yaitu pada 8 kelurahan dan separonya lagi tinggal di 12 desa pinggiran yang merupakan kawasan pengembangan perkotaan (suburbia). Desa/kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Desa Walitelon yaitu 5.107 orang sedangkan yang paling sedikit yaitu Desa Joho, 951 orang.

2.6.2 Kepadatan penduduk

Tingkat kepadatan penduduk perkotaan Temanggung masih relatif rendah yaitu 22 jiwa/Ha atau 2.200/km². Namun apabila dari kepadatan netto, yaitu jumlah penduduk dibagi luas wilayah terbangun besarnya adalah 83 jiwa/Ha (8.300 jiwa/km²). Untuk 8 kelurahan (kawasan kota utama) tingkat kepadatan nettonya 105 jiwa/Ha, dengan tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kelurahan Temanggung I. Sedangkan wilayah desa pengembangan kepadatannya 69 jiwa/Ha dengan kepadatan tertinggi adalah Desa Madureso. Selengkapnya data jumlah penduduk, persebaran dan tingkat kepadatan dapat dilihat pada **tabel II.3** dan diperjelas melalui **gambar/peta 2.6** berikut :

TABEL II.3
JUMLAH PENDUDUK, PERSEBARAN DAN TINGKAT KEPADATAN
MENURUT KAWASAN

NO	KAWASAN	Jumlah Penduduk	Luas (Ha)	Kpdt.bruto (Jiwa/Ha)	Luas wil. terbangun	Kpdt.netto (Jiwa/Ha)
1	2	3	4	4		5
1	Kota Utama (core city) Terdiri dari 8 kelurahan	32,517	827.96	39	308.46	105
2	Kawasan Suburbia Terdiri dari 12 desa Pengembangan	32,070	2,057	16	467.63	69
	Total	64,587	2,885.02	22	776.09	83

Sumber : profil kecamatan Diolah

2.6.3 Mata pencaharian penduduk

Mata pencaharian penduduk, dilihat per rumah tangga yang ada di perkotaan Temanggung terlihat bahwa, sebanyak 7.900 rumah tangga (RT) atau mencapai 52% dari total rumah tangga, mengandalkan penghasilan keluarganya dari kegiatan/ pencaharian non pertanian. Untuk kawasan kota utama yang terdiri dari 8 kelurahan, rumah tangga penduduk yang bermata-pencaharian dari non pertanian sebanyak 5.197 RT atau 69%, sedangkan yang RT pertanian ada 2.284 atau 31%.

Selanjutnya jenis usaha/mata-pencaharaan yang termasuk non pertanian adalah sektor usaha pertambangan, industri, bangunan/konstruksi, perdagangan, pengangkutan & telekomunikasi, perbankan/lembaga keuangan dan jasa-jasa termasuk di dalamnya PNS dan ABRI. Dari macam sektor usaha tersebut untuk wilayah kota utama yang terbanyak adalah perdagangan dan jasa-jasa, termasuk PNS dan ABRI, masing-masing 1.543 RT dan 1.526 RT.

Kondisi berbeda terlihat di kawasan desa-desa pengembangan perkotaan (12 desa) ternyata masih lebih banyak RT yang hidup dari sektor pertanian, yaitu ada 4.903 RT atau 64%. Sedangkan yang sektor non pertanian 2.703 RT (36%). Sebanyak 894 RT (33% dari jumlah RT non pertanian) , mempunyai sektor usaha jasa-jasa. Sektor ini merupakan yang terbanyak disusul kemudian oleh sektor usaha perdagangan, ada 700 RT (26%).

Data selengkapnya tentang mata-pencaharian dari rumah tangga penduduk perkotaan Temanggung dapat dilihat pada tabel II.4 maupun gambar 2.7.

TABEL II.4
MATA PENCAHARIAN RUMAH TANGGA PENDUDUK PERKOTAAN
MENURUT KAWASAN

NO	KAWASAN	Pertanian	Pertambangan	industri	bangunan	perdagangan	angkutan	perbankan	jasa jasa	jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kota Utama (core city) Terdiri dari 8 kelurahan	2,284	33	516	1,042	1,543	477	60	1,526	7,494
2	Kawasan Suburbia Terdiri dari 12 desa Pengembangan	4,903	86	199	349	700	414	61	894	7,613
	Total	7,187	119	715	1,391	2,243	891	121	2,420	15,107

Sumber : profil kecamatan 2000 diolah

2.7 Sarana dan Prasarana Perdagangan

Arus barang dan jasa di kota Temanggung menunjukkan aktifitas yang tinggi dan mencakup daerah yang cukup luas. Salah satu sarana perdagangan yang terpenting adalah pasar. Dalam wilayah perkotaan Temanggung hanya terdapat 1 buah pasar, yaitu **Pasar Kliwon**. Lokasi pasar yang buka setiap hari ini mampu memberikan pelayanan berbagai kebutuhan penduduk perkotaan Temanggung dan beberapa wilayah kecamatan/desa di sekitarnya. Sedangkan suplay barang-barang, khususnya pakaian jadi dan makanan lebih banyak berasal dari luar daerah/kota seperti Magelang, Yogyakarta, Solo, Bandung, Pekalongan, Semarang, Kudus dan lain-lain. Sedangkan untuk sayur-sayuran banyak disuplai

dari Wonosobo, Bandongan serta beberapa kecamatan/desa sekitar seperti Kranggan, Parakan dan Kandangan.

Di kawasan pasar yang terletak dalam wilayah Kelurahan Jampiroso inilah merupakan *pusat aktifitas perdagangan dan jasa* atau merupakan **CBD (Central Business Distrik)** dari Kota Temanggung. Sarana perdagangan yang lain di kota seperti toko swalayan (hanya ada 1 buah), toko kelontong, kios, Pedagang Kaki Lima (PKL), kantor Perbankan, berpusat di kawasan ini.

2.8 Sarana dan Prasarana Perhubungan

Sarana dan prasarana perhubungan yang penting adalah jaringan jalan dan transportasi. Untuk jaringan jalan Kota Temanggung dilalui oleh jalur jalan propinsi yang menghubungkan antar kota/daerah dalam wilayah propinsi Jawa Tengah. Jalur jalan propinsi tersebut termasuk dalam sektor jalan Kedu Utara yang meliputi Temanggung, Magelang dan Wonosobo. Jalur tersebut menyediakan sarana transportasi umum (bus dan travel) dari Kota Semarang – Temanggung – Wonosobo – Purwokerto. Sedangkan jalur transportasi penting lainnya menghubungkan Yogyakarta – Magelang – Temanggung – Wonosobo. Jalur ini hanya dilayani oleh perusahaan biro perjalanan (travel), khususnya untuk melayani turis asing yang akan mengunjungi Dataran Tinggi Dieng, setelah kunjungan ke Candi Borobudur dan Yogyakarta.

Pada skala sub regional, Kota Temanggung hanya dilewati transportasi umum non bus (micro bus) jalur Magelang – Temanggung – Parakan- Wonosobo dan Magelang – Temanggung – Parakan – Ngadirejo – Sukorejo (Kabupaten Kendal).

BAB III

KONSEP PERTUMBUHAN DAN MANAJEMEN KAWASAN SUBURBIA

3.1. Konsep Kota Kedua (Secondary City)

Menurut kerangka awam (keseharian), begitu mendengar kata **Kota** dalam benak pikiran langsung akan tertuju pada sebuah tempat yang dihuni oleh banyak orang dengan berbagai **sifat heterogenitas**, baik pekerjaan, suku bangsa, tingkat sosial ekonomi maupun karakter atau kepribadiannya. Kota juga akan mengingatkan kita pada sebuah tempat yang **dipadati** oleh *gedung-gedung perkantoran, perdagangan, taman, maupun jalan-jalan lebar yang padat lalu lintas*. Kota juga dipadati oleh berbagai jaringan yang *'semrawut'* seperti kabel listrik, telpon, jaringan pipa air minum dan lain sebagainya. *Semakin besar ukuran kota, maka akan semakin besar dan kompleks jaringan dan berbagai macam keberagaman.*

Dalam konteks teoritis, sampai saat ini masih terdapat berbagai macam pendapat untuk mendefinisikan kota. Hal ini sangat tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang dipergunakan. Dalam lingkungan birokrasi (para pengelola/manager kota), seperti dikatakan oleh **Nining L Susilo (2000; hal.II-1)** dikatakan bahwa “ ..batasan yang terpenting dan sering berperan adalah tentang batas administratif, yang dalam keseharian sering berbenturan dengan batas fungsi”.

Dari sudut pandang **demografi**, kota dilihat *berapa jumlah penduduk yang mendiami*. Meskipun dalam hal ini masing-masing wilayah/negara juga masih mempunyai batasan yang berbeda. USA dan Meksiko misalnya, suatu pemukiman dianggap kota apabila dihuni lebih dari 2.500 jiwa. Di negeri Belanda, pemukiman yang dihuni oleh sekitar 12.200 jiwa, masih dianggap sebagai desa atau istilah lokalnya *“Steenbergen”*.

Di Indonesia, berdasarkan klasifikasi dari Departemen PU (sekarang Dep.Kimpraswil), memberikan standart bahwa kota dengan jumlah penduduk antara 20.000 – 100.000 jiwa dikategorikan sebagai kota kecil, jumlah 100 ribu – 500 ribu disebut kota sedang, 500 ribu sampai 1 juta jiwa disebut kota besar dan diatas 1 juta dikenal dengan Metropolitan. *Bagaimana dengan desa ibukota kecamatan yang biasanya dihuni sekitar 5.000 – 10.000 jiwa?* Menurut ukuran diatas, desa tersebut belum termasuk kategori kota kecil, meskipun penghuninya sering menganggap dirinya orang kota, karena kedekatannya dengan pusat pemerintahan (kantor kecamatan), pasar sudah terdapat fasilitas kota seperti jalan beraspal, transportasi, listrik, telepon maupun air bersih.

Rondinely (1983) memberikan gambaran yang berbeda mengenai kota, yaitu bahwa kota-kota besar (city) adalah berpenduduk 1 juta keatas, kota menengah 500 ribu – 1 juta, kota kecil (atau *kota-kota kedua/secondary city* untuk menyebut kota-kota di beberapa negara berkembang diluar kota-kota besar yang merupakan pusat dari pertumbuhan) antara 100 ribu sampai 500 ribu. Serta *Interface rural-urban* adalah sebuah wilayah permukiman/kota dengan penduduk sampai dengan 100 ribu. Dalam kaitan kota-kota kedua ini **Atmodiriono dan Osborn** (dalam Roundenelly;1983, h.47) memberikan gambaran yaitu *suatu tempat yang mempunyai fungsi penyangga dalam kebijaksanaan pembangunan antara pusat (Jakarta dan pusat-pusat provinsi) dengan wilayah (regional) yang lebih kecil meliputi kawasan ekonomi, sosial pemerintahan dan berbagai kemajuan secara umum.*

Dari sudut pandang sosiologi, seperti dikemukakan oleh **Wirth (N. Daldjoeni; 1997, hal.24)** misalnya memberikan definisi, bahwa *kota adalah sebuah pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen serta dihuni oleh orang yang amat beragam kedudukan*

sosialnya. Oleh karena itu, maka hubungan sosial masyarakatnya menjadi longgar, acuh tak acuh dan tidak pribadi (impersonal relations). Sosiolog lain yaitu **Hans Dieter Evers (1985; hal.10)** berpendapat bahwa sebuah kota adalah suatu pemusatan penduduk di dalam wilayah yang sempit.

Pendapat yang lebih komprehensif dikemukakan oleh **Gideon dan Sjornberg (1965)** bahwa **Kota** adalah *suatu masyarakat dengan ukuran dan kepadatan tertentu, yang merupakan tempat bermukim dari bermacam-macam orang yaitu bukan petani, termasuk didalamnya kaum elite yang tergolong melek huruf (golongan intelegensia kuno seperti pujangga, sastrawan dan ahli-ahli keagamaan). Timbulnya golongan inilah yang disebutnya sebagai titik mula dari gejala kota."*

Sedangkan menurut sosiolog **Lawrence Haworth (1966)** seperti dikutip N. Daljoeni dikatakan bahwa **kota (City)** adalah manusia. Tetapi itu bukan untuk mendefinisikan 'kota', karena di dalam kota faktor manusia sering dilupakan, padahal manusialah yang membentuk kota. Dilihat dari struktur dan bentuknya yang permanen, kota adalah terlepas dari manusianya yang hanya hidup dalam waktu tertentu. Fisik kota merupakan simbol dan bakat kreatif penduduknya, baik yang sudah lewat maupun yang masih hidup disitu. *Penduduk kota membentuk kota tetapi juga dibentuk oleh kota.*

Pendapat lain dikemukakan oleh **Jane Jacobs (1966)** *kota (city)* adalah suatu '*settlement*' yang secara terus menerus membuat pertumbuhan ekonomi dari keadaan ekonomi miliknya sendiri. Dia membedakan antara *kota besar (city)* dengan *kota kecil (town)* bukan dari besar kecilnya, tetapi town adalah suatu pemukiman yang tidak membuat pertumbuhan dari ekonomi setempat yang miliknya sendiri. Sedangkan istilah 'Urban' adalah yang

menyangkut kota besar (city) saja tetapi tidak menyangkut kota kecil (town). Sedangkan *desa* (*village*) adalah bentuk settlement yang lebih kecil lagi dari town atau disebutnya sebagai '*a smaller town*.'

Dalam pandangan **ekonomi**, kota *dipandang sebagai aktifitas ekonomi berlokasi*, seperti dikatakan oleh **Sullivan** dalam Nining L. Soesilo (2000). Ekonomi perkotaan lebih dilihat dari mekanisme pilihan lokasi dari perusahaan maupun rumah tangga, sehingga mengeksplorasi aspek ruang dari masalah perkotaan dan kebijaksanaan publik. Menurut **Marx dan Engels** (Nining L Soesilo 2000, hal.2-6) kota dipandang sebagai '*perserikatan*' yang dibentuk guna melindungi hak milik dan memperbanyak alat-alat produksi dan alat-alat yang diperlukan agar supaya anggota masing-masing dapat mempertahankan diri.

Bagi para **geographer** (ahli geografi) seperti **Ray M Northam** (1975) dalam Nining, L definisi urban lebih cenderung dilihat sebagai *tempat hidup*. Sebagian besar geografer akan mengatakan bahwa '**urban**' adalah suatu tempat yang :

- Kepadatannya lebih tinggi dari pada kondisi penduduk pada umumnya.
- Orang-orang yang berdiam disana pada umumnya terikat pada pekerjaan bukan pertanian, bukan dalam aktifitas ekonomi yang berada dalam sektor primer, serta
- Tempatnya merupakan pusat daripada budaya administratif atau kegiatan ekonomi dari kawasan sekitarnya. Pengertian '**urban**' adalah dalam pengertian aktivitas dari sekelompok manusia di suatu tempat atau lokasi.

Menurut Christaller, (dalam Nining L, hal. 2-7) kota tidak dipandang sebagai tempat pemukiman, tetapi sebagai tempat pelayanan. Hal ini merupakan aspek terpenting yang menjadi dasar dari teori tempat central (*central place theory*). Seberapa jauh kota merupakan pusat, akan tergantung sampai seberapa jauh kawasan sekitar kota memanfaatkan penyediaan sektor jasa di kota itu. Dari pandangan inilah maka kota tersusun dalam hirarki besar kecilnya kota yang berbeda-beda jenisnya. Sedangkan menurut Harris dan Ulman sebagaimana diungkapkan oleh Nining L merupakan pusat pemukiman dan pemanfaatan bumi oleh manusia. Kota-kota sekaligus merupakan paradoks. Pertumbuhan kota yang cepat dan makin meluasnya kota menunjukkan caranya yang unggul untuk mengeksploitasi bumi. Tetapi di pihak lain, justru berkat eksploitasi yang berhasil inilah, maka kota-kota ternyata merupakan suatu lingkungan yang miskin bagi manusia.

3.2 . Pertumbuhan Kawasan Suburbia

Dalam kajian umum pertumbuhan perkotaan ternyata sangat sulit untuk dipisahkan dari keberadaan suatu kawasan pinggiran yang dikenal dengan 'Suburbia atau Urban fringe. Untuk-untuk kota besar di dunia dan di Indonesia, istilah 'pinggiran' memang mempunyai dimensi yang luas. Pinggiran dapat dikarenakan memang letak/lokasinya di pinggir-pinggir sebuah kota (dapat melingkar, menjari atau meloncat/sporadis ; secara jelas akan diterangkan dengan teori perembetan urban sprawl pada Bab ini). Namun 'pinggiran' juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang terdesak dan 'terpinggirkan' secara sosial ekonomi. Hal ini menjadi sangat relevan jika dihubungkan dengan kondisi kota-kota di Indonesia, dimana di sekitar kota

selalu terdapat banyak desa-desa pinggiran, sebagai tempat bermukim petani (agraris) yang jika dilihat secara sosial ekonomi sering *ter-pinggirkan (marginalisasi)* oleh sistem ekonomi dan politik yang ada.

Selanjutnya batasan secara lebih jelas tentang **Suburbia (kawasan pinggiran)** ini oleh **Kurtz dan Eicher** (N. Daljoeni, 1986) diberikan pengertian sebagai berikut :

1. Kawasan dimana tataguna lahan rural dan urban saling bertemu dan mendesak ke periferi kota.
2. Rural-urban fringe meliputi semua suburbia, kota satelit dan teritorium lain yang langsung di luar kota dimana tenaga kerja terlibat dibidang non agraris.
3. Suatu kawasan yang letaknya diluar perbatasan kota yang resmi, tetapi masih dalam jarak melajo (*commuting distance*).
4. Kawasan diluar kota yang penduduknya berkiblat ke kota (*urban oriented resident*).
5. Suatu kawasan pedesaan yang terbuka, yang dihuni oleh orang-orang yang bekerja di kota.

Disamping itu dikatakan pula, bahwa dalam literatur geografi yang paling sederhana, **kawasan Suburbia** dikatakan sebagai *Non mans lands*, sebagaimana diungkapkan oleh **Werhhein dan Balk** (1940; dalam N. Daljoeni) Sedangkan **Nichols** mempersoalkan kawasan Suburbia ini dikatakan apakah termasuk kota (urban) atau termasuk pedesaan (rural), tergantung dari **mata pencaharian penghuninya**, jika agraris masuk **rural**, jika non agraris masuk **urban**. (N. Daldjoeni 1999; 207).

Selanjutnya geografer **Whyne-Hammond**, lebih menyoroiti latar belakang atau alasan-alasan kenapa kawasan 'pinggiran' kota tertentu dapat tumbuh?. Alasan-alasan tersebut secara garis besar, meliputi:

- (1) *Meningkatnya pelayanan transportasi kota;*
- (2) *Bertambahnya penduduk suburban;*
- (3) *Meningkatnya tarap hidup suburbia;*
- (4) *Gerakan mendirikan bangunan pada masyarakat yang dibantu pemerintah (lewat kredit).*

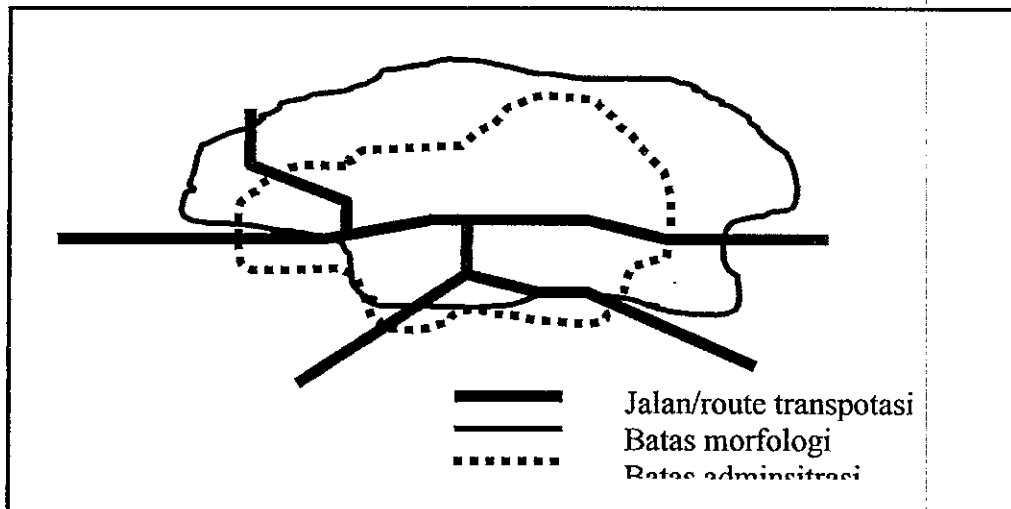
Selanjutnya ciri-ciri khas apa yang dapat dilihat dari kawasan Suburbia ini, dikatakan oleh **Daldjoeni** ; *bahwa makin jauh lokasinya dari pusat kota, makin baru perubahannya dan makin kurang penghuninya. Sebaliknya makin dekat dengan pusat kota makin besarliah ukuran rumah-rumahnya, dikarenakan menampung buruh-buruh rendahan yang menghendaki sewa rumah lebih murah.*

Tumbuhnya kawasan suburbia, tidak dapat dilepaskan dari faktor **urbanisasi**; perpindahan penduduk dari desa ke kota, maupun adanya migrasi yaitu perpindahan penduduk antar daerah. Di negara-negara maju dan kota-kota besar di Indonesia, seperti **Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang dan Medan**, urbanisasi terjadi karena orang ingin pekerjaan di kota khususnya di bidang Industri (pabrik-pabrik). Demikian pula dengan migrasi, orang melakukan perpindahan (atau sekedar mobilitas ulang-ulik, musiman) adalah untuk mencari penghasilan. Akibat adanya migrasi ini maka di kota-kota besar muncul dampak-dampak antara lain *kemacetan lalu*

lintas, tumbuhnya perumahan kumuh, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya harga tanah, terjadinya segregasi sosial dan pemekaran kota.

Banyak penelitian tentang *migrasi* maupun *urbanisasi* dan berbagai dampaknya baik yang positif maupun negatif, yang dilakukan di kota-kota besar. Sebuah studi yang dilakukan oleh JMPDR (Jakarta Metropolitan Development Region), sebagaimana ungkapkan oleh Nining L Susilo (2000; hal.5.10) mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran migrasi penduduk yang semula ke Jakarta menjadi disekitar Jakarta, yaitu Bogor, Tangerang dan Bekasi (Botabek). Penelitian ini selanjutnya mengungkapkan bahwa *penduduk Jakarta dalam Jabotabek, menurun dalam kurun waktu 1980 sampai 1990 dari 54,6% menjadi 43,2% . Dan sebanyak 84,4% yang tinggal di daerah suburbia Jakarta setiap harinya, datang ke Jakarta sebagai 'penglajo'.*

Masalah Suburbia untuk kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang atau kota-kota industri lain dapat dikatakan merupakan satu prototip. Yaitu sebuah kawasan pemukiman (termasuk kota-kota satelit), kawasan industri dan perdagangan yang tumbuh di pinggiran kota, yang kadang-kadang telah melampaui batas administrasi kota. Gejala sebagian besar kenampakan fisik kekotaan yang berada jauh di luar batas administrasi kota inilah yang oleh Northam (1979; dalam Sobari Yunus) yang disebut sebagai '**Under Bounded City**' sebagaimana tertera dalam gambar 3.1.



Sumber : Hadi Sabari Yunus, 2001 :111

GAMBAR 3.1
UNDER BOUNDED CITY

Kondisi 'Under Bounded City' demikian sering memungkinkan munculnya konflik antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Daerah (kabupaten) tetangga, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum kekotaan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk mengatasi kemungkinan timbulnya konflik tersebut Hadi Sabari Yunus (2001; hal.111), mengemukakan sebuah formula 'logical-action', yaitu memperluas wilayah administrasi kota sehingga mencakup semua 'built up area'. Namun disadari bahwa pelaksanaan dari teori ini sangat sulit di lapangan, karena penglepasan wilayah bagi suatu Pemerintah Kabupaten akan menimbulkan *konsekuensi keuangan (monetary consequence)* dan juga menyangkut *prestise (pretigious consequence)*.

Bagaimana dengan kota-kota kecil, khususnya kota-kota 'pedalaman' , semacam **Temanggung**, Wonosobo, Banjarnegara, Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo dan ibukota-ibukota kabupaten lain yang notabene bukan kota industri ?. Apakah analog dengan pertumbuhan sifat fisik kekotaan, yang dapat melampaui batas administrasi kota ? Bagaimana membedakan administrasi kota dengan administrasi kecamatan ?. Itu semua adalah rangkaian pertanyaan 'specific' yang mungkin akan sangat berbeda apabila menggunakan pendekatan/teori-teori untuk kota-kota besar (metropolitan).

Ternyata sulit untuk menerangkan perkembangan atau pertumbuhan kota-kota kecil atau dalam istilah **Rondinelly (1993)** disebut sebagai kota-kota dengan fungsi kedua **Secondary city**. Salah satu penyebab kesulitan tersebut adalah karena minimnya *studi kajian* tentang masalah perkotaan pada kota-kota kecil tersebut, kecuali hanya beberapa penelitian yang dilakukan pada beberapa dekade silam. Seperti yang dilakukan oleh **Van Mook (Daljoeni; 1996)** sebelum Perang Dunia II. Dia menulis tentang Kotagedhe, Yogyakarta. Kemudian pada 1960 Wilmott pernah men-studi bagian kota Semarang yang dihuni kaum Cina. Disamping itu juga terdapat tokoh **Clifford Greetzh**, yang cukup detail berbicara masalah kondisi sosial masyarakat kota-kota di Jawa (N. Daljoeni; 2000 hal.34).

Selanjutnya seorang ahli sosiologi Indonesia **Koncaraningrat (1979)** mengatakan ikhwal kota-kota administrasi di Jawa, yang merupakan *pusat-pusat administrasi pra-industri*. Perkembangan kota-kota tersebut merupakan akibat pentingnya administrasi di masa penjajahan Belanda. Sebelum masa itu kota-kota di

Jawa adalah **pusat-pusat pemerintahan kraton, keagamaan atau pelabuhan**, khusus untuk kota-kota di pesisir.

Besar kecilnya kota administrasi tergantung kepada daerah yang diperintahnya. Dari bawah keatas terdapat kota-kota kecamatan (*onder distric*), *kawedanan (distric)*, *kabupaten*, *karesidenan dan propinsi*. Pada tahun 1930 ketika untuk pertama kalinya diadakan **Sensus Penduduk (SP)**, kota kecamatan (*onder distric*) itu adalah **desa besar** dengan jumlah penduduk kurang dari 10.000 jiwa. **Kota kawedanan** penduduknya 10 ribu – 25 ribu dan **kota kabupaten** antara 25.000 – 100.000 jiwa.

Memperhatikan kota-kota kabupaten, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terasa terdapat kekhasan bentuk fisik yang berkaitan dengan penggunaan lahan maupun keruangan. Seperti diuraikan oleh Tillema (N. Daljoeni, 1996 hal.18) menyatakan bahwa kebanyakan kota administrasi khususnya pada kota kabupaten dipusatnya selalu ada **alun-alun** yang luasnya ± 10 Ha. Ditengah alun-alun tersebut ditanam pohon beringin sebagai lambang perlindungan dan pengayoman yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Kemudian *rumah kediaman Bupati* dibangun di sebelah utara atau selatannya lengkap dengan '*pendopo*' yang dipergunakan sebagai tempat persamuhan resmi Bupati.

Selanjutnya disebelah barat alun-alun terdapat masjid besar dan perkampungan di belakangnya yang dikenal dengan '*Kauman*'. Pada areal sekitar alun-alun lainnya, biasanya dibangun gedung-gedung/kantor negara seperti *kantor Jaksa*, *pengadilan*, *rumah penjara (Rutan)*, dan *pegadaian (rumah gadai)*. Pada bagian

lingkaran yang lebih luar, terdapat perkampungan tempat tinggal orang kebanyakan atau '*wong cilik*', seperti *pedagang, bakul pasar, kuli, dan para pekerja sektor informal* lainnya.

Untuk mengetahui peranan kota-kota kecil dan kota-kota kedua di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, **Rondinely (1983)** memberikan gambaran, bahwa karena disatu sisi mayoritas penduduknya yang agraris dan disisi lain industri juga harus dipacu guna memprcepat pertumbuhan ekonomi, maka *pengembangan kota-kota kedua* menjadi solusi yang sangat tepat, untuk menjembatani antara pembangunan daerah perkotaan, terutama kota-kota besarnya dengan daerah belakangnya.

Beberapa sarjana dan ahli sosiologi yang telah meneliti kota-kota kabupaten beberapa puluh tahun silam tersebut, mungkin tidak mengetahui bahwa saat ini pertumbuhan kota-kota tersebut sudah sedemikian pesat. Di sekitar kota timbul suatu kawasan pinggiran (*Suburbia*) yang secara sekilas jika dilihat dari kenampakan fisik rumah dan prasarannya, justru menunjukkan bahwa penghuninya adalah orang-orang berstatus sosial ekonomi menengah ke atas. Para pegawai dan pendatang dari golongan partikelir yang sukses banyak memilih kediaman yang berada diluar atau bahkan jauh dari pusat kota. Untuk melihat kaitan ini seorang Geograf Indonesia, **Hadi Sabari Yunus (2000, hal. 107)** menyatakan bahwa suatu kota selalu mengalami perkembangan yang menyangkut *aspek fisik (kenampakan fisik kota), sosial, budaya, politik, teknologi dan ekonomi*.

Pada bagian akhir dari Sub bagian ini ada baiknya dikemukakan kembali literer umum yang menyangkut perkembangan perkotaan sebagaimana diungkapkan oleh

Charles Colby (1933; dalam Hadi S Yunus 2000;177) . Dalam hal ini dijelaskan bahwa perkembangan suatu kota pada dasarnya **adalah perubahan penggunaan lahan** dan penggunaan lahan tersebut **bersifat dinamis** seiring dengan perubahan nilai-nilai kehidupan dan *aspek-aspek kehidupan (politik, sosial, ekonomi, budaya, religius dan fisik)*.

Selanjutnya kedinamisan perkembangan kota tersebut, disebabkan karena adanya **kekuatan sentrifugal** (*centrifugal forces*) dan **kekuatan sentripetal** (*centripetal forces*).

Kekuatan sentrifugal adalah kekuatan-kekutan yang menyebabkan terjadinya pergerakan penduduk dan fungsi-fungsi perkotaan dari bagian dalam kota tertentu ke bagian luarnya. Kekuatan sentrifugal terdiri dari 6 jenis kekuatan yaitu :

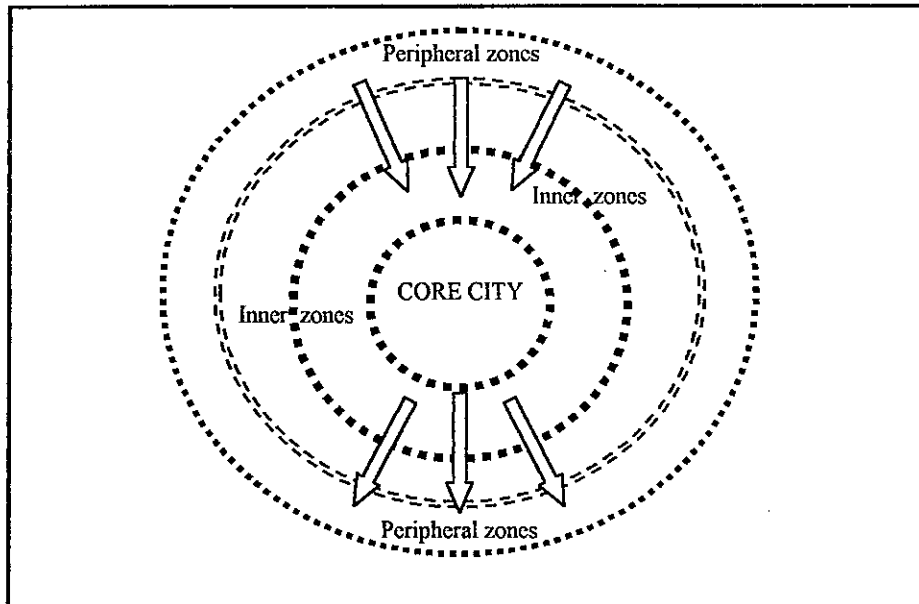
- *Spacial force*; kekuatan ini adalah kekuatan pendorong dari dalam yang berhubungan dengan ruang dalam kota seperti kemacetan lalu lintas, polusi, kepadatan penduduk dan lain-lain.
- *Site force*; adalah kekuatan pendorong dari dalam yang berkaitan dengan lokasi (site) di dalam kota seperti adanya industri, lahan sempit sedangkan di bagian luar tersedia natural landscape yang lebih luas.
- *Situasional force*; adalah kekuatan pendorong yang berhubungan dengan ketidakpuasan fungsi ruang dalam kota, sedangkan diluar masih adanya keleluasaan dalam perencanaan pemanfaatan lahan.

- *Force of social eveluation*; kekuatan pendorong yang terkait dengan kemahalan tanah, pajak tinggi dan larangan tertentu dalam tatanan kehidupan sosial.
- *Status and organization of occupance*; adanya kekutan pendorong dari ketidakpuasan sistim transpotasi dan status penampatan fungsi-fungsi yang tidak baik.
- *Human equation force*; kekuatan pendorong yang terkait dengan persepsi manusia terhadap nilai-nilai dan menempatkan sesuai dengan hak-hak sebagai anggota masyarakat.

Sedangkan **kekuatan sentipetal** terdiri dari 3 jenis yaitu :

- *Site atraction*; adanya penarik site dalam kota dari bagian luarnya, seperti bahwa dekat dengan pusat kota lebih strategis.
- *Functional convenience*; kekuatan penarik dari dalam seperti adanya pusat kegiatan bisnis.
- *Functional megnetism*; kekuatan penarik yang berkaitan dengan kelenkapan fasilitas umum, olah raga dan hiburan.

Secara diagram kekuatan pendorong (push forces) dan kekuatan penarik (pull forces) dapat digambarkan sebagai berikut :



sumber : Hadi Sabari Yunus; 1999 : 179

GAMBAR 3.2
ARAH KEKUATAN DINAMIS PERTUMBUHAN KOTA
MODEL C. COLBY

Adanya kekuatan-kekuatan tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan berbagai persoalan dalam kaitan dengan pertumbuhan kota, khususnya yang berkaitan dengan *kontrol penggunaan dan pengendalian lahan*. Kesulitan tersebut antara lain karena *tidak tertibnya penggunaan lahan, menurunnya optimasi pelayanan prasarana pemerintah dan menurunnya landscape kota*.

3.2.1 Perkembangan Kenampakan Fisik kota (urban sprawl) dan Analisa Tetangga-terdekat.

Dari waktu ke waktu sejalan dengan selalu meningkatnya jumlah penduduk perkotaan serta meningkatnya tuntutan kebutuhan penduduk perkotaan dalam semua

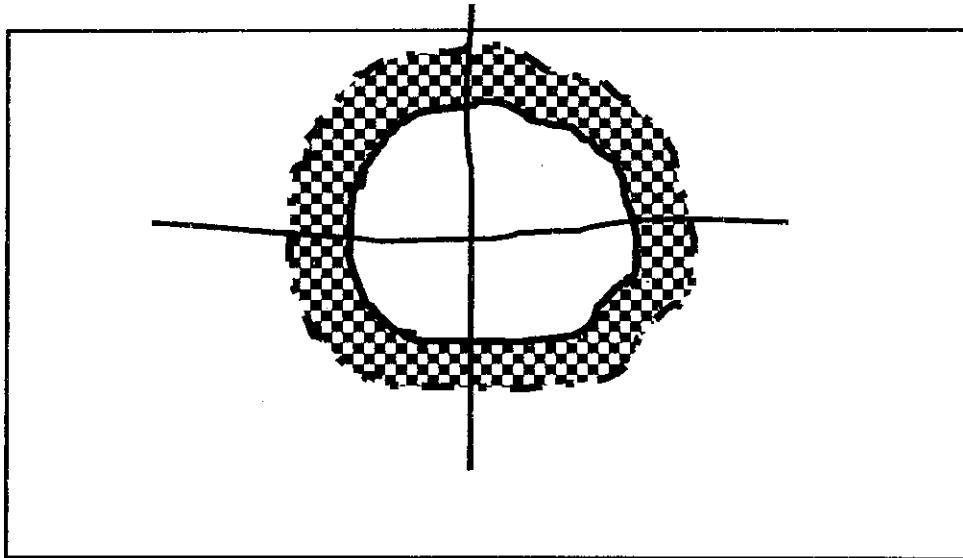
aspek kehidupan, akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan *ruang perkotaan* yang besar. Oleh karena ketersediaan ruang dalam kota terbatas, maka kebutuhan ruang tersebut akan menempati ruang di daerah **pinggiran kota**. Gejala pengambil alihan lahan '*non urban*' oleh penggunaan lahan urban di daerah pinggiran kota disebut sebagai '**invasion**'.

Sabari Yunus (2000) mengatakan bahwa proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar disebut "**urban sprawl**".

Secara garis besar terdapat 3 macam pola proses perluasan areal kekotaan (**urban sprawl**), yaitu :

A. *Perembetan konsentris (concentric Development/Low density continous development).*

Type pertama ini oleh **Harvey Clark** (1971) disebut sebagai "*Low density continous development*" , yang berarti merupakan jenis perembetan kekotaan yang paling lambat dan terjadi pada semua bagian luar kota secara merata. Oleh karena itu perembetan model ini akan membentuk suatu kenampakan morfologi kota yang relatif kompak. Model seperti ini juga mengindikasikan bahwa peranan transportasi terhadap proses perembetan kekotaan.

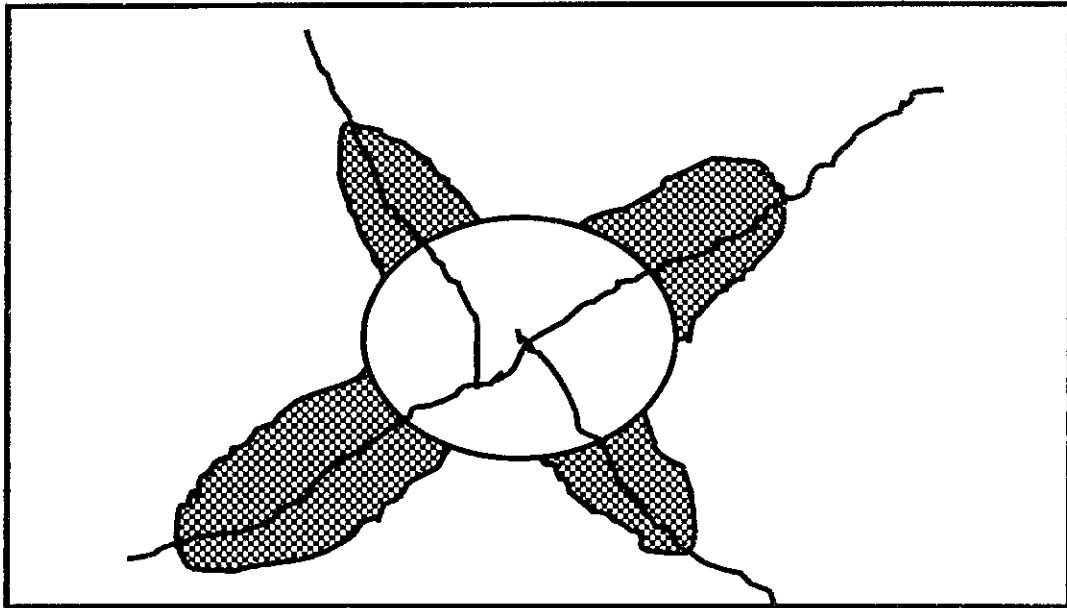


Sumber : Hadi Sabari Yunus (2000:126)

GAMBAR 3.3
PEREMBETAN KONSENTRIS

B. Perembetan memanjang (ribbon development/linier development).

Type ini merupakan *perembetan areal kekotaan* yang tidak merata pada bagian sisi luar dari kota utama. Perembetan paling cepat terlihat di sepanjang jalur transportasi yang ada, khususnya yang bersifat 'menjari' (radial) dari pusat kota. Daerah sepanjang rute transportasi utama mempunyai konsentrasi perkembangan yang paling berat. Sehingga hal tersebut mengakibatkan membubungnya harga lahan pada kawasan perkembangan dan semakin banyaknya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Banyaknya para spekulan tanah juga mengakibatkan para pemilik lahan pertanian pada posisi yang sulit, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kegiatannya.

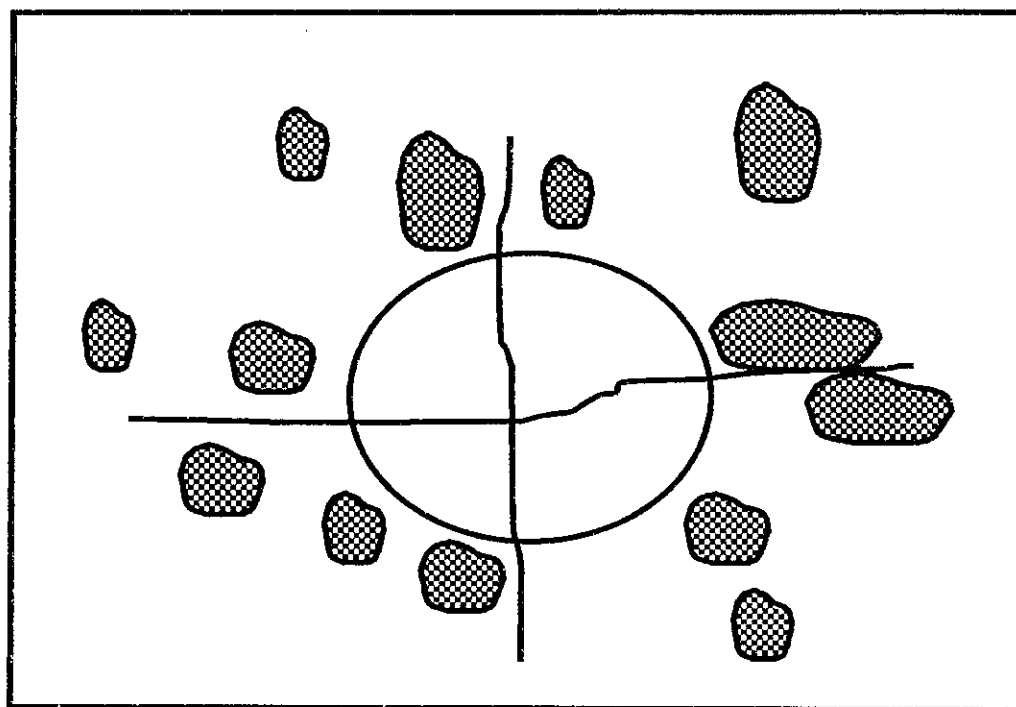


Sumber : Hadi sabari yumus (2000;128)

GAMBAR 3.4
PEREMBETAN LINIER

C. Perembetan meloncat (leap frog development/checkerboard development).

Tipe ini memperlihatkan perembetan yang bersifat sporadis, dan kebanyakan berpencaran di tengah-tengah lahan pertanian. Tipe ini oleh para ahli lingkungan dan ahli tata perkotaan dianggap model yang paling merugikan, tidak efisien secara ekonomis dan kurang memiliki nilai estetika (keindahan). Bagi perencana kota misalnya adalah tidak efisien untuk menyediakan sarana dan prasarana perkotaan dikarenakan tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan luasan areal yang dilayani. Namun hal ini berbeda menurut Hudson (1970) yang mengatakan bahwa secara cepat atau lambat "*the interstitial areas*" (daerah antara non urban) tersebut akan menyatu dan membentuk "*urban landscapes*" yang kompak.



Sumber : Hadi Sabari Yunus (2000;129)

GAMBAR 3.5
PEREMBETAN MELONCAT

Diantara ketiga tipe perembetan tersebut, ternyata yang dapat menimbulkan dampak negatif paling besar adalah tipe ketiga, khususnya berkaitan dengan dampak banyaknya peralihan fungsi lahan dari pertanian menjadi pertanian dan banyaknya spekulasi tanah pada areal/kawasan sekitar yang belum terbangun.

3.2.2 Struktur Sosial Ekonomi Perkotaan.

Tumbuhnya kawasan **Suburbia** yang secara geografi (spatial) terjadi pada wilayah pinggiran kota, mempunyai keterkaitan dengan perubahan pada aspek sosial ekonomi perkotaan. Sekilas memang terlihat positif karena kondisi lingkungan fisik '**pinggiran**'

tersebut menjadi *lebih baik, rumah, jalan dan berbagai jaringan pelayanan kota seperti air bersih, listrik dan telepon* nampak lebih lengkap. Pada sisi yang lain pertumbuhan tersebut sebenarnya dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan sosial ekonomi penduduk kawasan.

Para pendatang (pemukim baru) di kawasan Suburbia yang pada umumnya adalah *pendatang* dari kota (city core) maupun dari luar kota. Mereka kebanyakan dari golongan masyarakat menengah. Penduduk pendatang ini umumnya juga mempunyai pendidikan lebih tinggi, penghasilan yang lebih baik, dan yang jelas bukan bermata pencaharian sebagai petani. Pada kawasan pinggiran, disamping terdapat kompleks pemukiman/perumahan baru juga terdapat pemukiman asli yaitu desa-desa atau dusun, dimana para penduduknya sebagian besar masih bermata pencaharian agraris. Pertemuan perbedaan dua status sosial ekonomi yang berbeda tersebut dapat menimbulkan gesekan-gesekan, seperti *cara hidup, tradisi/adat kebiasaan, kepercayaan/religiusme*.

Disamping itu pada kawasan Suburbia tersebut, akan terjadi '**kontak budaya**' antara budaya desa dan kota. Karena sebenarnya pada desa-desa asli tersebut, cepat atau lambat akan terjadi gejala-gejala **proses pengkotaan (urbanize)**. Sedangkan untuk kaum pendatang, sebagian juga mengadopsi hal-hal yang baik dari kehidupan desa.

Daljoeni (1996;210) dalam kaitan ini mengatakan bahwa antara kedua golongan tersebut akan terjadi saling kontak sehingga terjadi suatu **integrasi**, tetapi kelancarannya masih juga tergantung dari kemampuan masing-masing pihak. Oleh karena itu menjadi relevan apabila Pemerintah suatu kota kewajiban untuk *mengurus, memanage/mengelola* dan menjebatani terjadinya *akulturasi budaya dan ekonomi* antara penduduk asli pinggiran,

pendatang maupun penduduk yang tinggal di kawasan kota utama (city core) sendiri, yang terangkum dalam suatu *kebijaksanaan manajemen perencanaan kota yang intergatif*.

Selanjutnya untuk melihat secara umum bagaimana sebenarnya sistem sosial kota (termasuk wilayah pinggiran/suburbia) terdapat beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan Wilayah Sosial. Pendekatan ini mula pertama kali dikenalkan oleh Shevky dan William (1949). Model ini didasarkan pada *tiga buah pemikiran* konseptual yang luas mengenai sifat-sifat yang sedang berubah pada masyarakat modern yang kebanyakan hidup di perkotaan (*the changing character of modern society*) yaitu :

- (1) Persebaran-persebaran tentang jangkauan dan intensitas hubungan (*changes in the range and intensity of relations*);
- (2) Defrensiasi fungsi;
- (3) Makin kompleksnya organisasi.

Selanjutnya , **Shevky dan Bell** menjelaskan bahwa meningkatnya skala daripada masyarakat industri kekotaan yang modern, ternyata berasosiasi dengan perubahan-perubahan mendasar pada hubungan ekonomi dan social.

Adapun dasar-dasar pemikiran selanjutnya adalah sebagai berikut :

- (1) *Perubahan-perubahan jangkauan dari intensitas* kegiatan sosial mengakibatkan terciptanya tatanan ekonomi baru yang membutuhkan tipe-tipe keahlian dan pekerjaan. Hal ini menjadikan mata pencaharian dan pendidikan sebagai indeks social yang penting.
- (2) *Adanya defrensiasi fungsi* yang berlanjut telah meningkatkan jangkauan/rentangan (range) dari pilihan-pilihan sosial maupun ekonomi di dalam kota. Hal ini menciptakan pola-pola

kegiatan alternatif di dalam kota selain kegiatan tradisional yang bersifat 'family centred' saja.

- (3) *Makin kompleksnya tatanan sosial* tercermin pada berubahnya penduduk kota, berubahnya komposisi penduduk kota dan gejala pemisahan daripada kelompok-kelompok etnis.

Selanjutnya Shevky dan Bell memandang kota sebagai suatu bagian masyarakat keseluruhan (*as a part of society as a whole*) dan semua perubahan-perubahan masyarakat akan selalu tercermin dalam kota. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut ciri-ciri kehidupan sosial dari sifat yang dianggap primitif tradisional sampai sifat-sifat gaya hidup modern. Perubahan-perubahan tersebut selalu meningkat skalanya, dan peningkatan skal ini yang disebut sebagai '*constructs*'. Terdapat 3 ekspresi 'Constructs' yaitu (1) *Sosial rank (jenjang sosial)*, (2) *Urbanization (urbanisasi)* dan *Segregation (segregasi)*.

Sosial rank diartikan sebagai suatu kecenderungan perubahan status ekonomi di dalam masyarakat untuk menjadi lapisan-lapisan sosial yang tertata dengan tepat berdasarkan pengkhususannya (*specialisasi*) dan prestise sosial. *Urbanisasi* diartikan sebagai suatu kecenderungan perubahan status keluarga yang meningkat dari gaya hidup tradisional menjadi bersifat '*urbanized*' (gaya hidup 'ngutho'). *Segregasi* diartikan sebagai suatu kecenderungan perubahan status etnis yang dari waktu ke waktu sehingga membentuk kelompok eksklusif berdasarkan '*ethnicity*'.

Selanjutnya berkaitan dengan *kegiatan ekonomi* penduduk perkotaan dalam penelitian ini dapat digunakan teori-teori atau konsep-konsep yang berhubungan dengan *nilai*

dan penggunaan lahan. Pemanfaatan lahan ini erat kaitannya dengan perilaku manusia dimana manusia mempunyai nilai-nilai tertentu terhadap penggunaan setiap jangkai lahan.

Menurut **Stuart Chapin (1965)** untuk mencoba memahami pola-pola perilaku dari perorangan, lembaga-lembaga dan firma-firma yang mengakibatkan terciptanya pola-pola keruangan didalam kota ("*Behavior patterns of individuals, institutions and firms which occur in spatial pattern*").

Karena adanya nilai-nilai yang hidup didalam perorangan atau kelompok, maka dapat tercerminkan dari suatu siklus yang terdiri dari empat fase / tahap yaitu :

- a. Fase merumuskan kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*experiencing needs and wants*).
- b. Fase merumuskan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan '*needs and wants*' tersebut (*defining needs*).
- c. Fase membuat alternatif perencanaan (*planning alternatives*).
- d. Fase memutuskan memilih perencanaan yang dianggap sesuai dan melaksanakan tindakan (*deciding and acting*).

Disadari maupun tidak disadari baik secara eksplisit maupun implisit bagi individu maupun kelompok individu didalam melakukan kiperahnya di daerah perkotaan akan selalu menyebabkan terjadinya pada penggunaan lahan tertentu. Pola perilaku manusia dapat diamati dari sistem kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan-badan swasta maupun pemerintah.

John Turner (1968), mengemukakan teori tentang mobilitas tempat tinggal (*residential mobility*), mengemukakan ada beberapa dimensi yang bergerak paralel dengan

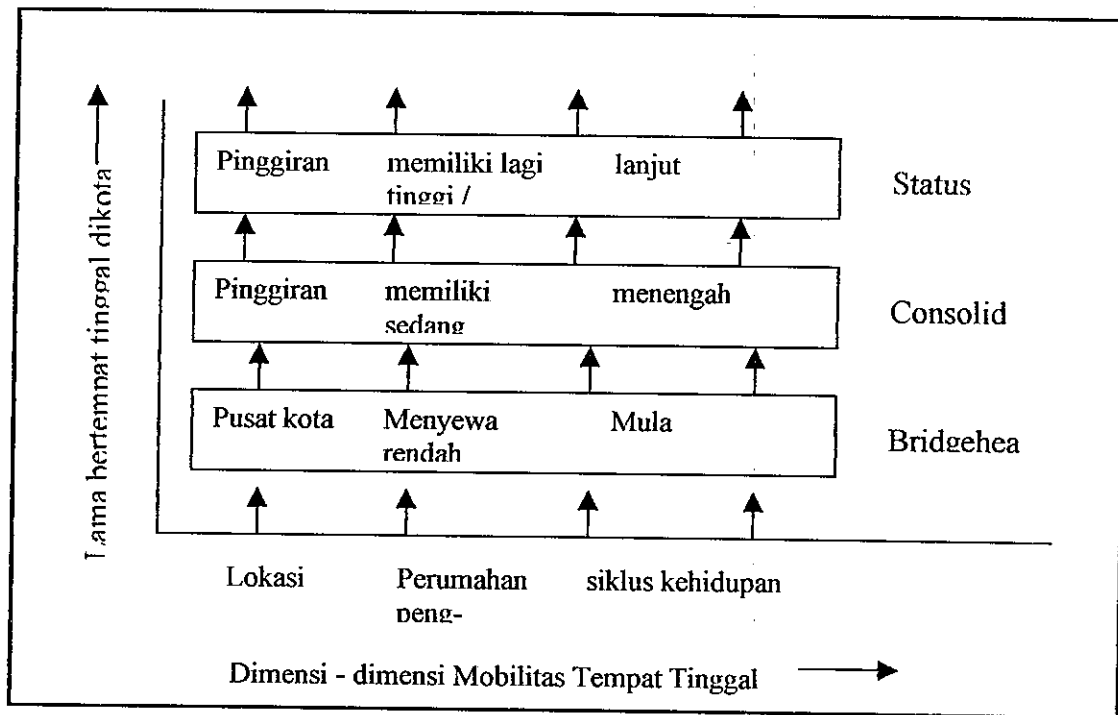
mobilitas yaitu (1) dimensi lokasi (2) dimensi perumahan (3) dimensi siklus kehidupan dan (4) dimensi penghasilan.

Aspek lokasi mengacu kepada tempat-tempat tertentu pula daerah perkotaan yang dianggap paling cocok oleh seorang / sekelompok untuk tempat tinggal. Kondisi ini lebih ditekankan pula penghasilan dan siklus kehidupannya dan juga berkaitan erat dengan jarak ketempat kerja (*Accessibility to employment*) lebih disebut sebagai dimensi rumus geografi (*Geographical space*).

Aspek perumahan, dikaitkan dengan aspirasi perorangan atau kelompok orang terhadap macam tipe perumahan yang ada. Oleh Turner, dibatasi hanya pada "penguasaan (*neture*)" yakni pandangan seseorang terhadap penguasaan tempat tinggal dikaitkan dengan penghasilan dan siklus kehidupannya. Bila seseorang mempunyai penghasilan yang rendah akan memilih menyewa atau kontrak saja dari berangan-angan untuk memilikinya dan daur kehidupan awal, bermula dari penghasilan tingkat yang paling *rendah (low - income)*.

Aspek siklus kehidupan, merupakan tahapan-tahapan seseorang mulai menapak dalam kehidupan mandirinya, dimana segala kebutuhannya seratus prosent ditopang oleh penghasilannya sendiri dan secara umum makin lajut tahap siklusnya, maka makin tinggi pendapatannya.

Aspek penghasilan, disini aspek yang ditekankan adalah pada pembahasan besar kecilnya penghasilan yang diperoleh persatuan waktu, mengingat semakin lama orang menetap didaerah perkotaan makin besar pendapatan yang diperoleh serta makin mantap pula posisi hidupnya.



(Sumber : Hadi Sabari Yunus; 1999)

GAMBAR 3.6 :
MOBILITAS TEMPAT TINGGA
MODEL TURNER

3.2.3 Standart Sarana dan Prasarana Pelayanan Kota

Salah satu aspek penting dalam mengkaji suatu pertumbuhan kota adalah dilihat dari aspek/variabel sarana dan prasarana, sebagai bagian terbesar dari fungsi pelayanan kota. Dalam kenyataan di lapangan sering dijumpai beberapa hal negatif berkaitan dengan pelayanan kota ini. Misalnya pada suatu lokasi dibangun Puskesmas atau Balai Pengobatan, tetapi ternyata pada perkembangan lebih lanjut Puskesmas tersebut tidak berfungsi, karena hampir setiap hari tidak ada pasien yang datang. Pada sisi yang lain masyarakat sebenarnya sangat membutuhkan satu fasilitas sekolah,

namun ternyata Pemerintah tidak/belum dapat memberikan apa yang diminta masyarakat tadi.

Lokasi penyediaan prasarana kota/jasa pelayanan sebenarnya dapat diturunkan dari teori tempat pusat (*Central Place Theory*). Teori yang dikemukakan pertama kali oleh Christaller ini mencoba memodelkan distribusi permukiman dengan tujuan penyediaan barang dan jasa kepada wilayah sekitarnya.

Hal ini akan menjadi perhatian bagi penentu kebijakan untuk dapat menempatkan lokasi kegiatan penyediaan pelayanan yang tepat untuk menghindari pemberian pelayanan yang lambat dan tidak tepat sasaran. Ada tiga konsep mengenai lokasi penyediaan sarana pelayanan kota, yaitu :

1. *Jangkauan* , yang dimaksud dengan jangkauan adalah berapa jauh jarak yang mampu ditempuh untuk membeli barang atau memperoleh pelayanan/jasa pada tingkat tertentu.
2. *Batas Ambang Permintaan*.
3. *Tempat pusat*, untuk lebih memenuhi permintaan barang dan jasa dari suatu wilayah pasar, fungsi –fungsi komersial juga menciptakan kesempatan kerja dan merangsang permintaan konsumen. Pekerja juga ingin untuk meminimalkan biaya untuk transportasi, mereka bermukim berdekatan dengan pusat komersial, yang tidak hanya melayani wilayah pasarnya sendiri tetapi wilayah belakangnya. Pusat komersial tersebut adalah tempat pusat, yaitu suatu pusat yang melayani perkotaan dan pedesaan dan wilayah yang lebih besar daripada wilayahnya sendiri.

Jadi didalam menentukan lokasi kegiatan maupun dalam penyediaan sarana dan prasarana kota, perlu diketahui *aktivitas apa saja yang ada didalam wilayah tersebut* , sehingga permintaan yang ditujukan pada kegiatan itu betul – betul tercermin sesuai dengan permintaan.

Masalah utama yang berkembang dari perkembangan suatu kota adalah semakin membesarnya kebutuhan akan fasilitas kota disatu pihak sedang dilain pihak kota umum memperlihatkan penurunan kemampuan dalam pengadaanya. Pada kota – kota di Indonesia terdapat proses penurunan tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas, hal ini juga terjadi di kota –kota negara berkembang lainnya.

Pengadaan fasilitas – fasilitas umum dan prasarana kota merupakan salah satu tanggung jawab bagi setiap pemerintah kota/kabupaten. Bukan saja dalam pengadaannya, pemerintah kota berkewajiban dalam masalah efisiensi dan pemerataan pelayanan bagi setiap warga kota. Efiseinsi dan pemerataan pelayanan akan berarti penyediaan fasilitas harus dalam jumlah yang cukup memadai serta tersebar secara merata pada ruang dimana penduduk berada. Pengadaan prasarana kota dalam jumlah yang banyak akan menjadikan beban yang berat bagi pemerintah kota. Disamping itu ketidak tepatan lokasi maupun ketidak-efektifan perencanaan yang dibuat dapat mengakibatkan prasarana yang sudah dibangun menjadi tidak berguna (*muspro*).

Kendala kerarah penyusunan perencanaan yang efektif tersebut, paling tidak mulai saat ini menjadi signifikan, manakala pada kawasan suburbia, yang notabene adalah berstatus desa, secara administrasi pemerintahan memiliki sebuah lembaga yang dinamakan BPD (Badan Perwakilan Desa). BPD yang mempunyai

fungsi sebagai lembaga legislasi di tingkat desa tersebut, saat ini menjadi sangat dominan menentukan apa yang terbaik bagi desa atau kepentingannya. Sehingga pada sisi lain, ketika pengetahuan dan kemampuan mereka belum dapat berpikir secara komprehensif bagi kepentingan bersama sebuah komunitas kota, maka dapat dipastikan perencanaan yang berdasarkan standart akan mengalami hambatan. Akibatnya pemerataan pelayanan kepada setiap warga masyarakat kota akan sulit dicapai. Pemerataan pelayanan kepada masyarakat berarti tingkat ketersediaan fasilitas disetiap bagian kota akan menjadi tinggi dan mudah diperoleh serta dengan biaya yang dikeluarkan oleh pengguna akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, pemerintah dengan kemampuan yang relatif terbatas tersebut dapat memberikan alternatif pemecahannya untuk memberikan esentif berupa kemudahan – kemudahan seperti pembebasan pajak dan regulasi lainnya, dapat mendorong masyarakat ikut berperan serta didalam pengadaan prasarana yang skala maupun sifatnya kecil seperti hidran umum, MCK, tong sampah, dan lain – lainnya.

3.3 Manajemen Pembangunan Kota

Meskipun terdengar sangat familiar, namun sebenarnya sulit untuk mendefinisikan secara pasti arti dari '*urban management*'. James. Stonner dan C. Wankel (dalam Nining; 2000 hal.35-1) hanya mendefinisikan pengertian '**Manajemen**' sebagai *proses perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumberdaya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan*. Jadi kalau

pengertian demikian dihubungkan dengan pengertian '*urban*' dalam arti sempit sebagai sebuah *site* atau *ruang*, maka pengertian menjadi sebuah upaya terus menerus baik menyangkut perencanaan, perancangan, implementasi sampai pada pengendalian berbagai aspek pembangunan atau kebutuhan kota.

Menurut Sivaramakrishnan (Johara T 1999; 213) menjelaskan bahwa *manajemen perkotaan meliputi penyediaan secara rutin dan pemeliharaan prasarana pekerjaan umum dan jasa, serta perencanaan dan berbagai proyek pembangunan.* Penyediaan pemeliharaan serta peencanaan dan pelaksanaan prasarana social ekonomi untuk perkotaaan tersebut diusahakan agar biaya modalnya layak dan mencapai sasaran secara efektif.

Selanjutnya Chemma (1993; 14) memberikan uraian lebih terperinci bahwa '*Urban management*' meliputi (1) *pembiayaan kota; (2) perumahan kota, jasa dan prasarana/infrastruktur; (3) sistem informasi perkotaan; (4) sector informal dan (5) kapasitas kelembagaan kota.*

Kemudian untuk masing-masing unsur dalam '*urban manajmen*' tersebut, dijelaskan oleh Johara T sebagai berikut :

(1) *Meningkatkan struktur keuangan dan pengelolaanya;*

Dalam kaitan ini harus dibuat pengaturan untuk memperbaiki sumber keuangan kota untuk membiayai pembangunan prasarana kota, jasa dan pemeliharaannya.

(2) *Penyediaan perumahan, prasarana dan jasa.*

Penyediaan perumahan bagi rakyat merupakan problema paling krusial bagi kebanyakan kota-kota di Indonesia. Banyaknya rakyat miskin perkotaan yang

sering tidak mampu membeli atau menyewa rumah sekalipun harus menjadi prioritas pertama. Namun karena berbagai keterbatasan, seperti masalah dana kota, keahlian dan lain-lain, maka harus dicari alternatif yang paling memungkinkan antara lain meningkatkan partisipasi sector swasta (developer), kemitraan atau bahkan pembangunan perumahan yang bertumpu pada kelompok.

(3) *Penguatan kapasitas kelembagaan kota.*

Berhasilnya suatu kebijaksanaan dan program suatu kota, sebenarnya tergantung sekali pada peranan dan kualitas kelembagaan sebagai organisasi yang melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Seperti diketahui bahwa dalam lingkungan organisasi publik (Pemerintah) mempunyai jaringan dan lingkup kerja yang sangat kompleks. Jaringan suatu program dapat mulai dari Pemerintah pusat sampai pada lembaga paling bawah di tingkat masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sekali adanya *koordinasi dan sinkronisasi*, khususnya dalam masalah posisi serta peran masing-masing serta hubungan tata kerja yang mendukung.

Tanpa didukung sistem kelembagaan yang jelas dan kualitas maka sudah dapat dipastikan pelaksanaan suatu program akan minim keberhasilannya atau jika tidak gagal sama sekali.

Dalam konteks ini misalnya *Pemerintah kota hendak membangun jaringan jalan baru yang melewati beberapa desa di kawasan suburbia, akan tetapi masing-masing lembaga di tingkat desa tersebut belum mempunyai satu persepsi tentang urgensi dari jalan tersebut, maka dipastikan usaha Pemerintah tersebut akan gagal.*

Bagian terpenting dari "*Urban Mangement*" adalah sisi perencanaan, karena pada dasarnya setiap kegiatan akan selalu diawali dengan perencanaan. Oleh karena itu perencanaan kota dapat dipandang sebagai hal yang paling *krusial*, dari seluruh proses **Urban Manajement**. Selanjutnya menurut **Fremman (1957)** mengatakan bahwa **Planning** itu memiliki basis geografi yang mutlak. Jika seorang perencana akan mulai melaksanakan gagasan-gagasannya maka dia harus bisa memahami dimana bentangan alam dan ruang yang menjadi tempat kegiatan tersebut. Hal ini berlaku baik di desa terlebih di perkotaan.

Perencanaan penataan ruang kawasan perkotaan hendaknya mampu mendorong pemanfaatan ruang yang optimal dan tidak kaku, tetapi tegas dalam pembentukan struktur kawasan perkotaan, serta dinamika kegiatan pembangunan perkotaan bersifat global yang berwawasan lingkungan baik dilaksanakan pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat secara menyeluruh sehingga dicapai kualitas ruang kehidupan perkotaan yang serasi, selaras, seimbang, layak, berkeadilan serta menunjang pelestarian nilai-nilai sosial budaya.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang *Penataan Ruang* menyebutkan ada 3 (tiga) tahapan manajemen perkotaan yang berjalan secara siklus yaitu Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian. Pembangunan dapat diawali dengan perencanaan dengan melihat masukan yang didapat dari proses pengendalian pemanfaatan. Kebutuhan akan perencanaan akibat adanya suatu keterkaitan yang erat antar unsur pembangunan perkotaan dan terdapatnya kompleksitas pembangunan perkotaan, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang.

Mengingat unsur-unsur pembangunan yang meliputi kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, keberadaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia harus

terkait satu sama lain dan membutuhkan ruang sebagai wahana, maka pengaturan lokasi kegiatan budi daya dan non budi daya akan dapat membantu efisiensi pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan dan pelestarian lingkungan alam. Oleh karena itu dalam rencana pembangunan perkotaan dilakukan perencanaan pembangunan sosial ekonomi kota secara bersamaan dengan perencanaan pemanfaatan ruang. Penyusunan rencana pembangunan kota memuat keterpaduan rencana pengembangan sosial, sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, dan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup secara terpadu pada berbagai tingkatan (*Rencana Umum untuk seluruh kota, Rencana Detail untuk bagian kota, dan Rencana Teknis untuk beberapa bangunan*).

Selanjutnya **John Friedman (1987)**, perencanaan merupakan ilmu yang menjembatani antara pengetahuan yang bersifat teoritis dengan tindakan praktis. Konteks perencanaan yang dimaksudkan untuk menciptakan arahan-arahan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan proses pembangunan (*Sociatal Guidance*) serta untuk memberikan 'kemampuan memberdayakan' agar mampu melakukan proses pembangunan.

Perencanaan tidak semata-mata persoalan instrumentasi sasaran-sasaran secara efisien, tetapi juga merupakan suatu proses yang mungkin mengantar masyarakat menemukan masa depannya (**Friedman dalam Bryant dan White, 1987**).

Ada beberapa kepentingan dalam manajemen dan perencanaan kota, antara lain perlindungan kepentingan umum (*Public Interest*). Dengan memperhatikan kegiatan manusia dengan daya dukungnya, setiap manajemen yang baik akan berupaya untuk memperhatikan kepentingan umum dalam pembangunan kota.

Beberapa bentuk manajemen ataupun rencana kota yang dapat dihasilkan adalah rencana komprehensif (Rencana Induk Kota, Master Plan, Rencana Struktur, Rencana Strategik dan Rencana Detail).

Rencana komprehensif (*Comprehensive plan, general plan, master plan, rencana induk rencana umum*) adalah dokumen resmi publik/pemerintah yang diterbitkan pemerintah daerah sebagai arahan kebijakan bagi keputusan dalam pembangunan fisik untuk 20-30 tahun ke depan (Balck dalam Branch, 1975). Ciri rencana ini adalah :

- *Komprehensif*, mencakup seluruh bagian wilayah kota dan semua kegiatan fungsional kota.
- *Umum*, berisi ringkasan, kebijakan dan usulan tetapi tidak menunjukkan lokasi khusus atau rincian aturan.
- *Jangka panjang*, melihat isue saat ini sampai perkiraan persoalan dan kemungkinan 20-30 tahun ke depan.

Manajemen alternatif lain adalah **Manajemen Strategik** (*Strategic Management*). Manajemen strategik mensyaratkan prakondisi harus ada komitmen politik yang jelas, terutama dari pimpinan puncak suatu organisasi. Disamping itu menurut Mintberg (dalam Johara T ;2000 hal.8-8) menghendaki suatu keahlian untuk membuat sintesa dan mengkoordinasikan pola-pola dari informasi yang mungkin tak lengkap dan membingungkan. Rencana/konsep manajemen tersebut ini berisi pernyataan visi dan misi skenario masa depan, tujuan utama jangka menengah dan jangka pendek 1 tahun, strategi dan langkah-langkah tindakan, dan rencana implementasi.

Selanjutnya menyangkut hal teknis maupun politis, mendapat kritik oleh yang **Althuler** (dalam Branch, 1975). Untuk itu orang mulai beralih ke rencana struktur yang mengutamakan ketentuan-ketentuan prinsip dalam pembentukan struktur kota. Bagian yang prinsip dalam struktur ruang kota antara lain lokasi kegiatan fungsional kota, lokasi dan jenjang pusat-pusat pelayanan masyarakat, pola makro pemanfaatan ruang, dan jaringan pergerakan utama. Besaran tidak menjadi fokus, dan masih harus dirinci dalam rencana yang lebih detil atau peraturan zoning.

3.4 Kelembagaan dalam Manajemen Pembangunan Kota di Indonesia.

Untuk mendapatkan literature yang mengupas secara lengkap berbagai permasalahan pembangunan kota di Indonesia, ternyata tidak mudah. Apalagi yang menyangkut bagaimana manajemen dan sistem kelembagaannya. Nining L. Soesilo (2000; 35-7) misalnya, menyatakan secara sempit bahwa manajemen pembangunan kota adalah berhubungan dengan usulan program-proyek, mulai dari penyiapan paket rencana, penentuan dan persetujuan, perjanjian pinjaman (misalnya dibiayai dari pinjaman), penyesuaian program/proyek tahunan, pelaksanaan berkaitan dengan anggaran tahunan. Johara T. Jayadinata (1999; 213) tidak secara spesifik memberikan komentarnya mengenai manajemen perkotaan di Indonesia, kecuali hanya sedikit mengenai manajemen perkotaan di negara berkembang. Dikatakan bahwa di negara berkembang, perkotaan cenderung berkembang pesat, sehingga menimbulkan masalah fisik (misalnya perumahan; 30-50% penduduk kota di Asia hidup di perumahan kumuh) dan masalah social ekonomi (kemiskinan di kota). Untuk itu diperlukan dua

pendekatan alternatif, yaitu (1) mengurangi tekanan penduduk di kota (mengendalikan migrasi desa ke kota) dan (2) melakukan manajemen kota yang lebih baik.

Selanjutnya Kunarjo (1996;156) memberikan gambaran yang relatif lengkap mengenai pembangunan daerah/kota. Dikatakan bahwa pembangunan daerah/kota merupakan semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/Kota. Ada 3 (tiga) jenis pembangunan yaitu (1) pembangunan yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah/Kota dan dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun APBD (2) pembangunan yang merupakan kewajiban Pemerintah Pusat tetapi pelaksanaannya oleh Daerah/Kota, dibiayai oleh dana-dana Inpres yang sifatnya merupakan bantuan pusat kepada daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan-urusan daerah (3) pembangunan yang merupakan kewajiban pusat dibiayai APBN dan dilaksanakan oleh instansi pusat di daerah (instansi vertikal; departemen/non departemen). Dalam konteks pelaksanaan ketiga jenis pembangunan tersebut, secara politis, berkaitan erat dengan sistem Pemerintahan Daerah/Kota yang ada yang merupakan bagian wilayah administratif/otonom dari Negara Kesatuan RI.

Berbicara tentang sistem pemerintahan secara otomatis bersinggungan dengan masalah system kelembagaan. Berarti jika kita hendak mengatakan bahwa sebenarnya masalah pembangunan daerah/kota sebenarnya yang pertama dilihat adalah bagaimana sistem kelembagaan diatur untuk melaksanakan tugas tersebut. Berkaitan dengan masalah kelembagaan ini Haryo Sasongko, Ketua Tim Teknis CBUIM (Capacity Building Urban Infrastructure Management), mengatakan bahwa “.....
pengelolaan pada tingkat kota belum dilaksanakan dengan pendekatan urban

manajemen yang baik karena ketidaksiapan SDM maupun sistem kelembagaan dan pendanaan pada kota secara sistematis ... ” (2001;33).

Membahas sistem kelembagaan manajemen kota, maka acuannya adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan-peraturan legal lainnya yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Menurut Undang-Undang 22 Tahun 1999, yang dimaksud **Daerah** adalah Daerah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang disebut Gubernur, Daerah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Daerah yang disebut Bupati dan Kota yang dipimpin oleh Walikota. Selanjutnya dalam UU 22/1999, Bab X pasal 90 tentang **Kawasan Perkotaan** disebutkan bahwa untuk Daerah Kabupaten, perlu ditetapkan Kawasan Perkotaan yang dapat merupakan :

- a. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten;
- b. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi perkotaan;
- c. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.

Pada pasal 91 disebutkan bahwa di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan di daerah kabupaten, dapat dibentuk Badan Pengelola Pembangunan, yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Selanjutnya untuk menentukan, bagaimana bentuk dan jenis lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada aturan tersebut

digariskan bahwa setelah Bupati/Walikota maka perangkat/lembaga dibawahnya adalah Sekretaris Daerah/Kota dibantu oleh **Bagian-Bagian** (Eselon III), yang berfungsi sebagai '*auxelary staff*' Sekda. Selanjutnya instansi berbentuk **Badan** (Eselon II) yang mengurus tugas/pekerjaan lintas koordinasi, Dinas-dinas untuk mengampu tugas lini operasional skala besar, selanjutnya dikelompokkan menjadi **Dinas Daerah** (Eselon II). Sedangkan untuk menangani tugas lini operasional yang skalanya lebih kecil dapat dibentuk **Kantor** (Eselon III). Badan dan Kantor dikelompokkan sebagai **Lembaga Teknis Daerah**.

Selanjutnya Undang-Undang 22/1999 mengatur tentang hirarkhi pemerintahan dibawah Bupati/Walikota ada **Camat** dan **Desa**. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Sedangkan bentuk **Kelurahan** yang sebelumnya diatur dalam UU 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, ternyata tidak diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 1999. Istilah **Kelurahan** baru dikenal setelah muncul di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan. Menurut aturan tersebut dinyatakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai **Perangkat Daerah** Kabupaten dan atau daerah Kota di bawah kecamatan. Selanjutnya pada pasal 2 Kepemendagri ini disebutkan bahwa Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan

tingkat perkembangan pembangunan. Selanjutnya dijelaskan bahwa Kelurahan di bentuk di kawasan perkotaan , dengan memperhatikan persyaratan luas, jumlah penduduk, potensi dan kondisi social budaya masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam pembentukan kelurahan antara lain :

- Faktor penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 KK ;
- Faktor luas wilayah, yaitu mudah dijangkau secara bardaya guna dalam rangka pelayanan masyarakat;
- Faktor letak : Komunikasi, transpotasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat pengembangan ;
- Faktor prasarana : perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan;
- Faktor sosial budaya dan adat istiadat;
- Faktor kehidupan masyarakat : mata pencaharian, dan ciri-ciri kehidupan kekotaan.

Jadi menurut ketentuan dan peeraturan yang mengatur tentang Daerah (Kabupaten/Kota) Bupati yang menguasai daerah kabupaten termasuk didalamnya terdapat kawasan kawasan perkotaan, maupun Walikota yang mengepalai Kota, karena posisi dan kewenangannya dapat dianggap sebagai Manajer Kota (Urban Manager). Namun apabila 'Urban Manager' akan dianggap sebagai pengelola kota yang tidak mempunyai peran politik seperti di Amerika, maka peran manajer kota, mungkin berada

di tangan Kepala Bappeda, atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dirut PDAM atau bahkan Bagian Keuangan. (Nining L Soesila, 2000 hal. 36-7).

Hal inilah yang menjadi keunikan daripada konsep 'manajemen perkotaan' di Indonesia yang secara eksplisit tidak mengenal adanya 'manajer kota', sebagaimana dipahami sebagai pejabat non-politis sebagaimana layaknya konsep barat. Lebih-lebih lagi apabila dikaitkan dengan hirarkhi pemerintahan sebagaimana telah disinggung diatas, dimana setelah Bupati/Walikota dibawahnya ada Desa, yang ternyata mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Hak desa dalam mengatur rumah tangganya disatu sisi mungkin sebagai penghargaan pemerintah kepada adat-istiadat, asal usul desa, namun disisi lain dapat merupakan ancaman serius dalam penataan dan pengelolaan berbagai aspek perkotaan. Apalagi di desa saat ini, yang menurut UU 22/1999 mengenal adanya BPD (Badan Pertimbangan Desa) yang berfungsi sebagai legislative di desa.

Lain desa lain kelurahan. Kelurahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 diartikan sebagai wilayah kerja lurah sebagai **Peangkat daerah** kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan. Status 'Perangkat Daerah' mengakibatkan otoritas Lurah tidak begitu sebesar Kepala Desa. Lurah sebagai Kepala Kelurahan hanyalah aparatur pelaksana dari segala kebijaksanaan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten., yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat desa.

Selanjutnya disebutkan bahwa untuk desa-desa di wilayah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana factor diatas, dapat dibentuk menjadi kelurahan atas

prakarsa masyarakat. Pembentukan kelurahan dimaksud diusulkan oleh pemerintah desa atas persetujuan BPD kepada Bupati. Selanjutnya Bupati dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan.

3.5 Rangkuman Teori

- a) Pertumbuhan suatu kota selalu ditandai dengan munculnya kawasan luar kota yang dikenal dengan sebutan *Urban Fringe* atau *Suburbia*. Karena letaknya (site) berada di pinggiran kota utama (*core city*) maka kawasan ini juga dikenal sebagai kawasan **pinggiran**.
- b) Kawasan Suburbia pada kebanyakan kota di Indonesia, khususnya kota-kota kecil di Jawa meliputi seluruh area terbangun baru (*built up area*) sampai berimpit dan mendesak lahan-lahan pertanian serta kawasan pemukiman desa-desa eksisting, yang secara administratif bukan termasuk wilayah administrasi kota.
- c) Terdapat berbagai pola/model pertumbuhan kawasan suburbia, yang yaitu *model konsentrik*, *model radial* dan *model loncat*, dimana keseluruhan model apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan antara lain, kecepatan perubahan lahan subur pertanian, konflik budaya/adat kebiasaan antara desa/kota, beratnya penyediaan prasarana kota oleh pemerintah, menurunnya daya dukung lahan, masalah konservasi dan lain-lain.
- d) Beberapa latar belakang penyebab muncul dan tumbuhnya kawasan suburbia antara lain (1) meningkatnya pelayanan transportasi kota (2) bertambahnya penduduk akibat migrasi (3) Meningkatnya taraf hidup masyarakat (4) Gerakan/ kebijaksanaan pemerintah dibidang pembangunan perumahan dan perencanaan zoning.
- e) Faktor penyebab lain tumbuhnya morfologi kota di kawasan pinggiran, dikarenakan adanya kekuatan dinamis yang dikenal dengan *Centrifugal movement* dan *Centripetal movement* (*push and pull factor*). *Push factor* dari dalam kota antara lain kemacetan,

polusi, kemahalan tanah, sedangkan pada bagian yang lebih luar dari kota selalu tersedia alam yang lebih terbuka, bebas polusi, pajak relatif rendah dan lain-lain.

f) Secara garis besar terdapat beberapa konsep umum dalam mengelola pertumbuhan kawasan suburbia tersebut, dalam kaitannya dengan manajemen pembangunan kota, yaitu (1) pertumbuhan yang sedang berlaku harus direncanakan dan diarahkan tetapi jangan dihambat, karena pertumbuhan adalah sifat alamiah dari kehidupan, (2) Perlunya mencari jalan menurut hukum, administratif yang paling relevan, (3) Membuat kesepakatan diantara orang-orang atau lembaga terkait (4) cari solusi pembiayaan dan kelembagaan serta pemerataan pemberian pelayanan.

g) Untuk mencapai bagaimana implementasi manajemen pembangunan kota dikaitkan konsep tersebut butir h diatas, dimulai dari meneliti dan mengkaji aspek-aspek pertumbuhan kawasan yang terdiri dari :

- aspek morfologi/kenampakan fisik,
- Aspek demografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat
- aspek pelayanan kota
- aspek manajemen.

h) Hal-hal atau unsur pokok dalam 'urban management' yang terpenting adalah meliputi :

- Pembiayaan kota ; meningkatkan struktur keuangan dan pengelolaanya;
- Penyediaan perumahan dan sarana/prasarana pelayanan kota;
- Penguatan kapasitas kelembagaan ; penyempurnaan struktur organisasi kewenangan kota.

BAB IV

KAJIAN PERTUMBUHAN KAWASAN SUBURBIA SEBAGAI DASAR MANAJEMEN PEMBANGUNAN KOTA

4.1. Kajian Aspek Morfologi Kota

Yang dimaksud dengan aspek morfologi disini diartikan sebagai perkembangan kenampakan kota secara fisik, yang menyangkut pola penggunaan tanah, jaringan jalan dan tipe sebaran lahan terbangun. Untuk penggunaan tanah pada aspek morfologi ini akan dilihat bagaimana komposisi tataguna tanah/lahan, perkembangan areal terbangun dan bagaimana pola sebaran areal terbangun. Selanjutnya akan dikaji keterkaitan antara perkembangan areal terbangun dengan jarak kawasan . Indikator jaringan jalan, akan dilihat dari bagaimana pola jaringan jalannya dan hubungan antara perkembangan jaringan jalan dengan perkembangan areal terbangun.

4.1.1. Tata Guna Lahan.

Pembahasan tentang aspek morfologi kota, pertama akan dilihat tentang penggunaan lahan, khususnya tentang jenis penggunaan dan perkembangan area terbangun yang merupakan indikator terpenting dalam melihat pertumbuhan kawasan perkotaan. Untuk jenis penggunaan lahan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu :

- A. Tanah/area terbangun; antara lain meliputi bangunan untuk tempat tinggal/pemukiman (settlement), bangunan usaha/perdagangan/pasar, bangunan pergudangan/industri , jalan dll.
- B. Tanah sawah;
- C. Tanah tegalan/kebun;
- D. Tanah lainnya; antara lain untuk pekarangan, lahan terbuka, pekuburan , lapangan dll.

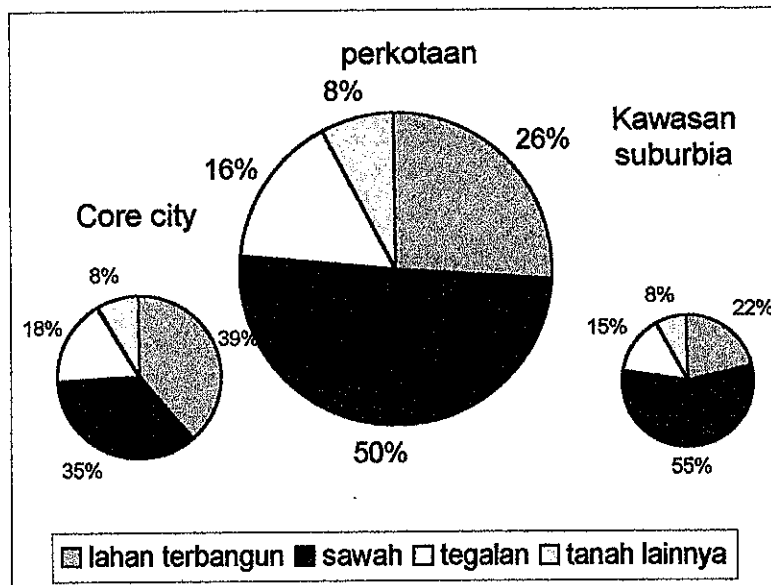
TABEL IV.1
TATA GUNA LAHAN PERKOTAAN TEMANGGUNG
MENURUT JENIS DAN DESA/KELURAHAN
TAHUN 2000

NO	KAWASAN (DESA/KEL)	LUAS (Ha)	AREA TERBANGUN	PROSE TASE (%)	SAWAH (Ha)	TEGALAN (Ha)	TANAH LAIN (Ha)
1	3	4	5	6	7	8	9
I. Core city (Kelurahan)							
1	Kel. Temanggung I	29.86	20.36	68.18	0.9	0	8.6
2	Kel. Temanggung II	67.92	34.00	50.06	22	0	11.92
3	Kel. Jampiroso	56.89	40.57	71.31	14.22	0	2.19
4	Kel. Butuh	34.49	20.6	59.73	7	0	6.89
5	Kel. Banyurip	57.44	22.04	38.37	25.04	2.5	7.2
6	Kel. Kertosari	152.94	56.54	36.97	74.5	11.5	10.4
7	Kel. Jampirejo	216.33	46.33	21.42	11	115	11
8	Kel. Kowangan	212.09	68.02	32.07	124.48	11.04	8
	Jumlah I	827.96	308.46	37.26	279.14	140.04	66.2
II. Kawasan Suburbia (Desa)							
9	Ds. Walitelon	362.28	71.30	19.68	246.28	23	21.7
10	Ds. Sidorejo	188.05	60.7	32.28	87	17	23.35
11	Ds. Kebonsari	89.8	24.41	27.18	16.75	3.32	15.32
12	Ds. Manding	157.44	29.27	18.59	110.95	110.95	15.22
13	Ds. Jurang	120.35	24.04	19.98	86.14	1.23	8.94
14	Ds. Joho	104.08	18.66	17.93	75	0	11.92
15	Ds. Tlogorejo	263.04	38.3	14.56	183.9	3	23.78
16	Ds. Madureso	206.56	31.5	15.25	123.5	45	6.56
17	Ds. Giyanti	77.29	30.1	38.94	34.8	0	12.39
18	Ds. Mungscng	112.58	82.06	72.89	66.36	0	12.19
19	Ds. Purworejo	121.84	18.99	15.59	76.74	17.29	3.32
20	Ds. Mudal	253.75	38.3	15.09	98	104.45	11.1
	Jumlah II	2,057.06	467.63	22.73	1,205.42	325.24	165.79
	total I + II	2,885.02	776.09	26.90			

Sumber : profil kecamatan 2000, diolah

Dari luas total perkotaan Temanggung yaitu 2.885,02 Ha seperti terlihat pada tabel IV.1 diatas, untuk kawasan suburbia meliputi 2.057,06 Ha atau 71,30 %. Lahan terluas adalah Desa Walitelon (362,28 Ha) dan paling kecil wilayahnya yaitu desa Giyanti (77,29 Ha). Luasan areal terbangun seluruhnya mencapai 467,63 Ha atau 22,73%. Jika diperinci menurut kelompok 'kelurahan (core city) disatu sisi dan kelompok 'desa kawasan

suburbia' akan tampak perbedaan, untuk 8 kelurahan areal terbangun mencapai 308,46 Ha atau 37,26% dari jumlah luas kelurahan.



Sumber : Data diolah

GAMBAR 4.1
KOMPOSISI TATAGUNA LAHAN
PERKOTAAN TEMANGGUNG

Selanjutnya untuk 12 desa kawasan suburbia areal terbangunnya mencapai 467,63 Ha atau 22,73% dari jumlah luas kawasan. Selanjutnya jika dilihat luasan areal terbangun masing-masing desa, areal terbangun yang paling luas dimiliki oleh Ds. Mungseng, 82,06 Ha sedangkan terkecil Desa Purworejo 18,99Ha. Namun dilihat dari proporsinya terhadap luas wilayah masing-masing, proporsi terbesar dimiliki oleh Desa Mungseng, yaitu meliputi 72,89% dan terkecil Desa Tlogorejo (14,56%).

Untuk desa sampel kawasan Suburbia yaitu Desa Kebonsari dan Desa Mudal diperoleh data bahwa sebagian besar areal terbangun sebagian besar adalah dipergunakan untuk pemukiman/perumahan (settlement) yaitu Kebonsari mencapai 68%, jalan dan

fasilitas sosial lainnya seperti masjid, lapangan, gedung pemerintah /sekolah mencapai 19,8%, pergudangan 10,6%, lain-lain (empang) 0,6 %. Sedangkan Mudal dengan luas areal terbangun 38,3 Ha, untuk lingkungan pemukiman dan perumahan mencapai 73,4%, jalan dan fasos lainnya (15,6%), pergudangan/industri 7,4% dan lain-lain, termasuk areal Pemandian Pikatan (5,6%).

Dilihat dari perkembangan lahan terbangun selama kurun waktu 1990 – 2000, terlihat bahwa desa-desa di kawasan pengembangan (suburbia) mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibanding dengan kelurahan (*core city*). Luasan lahan terbangun di kawasan pengembangan pada tahun 2000 tercatat 467,63 Ha atau mengalami peningkatan 36,63% sementara untuk kawasan kelurahan hanya mengalami peningkatan 8,60%.

Selanjutnya desa Mungseng tercatat mengalami peningkatan paling tinggi yaitu 163,86% dan terendah desa Walitelon 11,41%. Secara terperinci perubahan/peningkatan areal terbangun di perkotaan Temanggung dapat dilihat pada tabel IV.2. Secara lebih dalam perincian perkembangan areal terbangun, baik menyangkut penggunaan, hubungannya dengan penduduk dan faktor-faktor apa yang mendorong penduduk untuk menetap di kawasan suburbia, maka telah dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap dua desa sampel, yaitu desa Kebonsari dan desa Mudal, yang ditentukan secara acak.

Desa Kebonsari yang terletak di bagian barat kota Temanggung (ke arah Parakan/Wonosobo lewat jalur Bulu) tercatat mengalami kenaikan sebesar 40,13% dan desa Mudal, yang terletak di sebelah selatan kota (menunju kecamatan Tembarak) hanya tercatat 17,09%. Dari luasan 6,99 Ha areal terbangun baru di Kebonsari sebanyak 5 Ha (72%) dibangun untuk perumahan dan sisanya (1,9 Ha) untuk pergudangan tembakau. Di Kebonsari terdapat 3 kompleks perumahan besar yaitu Tawangsari Permai I,

Tawang Sari Permai II dan Perumahan Sukosari Indah. Khusus Perumahan Sukosari Indah dibangun pada awal 1982 dan merupakan salah satu dari 2 kompleks perumahan pertama yang dibangun oleh pengembang (*developer*) melalui fasilitas KPR-BTN.

TABEL IV.2
PERKEMBANGAN LUASAN LAHAN TERBANGUN
PERKOTAAN TEMANGGUNG
TAHUN 1990 – 2000

NO	DESA/KELURAHAN	LUAS (Ha)	LUASAN AREA TERBANGUN (Ha)		r (%)
			1990	2000	
1	2	3	4	5	6
	I. core city (kelurahan)				
1	Kel. Temanggung I	29.86	18.45	20.36	10.35
2	Kel. Temanggung II	67.92	32	34.00	6.25
3	Kel. Jampiroso	56.89	40	40.57	1.43
4	Kel. Butuh	34.49	15.49	20.6	32.99
5	Kel. Banyurip	57.44	20.24	22.04	8.89
6	Kel. Kertosari	152.94	52	56.54	8.73
7	Kel. Jampirejo	216.33	38.27	46.33	21.06
8	Kel. Kowangan	212.09	67.59	68.02	0.64
	Jumlah I	827.96	284.04	308.46	8.60
	II. Kawasan Suburbia (desa)				
9	Ds. Walitclon	362.28	64	71.30	11.41
10	Ds. Sidorejo	188.05	50	60.7	21.40
11	Ds. Kebonsari	89.8	17.42	24.41	40.13
12	Ds. Manding	157.44	13.82	29.27	111.79
13	Ds. Jurang	120.35	20.61	24.04	16.64
14	Ds. Joho	104.08	16.32	18.66	14.34
15	Ds. Tlogorejo	263.04	33.28	38.3	15.08
16	Ds. Madureso	206.56	25	31.5	26.00
17	Ds. Giyanti	77.29	18	30.1	67.22
18	Ds. Mungseng	112.58	31.1	82.06	163.86
19	Ds. Purworejo	121.84	16.71	18.99	13.64
20	Ds. Mudal	253.75	32.71	38.3	17.09
	Jumlah II	2,057.06	338.97	467.63	37.96

Sumber : Profil Kecamatan dan PJM Kota Temanggung ; diolah

Untuk **Desa Mudal** yang mengalami kenaikan areal terbangun 5,59 Ha (17,09%) dipergunakan untuk pemukiman (dibangun sendiri oleh penghuni) pada kapling-kapling siap bangun, sebagian lagi untuk pengembangan kawasan industri yaitu untuk pabrik kemasan air minum '*Total*' yang mengambil sumber air di Pikatan, salah satu kompleks wisata lokal yang paling populer yang terletak dalam wilayah desa Mudal.

Selanjutnya untuk melihat apakah apakah tinggi rendahnya **perkembangan lahan terbangun** ini berkaitan dengan **jarak kawasan** dari pusat kota sebagaimana Tabel IV.3 akan dilakukan pengujian dengan analisa *Korelasi Regresi Linier* . Berdasarkan hasil perhitungan *Korelasi Regresi* diperoleh nilai **R**, sebesar **0,565** artinya antara jarak kawasan dengan perkembangan areal terbangun **berhubungan secara positif**. Sementara nilai *R-square (koefisien determininasi)* menunjukkan angka 0,320, artinya variabel jarak kawasan dari pusat kota memberikan pengaruh terhadap perkembangan areal terbangun sebesar 32%. Dilihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak dapat diketahui dari nilai **F** , yaitu sebesar **4,696**. Angka 6,696 ini bila dibandingkan dengan F tabel pada tarap 5% ternyata lebih besar (4,15) namun lebih kecil dari nilai F tabel pada tarap 1% (7,5). Artinya pada tarap kepercayaan 95%, pengaruh jarak kawasan dengan perkembangan lahan terbangun adalah **signifikan**, atau dapat diartikan bahwa *semakin jauh suatu kawasan/desa dari pusat kota semakin kecil perkembangan lahan terbangunnya* . Demikian pula sebaliknya semakin jauh lokasi/kawasan dari pusat kota akan semakin kecil/sedikit perkembangan lahan terbangunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya lahan terbangun baru di kawasan pinggiran kota Temanggung cenderung akan dibangun pada lahan-lahan yang semakin dekat dengan pusat kota. Kesimpulan ini juga didukung oleh kondisi empirik pada kawasan , dimana lebih dari 72% dari lahan terbangun

adalah berupa perumahan/permukiman, yang memang sampai saat ini belum diterapkan aturan peruntukan 'zoning' pada tata ruang kota yang ada. Artinya warga masyarakat masih diberi kebebasan membangun unit-unit perumahan/pemukiman sesuai dengan kemauan dan konversi kepemilikan lahan masih sepenuhnya berlaku hukum pasar.

TABEL IV.3
HUBUNGAN PERKEMBANGAN LAHAN TERBANGUN
DENGAN JARAK KAWASAN DARI PUSAT KOTA

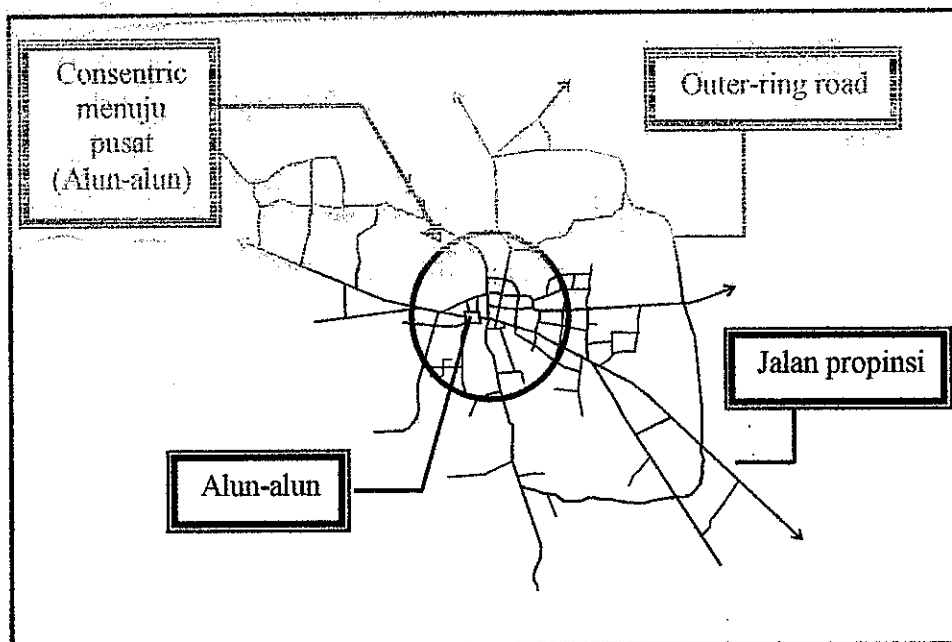
NO	DESA/KAWASAN	PERKEMB. AREA TERBANGUN (Ha)	JARAK (Km)
1	2	3	4
1	Ds. Walitelon	7.30	2.5
2	Ds. Sidorejo	10.70	3
3	Ds. Kebonsari	6.99	3.2
4	Ds. Manding	15.45	2.3
5	Ds. Jurang	3.43	2
6	Ds. Joho	2.34	4.5
7	Ds. Tlogorejo	5.02	3.8
8	Ds. Madureso	6.50	4.2
9	Ds. Giyanti	12.10	1.9
10	Ds. Mungseng	50.96	1.6
11	Ds. Purworejo	2.28	4.3
12	Ds. Mudal	5.59	5.2

Sumber : data diolah

4.1.2 Jaringan Jalan

Sebenarnya pola jaringan jalan di perkotaan Temanggung sudah tertata sejak kemunculan kota tersebut yaitu pada jaman Pemerintah Hindia Belanda. Tidak ada yang mengetahui secara persis kapan kota Temanggung ada. Namun dipercaya bahwa kota Temanggung diperkirakan lahir bersamaan dengan lahirnya Kabupaten Temanggung yang sebelumnya bernama Kabupaten Menoreh, yaitu pada tanggal 10 Nopember 1834. Kota Temanggung dan juga kota kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai pola

struktur kota yang berpusat di alun-alun. Di sekitar alun terdapat jalan-jalan nomor satu, yang bersifat '*concentric*' menuju ke pusat (alun-alun) . Disampingnya berdiri rumah-rumah para pemimpin kabupaten (dulu '*pangreh praja*') seperti Pendopo Bupati, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, Kantor dan Rumah dinas Kejaksaan, dan Rumah Tahanan (Rutan). Di luar pusat tersebut terdapat jalan kelas 2 dan juga rumah/perkampungan penduduk .



Sumber : RUTRK Kota Temanggung

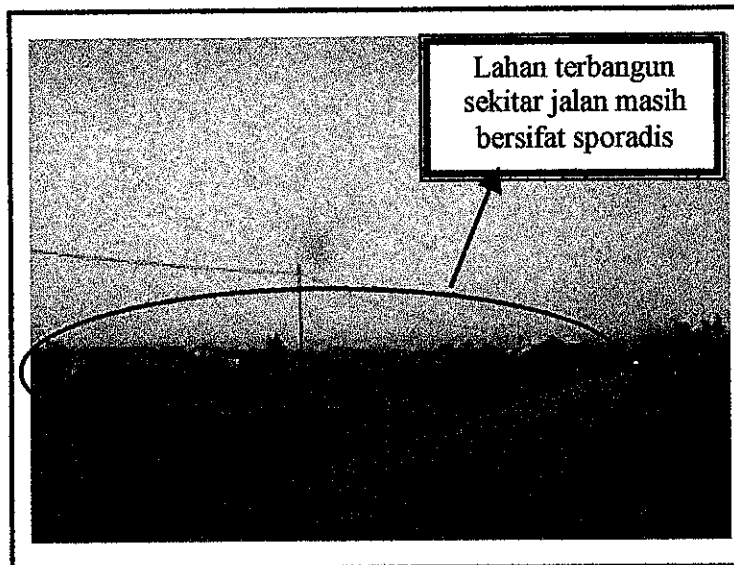
GAMBAR 4.2
POLA JARINGAN JALAN PERKOTAAN
TEMANGGUNG

Untuk menuju pusat kota (alun-alun) , terdapat jalan 2 atau 3 ruas jalan besar yang menghubungkan kota tersebut dengan kota-kota lain. Sebagaimana terlihat pada gambar 4.1 pada awalnya pola jaringan jalan di kota Temanggung cenderung membentuk pola jalan Radial Konsentrik (*Radial Concentric System*) , yang ditandai dengan adanya

jaringan jalan 'konsentrik' menuju pusat yaitu alun-alun sebagai pusat kegiatan utama dan pusat pengendalian pemerintahan.

Selanjutnya jaringan jalan cenderung mulai tidak teratur (*irregular system*) sejak disediakannya 'kapling-kapling' tanah yang siap bangun di kawasan pinggiran yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah pada era akhir tahun 70-an. Peningkatan jaringan jalan mencapai puncaknya pada pertengahan dekade 90-an, yaitu ketika dilaksanakannya Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) yang mendapat sponsor dari Asean Development Bank (ADB). Pada saat itu banyak dibuka dan ditingkatnya status jalan dari jalan desa menjadi jalan kabupaten, termasuk pembangunan jalan lingkaran kota (*ring road*) yang melawati beberapa desa kawasan suburbia.

Pembangunan jalan lingkaran di kota Temanggung (meskipun sampai saat ini baru terealisasi $\frac{1}{2}$ lingkaran kota), namun dampaknya terhadap perkembangan kenampakan fisik kota (*urban sprawl*) kelihatan sangat tinggi. Sejak dibangun jalan lingkaran serta dilengkapi fasilitas berupa jalur transportasi bus antar kota dan angkota sendiri, maka bermunculah berbagai unit hunia/perumahan penduduk kota, baik yang dibangun oleh developer maupun yang dibangun oleh perorangan dengan konsumsi sendiri. Meskipun masih terlihat sangat sporadis (lihat gambar 4.3) dibanding dengan ketersediaan lahan disekitar jalan, namun indikasi kearah perkembangan lahan terbangun di sekitar jaringan jalan lingkaran tersebut semakin besar.



Sumber : data primer

GAMBAR 4.3
LAHAN TERBANGUN BARU PADA JALAN LINGKAR

Selanjutnya untuk membuktikan adanya pengaruh **perkembangan jaringan jalan/transpotasi** terhadap **perkembangan morfologi kota** , akan dilakukan dengan *uji Chi-Quadrat*. Uji ini mendasarkan pada asumsi bahwa *tinggi rendahnya perkembangan kenampakan fisik kota/kawasan terbangun (built up area) dipengaruhi oleh ada/tidaknya pembangunan jaringan jalan/sarana transpotasi baru yang melewati daerah/kawasan yang bersangkutan selama kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu 1990 – 2000.*

Satu satu fakta yang dapat dipakai untuk mendukung adanya variasi morfologi (kenampakan fisik kota) adalah kerapatan bangunan sebagaimana terpampang dalam gambar 4.4. Gambar A menunjukkan kerapatan bangunan padat (ada di kawasan kota utama) , gambar B kepadatan sedang yang berada di kawasan suburbia dengan jalur transpotasi utama (sangat lancar) sedangkan gambar C , kerapatan bangunan rendah yang berada di kawasan suburbia dengan transpotasi yang relatif kurang dibanding dengan di kawasan B.



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2002

KAJIAN PERTUMBUHAN
KAWASAN SUBURBIA SEBAGAI DASAR
MANAJEMEN PEMBANGUNAN KOTA
DI PERKOTAAN TEMANGGUNG

GAMBAR KERAPATAN BANGUNAN
BAGIAN KOTA

LEGENDA :

- · - · - : Batas Kota
- — — : Jalan kota
- — — : Jalan propinsi

A B C

: KERAPATAN BANGUNAN PADAT
(kawasan kota utama)

: KERAPATAN BANGUNAN SEDANG
(kawasan jalur jalan propinsi ke
arah luar)

: KEPADATAN BANGUNAN RENDAH
(kawasan jalur kabupaten ke arah
luar)

SUMBER

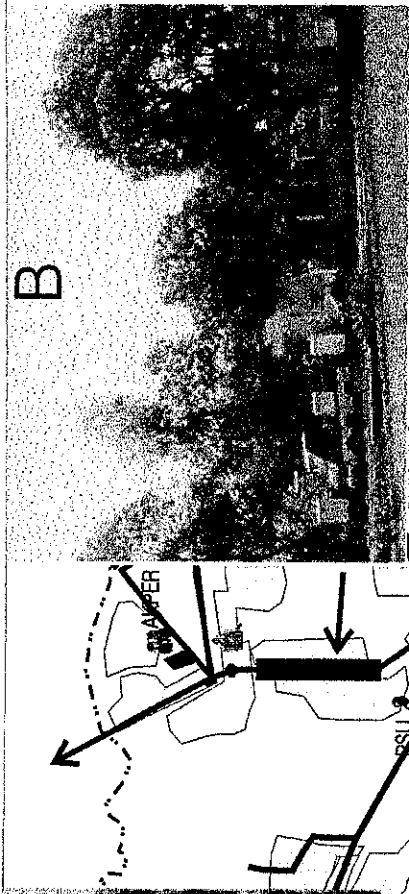
Data primer

No. Gambar

SKALA



4.4



UPT-PUSTAK-HINDIP

Kemudian dari pengolahan data terhadap perkembangan lahan/area terbangun dengan menggunakan distribusi frekwensi, ditentukan 3 (tiga) kategori/klasifikasi kawasan, yaitu :

- A. *Kategori rendah* untuk kawasan/desa dengan perkembangan dibawah 5,02 Ha;
- B. *Kategori sedang* untuk kawasan/desa dengan perkembangan antara 5,03 – 7,30 Ha, dan
- C. *Kategori tinggi* untuk kawasan/desa dengan perkembangan lebih dari 7,31 Ha.

Hasil identifikasi dan pengklasifikasian lahan terbangun masing-masing desa pada kawasan suburbia dan hubungannya dengan ada tidaknya perkembangan atau penambahan jaringan jalan/transpotasi dapat dilihat pada tabel IV.4.

TABEL IV.4
DESА/KAWASAN TERBANGUN
DITINJAU DARI KATEGORI PERKEMBANGAN
DAN JARINGAN JALAN

NO	DESА/KAWASAN	PERKEMB. AREA TERBANGUN	KATEGORI	JARINGAN JALAN/TRANSPOTASI
1	2	3		4
1	Ds. Walitlon	7.30	sedang	ada
2	Ds. Sidorejo	10.70	tinggi	ada
3	Ds. Kebonsari	6.99	sedang	tidak ada
4	Ds. Manding	15.45	tinggi	tidak ada
5	Ds. Jurang	3.43	rendah	ada
6	Ds. Joho	2.34	rendah	ada
7	Ds. Tlogorejo	5.02	rendah	ada
8	Ds. Madureso	6.50	sedang	Ada
9	Ds. Giyanti	12.10	tinggi	Ada
10	Ds. Mungseng	50.96	Tinggi	tidak ada
11	Ds. Purworejo	2.28	Rendah	tidak ada
12	Ds. Mudal	5.59	Sedang	ada

Sumber : pengolahan data

Hasil tabulasi silang antara dua variabel adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL IV.5
TABULASI SILANG HUBUNGAN ANTARA
PERKEMBANGAN AREA TERBANGUN DENGAN
JARINGAN JALAN/TRANSPOTASI

		Ada	Tdk	
AREA	rendah	3	2	5
	sedang	1	2	3
	tinggi	3	1	4
Total		7	5	12

Sumber : data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan *Chi-square test* (X^2) diperoleh nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,021, ternyata lebih besar jika dibandingkan dengan tarap signifikansi 0,05 (tarap kepercayaan 95%). Oleh karena dapat dikatakan bahwa **ada pengaruh yang positif** antara *penambahan jaringan jalan dengan perkembangan lahan terbangun* selama 10 tahun terakhir. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa jika dalam suatu kawasan/desa dibangun jaringan jalan baru, atau peningkatan fungsi maupun status jalan (misalnya dari jalan tanah menjadi jalan aspal, atau beralih fungsi dari jalan kolektor menjadi jalan primer), maka pada kawasan tersebut cenderung akan bertambah lahan terbangunya.

4.1.3 Pola Sebaran Kenampaan Fisik Kota

Dalam konteks kajian pola sebaran kenamaan fisik kota ini diartikan sebagai **sebaran lahan terbangun**. Terdapat 2 (dua) pendekatan utama untuk menganalisis aspek morfologi ditinjau dari pola sebaran kenampakan fisik kekotaan ini. Dengan pendekatan

"*Fixation Line Concept*" , dimana fokus utama pengamatan dan analisa pada titik terbangun, terlihat bahwa morfologi kota dapat dilihat dari kenampakan fisik kekotaan (*townscapes*) yang masih berada di dalam batas administrasi kota. Namun sebagaimana terlihat pada gambar 4.5 terlihat titik-titik terbangun maupun permukiman baru tidak berkembang ke arah timur, dikarenakan terdapat Sungai Progo yang sekaligus sebagai batas perkotaan, dengan wilayah kecamatan lain yaitu Kranggan.

- A. Dilihat dari pendekatan ini pola sebaran kenampakan fisik kekotaan pada penelitian ini, untuk perkotaan Temanggung cenderung lebih kepada *Over Bounded City*, yaitu sebaran kenampakan fisik kekotaan yang masih berada dalam batas administrasi kota.

Pendekatan kedua adalah pendekatan "*urban sprawl*". Seperti telah diketahui bahwa semakin bertambahnya penduduk perkotaan dan semakin kompleksnya kegiatan penduduk telah mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ruang kekotaan sampai di daerah pinggiran kota. Gejala 'pengalihan' lahan non urban menjadi urban di daerah pinggiran ini disebut '*invation*' atau proses *perembetan/pertumbuhan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar*. Proses ini dalam pengetahuan perkotaan lebih populer disebut '*urban sprawl*'.

Untuk menentukan apakah pola persebaran areal terbangun termasuk konsentris dengan sifat *mengelompok dan teratur*, atau meloncat (acak menyebar) ataukah memanjang (seragam menyebar), akan dilakukan dengan **Analisa Tetangga-Terdekat** (*Nearest-neighbour Analysis*). Analisa ini memerlukan data tentang jarak antara satu area terbangun dengan area terbangun lain yang terdekat. Oleh karena itu

setiap kawasan/area terbangun pada wilayah yang diselidiki akan dianggap sebagai satu titik dalam ruang.

Sehubungan dengan keperluan analisa ini, karena fokus penelitian ini adalah tentang masalah pertumbuhan kenampakan fisik kota, maka yang dimaksud dengan area terbangun adalah area terbangun yang **tumbuh baru** sebagai akibat dari bertambahnya kegiatan kota. Berdasarkan identifikasi di lapangan dan data yang tersedia, kiranya area pemukiman/perumahan baru dapat mewakili area terbangun tersebut. Oleh karena itu yang diidentifikasi sebagai titik dalam ruang adalah letak/lokasi masing-masing perumahan (kompleks pemukiman) yang berada dalam wilayah perkotaan Temanggung.



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2002

KAJIAN PERTUMBUHAN
KAWASAN SUBURBIA
SEBAGAI DASAR
MANAJEMEN PEMBANGUNAN KOTA
DI PERKOTAAN TEMANGGUNG

POLA SEBARAN AREA TERBANGUN
MELONCAT/ACAK (Leap Frog development)
MASIH DALAM BATAS ADMINISTRASI
(Over Bounded city)

LEGENDA :

- : Batas kota
- : Jalan kota
- : Jalan propinsi
- : permukiman desa eksisting
- : sebaran area terbangun baru (perumahan, pergudangan sekolah, industri)
- : area terbangun kota utama (permukiman, perdagangan campuran)

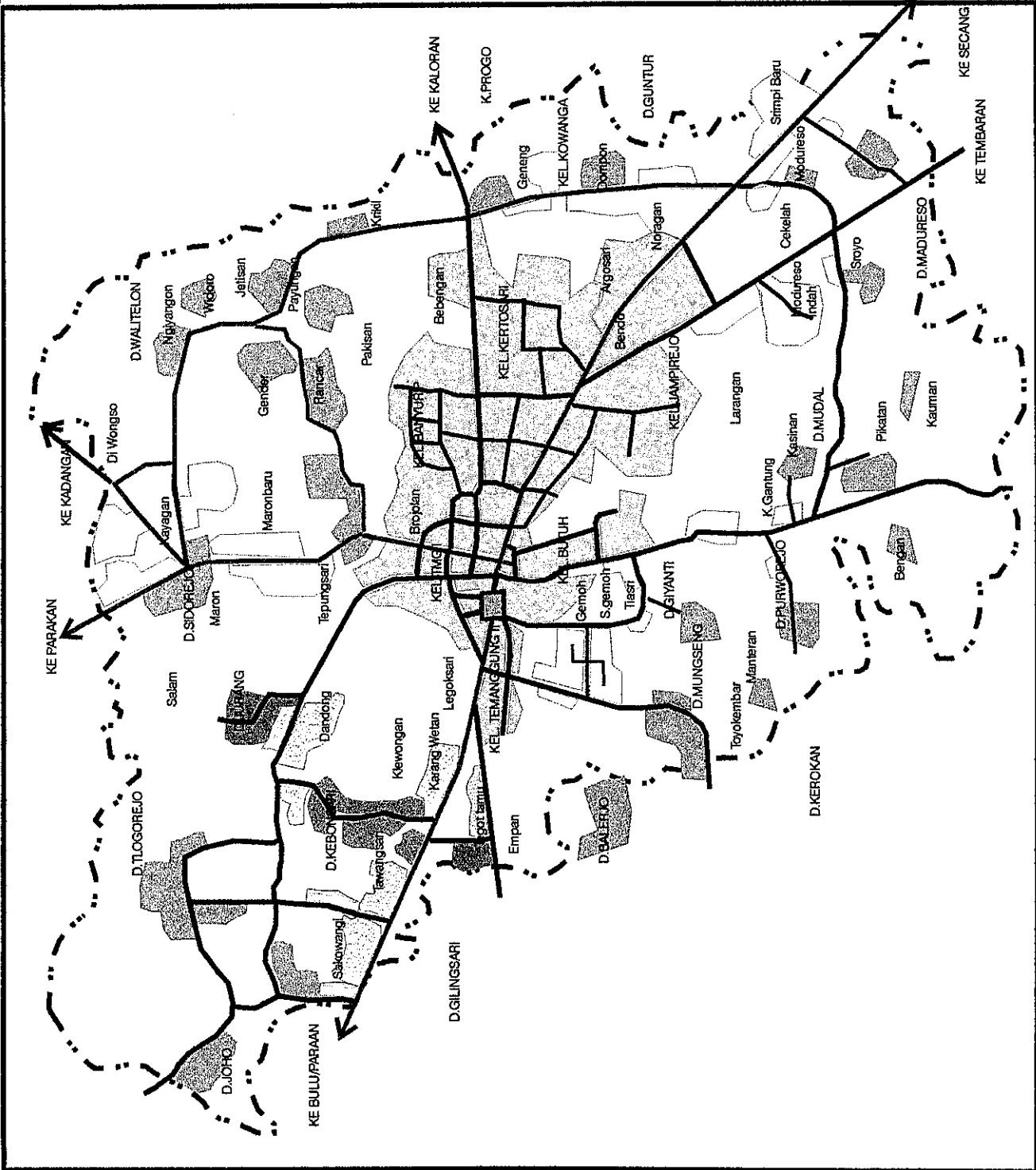
SUMBER

ANALISA DATA

No. Gambat

4.5

SKALA



Selanjutnya dari formula '*nearest-neighbour analisis*' yaitu :

$$T = \frac{J_u}{J_h}$$

Keterangan :

T = indeks persebaran

J_u = jarak rata-rata yang diukur antara satu titik tetangganya yang terdekat

J_h = jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik

mempunyai pola random. $J_h = 1/2\sqrt{p}$ dimana p adalah kepadatan titik dalam tiap kilometer persegi, yaitu jumlah titik (N) dibagi dengan luas wilayah yang diselidiki, sehingga menjadi N/A.

Berdasarkan hasil dan olahan data, sebagaimana tertuang dalam gambar nomor IV.2, **diketahui** sebagai berikut :

ΣN ; jumlah kompleks pemukiman = 23 unit/titik

ΣJ ; total jarak antara titik pemukiman = 10,5 Km

maka J_u ; jarak rata-rata = $\Sigma N / \Sigma J = 10,5 / 23 = 0,46$ Km

A; luas wilayah = 28,85 km²

P; kepadatan = $\Sigma N / A = 23 / 28,85 = 0,81$

$J_h = 1/2\sqrt{P} = 1/2 \cdot 0,9 = 1/1,8 = 0,56$

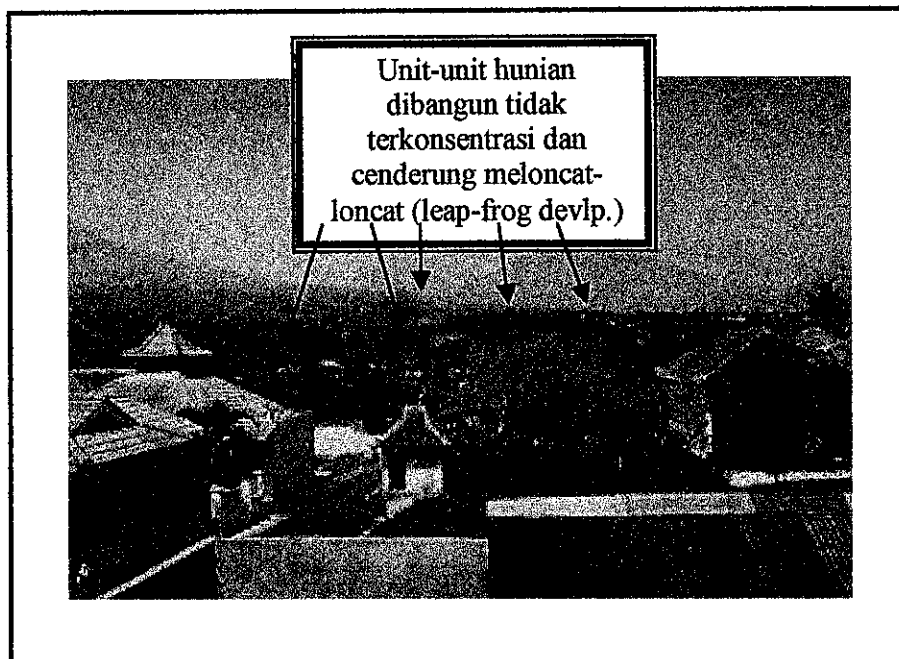
Sehingga $T = J_u / J_h = 0,46 / 0,56 = 0,82$

Dari perhitungan tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai T (*parameter/indeks analisa Tetangga-terdekat*) untuk pertumbuhan area terbangun di perkotaan Temanggung adalah **0,82**.

Dengan memperhatikan **kontinum nilai T**, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pola persebaran kenampakan fisik kota di Temanggung adalah **'mendekati random'**. (nilai kontinum T untuk random sempurna adalah 1).

Dengan kategori mendekati random ini, berarti pola persebaran lahan terbangun di perkotaan Temanggung perlu diwaspadai, karena pada dasarnya pola yang random (*meloncat dan tidak teratur*) cenderung sulit ditata, khususnya berkaitan dengan ekspresi keruangan kotanya, dan adanya kecenderungan spekulasi harga-harga tanah serta pengalihan lahan non urban menjadi urban yang cenderung sulit dikendalikan.

Selanjutnya ke-*random*-an titik-titik dalam ruang perkotaan yang sebagian besar berupa unit-unit hunian/perumahan tersebut, dapat dilihat pada salah satu sisi kawasan suburbia sebagaimana tertera pada gambar berikut.



Sumber : data primer

GAMBAR 4.6
KENAMPAKAN LAHAN TERBANGUN
PADA KAWASAN SUBURBIA (BERSIFAT SPORADIS/MELONCAT)

4.2 Kajian Aspek Demografi dan Sosial Ekonomi

Untuk mengkaji aspek sosial ekonomi perkotaan akan dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, nilai ekonomi lahan dan indikator pajak. Beberapa indikator selanjutnya akan dihubungkan dengan indikator lainnya untuk mencari faktor pengaruh atau adanya hubungan korelasi.

4.2.1 Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2000 penduduk perkotaan Temanggung berjumlah 64.587 orang, terdiri dari 32.517 orang (50,35%) tinggal di 8 wilayah kelurahan dan 32.070 orang (49,65%) tinggal di 12 desa kawasan pinggiran/suburbia. Untuk kawasan suburbia Desa Walitelon yang wilayahnya paling luas juga berpenduduk paling banyak yaitu 5.107 orang, dan yang berpenduduk paling kecil adalah desa Joho, yaitu 951 orang.

Pertumbuhan penduduk perkotaan Temanggung selama 10 tahun terakhir (1990 – 2000), tercatat 1,36%. Jika dibedakan menurut kawasan, kota utama tumbuh sangat lambat yaitu 0,21 per tahun. Bahkan beberapa kelurahan mengalami pertumbuhan minus, seperti pada Kelurahan Temanggung II (-2,27) dan Kelurahan Jampiroso minus 1,11%. Sedangkan untuk kawasan suburbia pertumbuhan penduduknya relatif besar yaitu 2,57%, dengan pertumbuhan tertinggi yaitu desa Kebonsari yaitu 6,10% dan paling sedikit desa Tlogorejo (0,32%). Perincian jumlah dan pertumbuhan penduduk masing-masing kelurahan/desa di perkotaan Temanggung secara lengkap disajikan pada tabel IV.6.

TABEL IV.6
JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK
PERKOTAAN TEMANGGUNG 1990 – 2000

NO	KAWASAN	JUMLAH PENDUDUK			r/th
		1990	1995	2000	
1	2	3	4	6	7
	Core city/kelurahan				
1	Kel. Temanggung I	4,466	4,587	4,592	0.28
2	Kel. Temanggung II	5,609	4,397	4,348	(2.27)
3	Kel. Jampiroso	4,865	4,268	4,320	(1.11)
4	Kel. Butuh	3,384	3,681	3,628	0.73
5	Kel. Banyurip	3,699	3,809	3,774	0.21
6	Kel. Kertosari	3,978	4,541	4,599	1.56
7	Kel. Jampirejo	3,826	4,240	4,264	1.14
8	Kel. Kowangan	2,585	2,828	2,992	1.52
	<i>Jumlah I</i>	<i>32,412</i>	<i>32,351</i>	<i>32,517</i>	<i>0.21</i>
	Kawasan suburbia/Desa				
1	Ds. Walitelon	4,191	4,962	5,107	2.13
2	Ds. Sidorejo	3,046	3,189	3,221	0.57
3	Ds. Kebonsari	1,150	1,779	1,892	6.10
4	Ds. Manding	1,774	2,622	2,669	4.96
5	Ds. Jurang	1,480	1,935	2,051	3.67
6	Ds. Joho	841	885	951	1.27
7	Ds. Tlogorejo	2,398	2,411	2,474	0.32
8	Ds. Madureso	2,219	2,948	3,073	3.71
9	Ds. Giyanti	1,521	2,116	2,277	4.67
10	Ds. Mungseng	2,283	2,770	2,878	2.52
11	Ds. Purworejo	1,232	1,727	1,815	4.53
12	Ds. Mudal	2,888	3,501	3,662	2.58
	<i>Jumlah II</i>	<i>25,023</i>	<i>30,845</i>	<i>32,070</i>	<i>2.57</i>
	Jumlah I dan II	57,435	63,196	64,587	1.36

Sumber : Profil kecamatan, RUTRK ; diolah.

Penelitian yang lebih mendalam terhadap desa sampel yaitu Desa Kebonsari dan Desa Mudal, menunjukkan bahwa faktor penduduk pendatang merupakan parameter tingginya angka pertumbuhan di kawasan tersebut, disamping pertumbuhan alami yaitu kelahiran. Desa Kebonsari dengan jumlah absolut pertambahan penduduk sebanyak 100 orang/jiwa (lahir dan datang) pada tahun 2000, sebanyak 76 orang (76%) merupakan

penduduk pendatang yang pindah dari desa/kelurahan , kota maupun kabupaten lain. Selanjutnya jumlah kelahiran sebanyak 24 orang kelahiran, meninggal 10 orang dan pergi/pindah ke luar desa sebanyak 19 orang. Menurut informasi dari Kepala Desa Kebonsari penduduk pendatang tertinggi terjadi pada kurun waktu 1995 – 1997, yaitu setelah di wilayah desa tersebut dibangun 2 kompleks perumahan oleh sebuah perusahaan pengembang dengan fasilitas kredit KPR/BTN. Sementara untuk Desa Mudal yang tidak ada perumahan, menunjukkan fakta yang berbeda, yaitu dari tambahan 113 orang (lahir dan datang), pendatangnya hanya 21 (18,58%), selebihnya adalah kelahiran.

TABEL IV.7
MUTASI PENDUDUK PERKOTAAN TEMANGGUNG
PADA DESA SAMPEL TAHUN 2000

NO	DESA	JML. MUTASI	LAHIR	MATI	DATANG	PERGI	PERT. PENDUDUK
1	KEBONSARI	129	24	10	76	19	71
2	MUDAL	143	92	21	21	9	83

Sumber : laporan mutasi kependudukan desa; diolah

Dengan mendasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa penambahan penduduk di suatu desa/kawasan yang pertama ditentukan oleh adanya faktor penyediaan perumahan yang dibangun oleh 'developer' atau adanya kapling tanah-tanah yang siap bangun (Kasiba) , baik oleh perusahaan maupun perseorangan.

Selanjutnya dalam kajian ini akan dibuktikan apakah ada/tidaknya unit hunian/perumahan benar-benar akan mempengaruhi penambahan penduduk suatu kawasan. Dalam hal ini untuk peubah (variabel) hunian/perumahan, akan dilihat dari banyaknya unit rumah yang disediakan menurut desa/kawasan, dengan pertimbangan ; *pertama* , masih relatif sedikitnya kompleks perumahan yang dibangun, sehingga

seandainya satu desa hanya ada 1 kompleks hunian, maka berarti variannya bersifat tunggal dan secara statistik tidak 'visible' untuk melihat korelasional-nya dengan 'peubah tergantung'. *Kedua* ; Masalah ketersediaan data, yaitu jumlah unit rumah yang dibangun oleh masing-masing kompleks perumahan, sedangkan untuk data tentang jumlah kapling baik yang sudah dibangun maupun yang siap bangun tidak tersedia. Secara matrik hubungan antara jumlah penyediaan unit rumah dengan penambahan penduduk dan pertumbuhan lahan terbangun, masing-masing desa pada kawasan Suburbia dapat dilihat pada Tabel IV.8 berikut ini.

TABEL IV.8
HUBUNGAN JUMLAH PERUMAHAN
DENGAN PERTUMBUHAN PENDUDUK
DAN PERTUMBUHAN LAHAN TERBANGUN TAHUN 1990 – 2000

NO	DESA/ KAWASAN	JUMLAH RUMAH YANG DISEDIAKAN PENGEMBANG (unit)	PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK (Orang)	PERTUMBUHAN AREAL TERBANGUN (Ha)
1	2	3	4	5
1	Walitelon	0.00	916.00	7.30
2	Sidorejo	358.00	175.00	10.70
3	Kebonsari	249.00	742.00	6.99
4	Manding	86.00	895.00	15.45
5	Jurang	230.00	571.00	3.43
6	Joho	115.00	110.00	2.34
7	Tlogorejo	0.00	76.00	5.02
8	Madureso	25.00	854.00	6.50
9	Giyanti	0.00	756.00	12.10
10	Mungseng	0.00	595.00	50.96
11	Purworejo	0.00	583.00	2.28
12	Mudal	0.00	774.00	5.59
	Jumlah -	1,063.00	7,047.00	128.66

Sumber : Developer, profil kecamatan ; diolah

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa total rumah yang disediakan oleh perusahaan pengembang selama 10 tahun terakhir (periode 1990 – 2000) adalah **1.063 unit**

rumah. Untuk mengevaluasi ketersediaan unit hunian pada kawasan suburbia dihubungkan dengan penambahan jumlah penduduk, dicari dengan membandingkan dengan standart kebutuhan rumah yang ada. Jika dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi penambahan penduduk pada kawasan Suburbia sebanyak 7.047 orang, dan standart kebutuhan setiap 4 orang membutuhkan 1 unit rumah, maka kebutuhan perumahan di kawasan suburbia Temanggung adalah sebanyak 1.761 unit. Sehingga dengan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa **penyediaan perumahan** pada perkotaan Temanggung baru **mencapai 60,36%** dari kebutuhan rumah yang seharusnya.

Selanjutnya untuk melihat apakah penambahan penduduk dipengaruhi oleh penyediaan unit hunian/perumahan dilakukan dengan *Analisa Regresi*. Hasil perhitungan dengan analisa *Regresi Linier* antara penyediaan rumah oleh perusahaan pengembang dengan pertumbuhan penduduk, diperoleh nilai $R = 0,323$ artinya memang terjadi hubungan yang positif antara dua variabel dengan nilai *koefisien determinasi* sebesar 0,104. Namun ternyata hubungan ini tidak cukup signifikan, karena terbukti nilai *Sig.F Change*-nya 0,306 artinya lebih besar dari *tarap signifikansi* 0,05. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab pertumbuhan penduduk lebih besar pada seluruh kawasan adalah pembangunan hunian/rumah-rumah baru pada kapling-kapling yang sifatnya sangat sporadis namun dimungkinkan lebih banyak dari pada jumlah rumah yang disediakan oleh pengembang. (lihat pada Tabel IV.8 bahwa separo dari desa yang ada ternyata tidak ada komplek perumahan, namun perkembangan penduduknya relatif banyak).

Selanjutnya antara penyediaan rumah dengan pertumbuhan lahan terbangun, melalui *Uji-Regresi* ditemukan nilai $R = 0,180$ dan nilai *signifikansinya* 0,030 (lebih kecil dari

0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat *pengaruh yang signifikan*, antara penyediaan rumah oleh perusahaan pengembang dengan perkembangan lahan terbangun. Dengan kata lain semakin banyak unit-unit hunian/perumahan yang dibangun oleh pengembang secara signifikan akan mempengaruhi besaran perkembangan lahan terbangun pada kawasan Suburbia.

4.2.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk suatu wilayah dapat menunjukkan suatu besaran tentang kapasitas ruang perkotaan dalam menampung penduduk dan kegiatannya. Kepadatan lazimnya diukur terhadap luasan wilayah secara keseluruhan (kepadatan bruto), karena hal ini disamping menunjukkan bahwa wilayah sebagai universalitas ruang bagi penduduk, juga mengandung pengertian bahwa kapasitas daya tampung ruang mengisaratkan untuk keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh penduduk, bukan hanya terbatas pada ruang terbangun.

Berdasarkan analisa data sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.9, kepadatan penduduk perkotaan Temanggung pada tahun 2000 adalah 22 orang/Ha atau 2.200 jiwa/Km². Angka ini menunjukkan kenaikan kepadatan (lebih padat) dari tahun 1990 sebesar 12,45%. Untuk kawasan 'kota utama' yang terdiri dari 8 kelurahan, kepadatannya mencapai 39 jiwa/Ha, namun beberapa kelurahan mengalami pertumbuhan kepadatan minus (penurunan), seperti terjadi di Kelurahan Temanggung II, minus 22,48% dan Jampiroso minus 11,20%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah penduduk pada kedua wilayah tersebut.

Selanjutnya berdasarkan penjarangan data primer dari 30 responden penduduk kawasan suburbia yang diambil secara acak didapat informasi bahwa yang paling menjadi alasan (pendorong) mereka tinggal di kawasan suburbia, baik di kompleks perumahan yang dibangun pengembang maupun unit-unit hunian yang dibangun diatas kapling (kasiba), adalah mencari tempat tinggal/hunian yang masih segar dan alami (46,67%) disusul kemudian faktor lingkungan sosial yang dinilai lebih cocok (23,33%), baru kemudian faktor kemudahan transportasi (20%), mendekati tempat kerja (6,67%) dan karena alasan adanya kredit KPR/BTN hanya 1 orang (3,3%).

Secara lengkap rincian pilihan responden terhadap alasan bertempat tinggal di kawasan suburbia adalah sebagai berikut :

TABEL IV.8a
ALASAN BERTEMPAT TINGGAL
DI KAWASAN SUBURBIA

NO	ALASAN BERTEMPAT TINGGAL	JUMLAH YG MEMILIH	%
1	Warisan (sejak kecil tinggal disini)	0	0
2	Mencari tempat tinggal/hunian yang segar/ alami	14	46,67
3	Adanya kredit KPR/BTN	1	3,33
4	Mendekati tempat kerja	2	6,67
5	Sewa tanah dan rumah relatif lebih murah	0	0
6	Ikut-ikutan teman/Saudara	0	0
8	Transportasinya mudah	6	20
9	Lingkungan sosialnya lebih cocok	7	23,23
10	Harga tanah/rumah lebih murah	0	0
	Jumlah N	30	

Sumber : data primer

Selanjutnya dari responden, diketahui bahwa penduduk kawasan suburbia yang tinggal pada unit-unit hunian baru tersebut sebanyak 66,67% berasal dari kampung/lingkungan atau kelurahan dalam kota. Kemudian yang berasal dari kota-kota atau wilayah kabupaten lain sebanyak 26,67 dan selebihnya 6,6% berasal dari kawasan/desa atau kecamatan lain tetapi masih dalam wilayah kabupaten Temanggung.

Dari fakta tersebut dapat dikatakan bahwa penduduk yang bertempat tinggal di kawasan suburbia, sebagian besar awalnya adalah penduduk kota utama, kemudian ingin mencari tempat tinggal baru diluar kota yang dinilai sebagai tempat hunian segar/alami serta dinilai cocok lingkungan sosialnya. Dari beberapa wawancara yang mendalam, kenapa di kawasan suburbia dinilai cocok lingkungan sosialnya, dikarenakan heterogenitas masyarakat di kawasan suburbia relatif tidak tinggi, terutama dilihat dari profesi ataupun mata pencaharian. Lingkungan sosial di kawasan suburbia juga dinilai cocok, dihubungkan dengan perkembangan anak-anak dan masa depan mereka. Faktor/alasan cocok lingkungan sosialnya ini lebih dominan dinyatakan oleh responden yang diidentifikasi menghuni kompleks perumahan, karena dari 7 orang yang memilih alasan ini, ternyata seluruhnya adalah penghuni kompleks perumahan.

Hal ini berbeda dengan kondisi di dalam kota yang terdiri dari berbagai macam dan jenis pekerjaan dan pendidikan, yang menurut mereka relatif sulit diajak 'rembugan' (musyawarah) dalam membahas kepentingan tertentu yang berhubungan dengan lingkungan, seperti pada forum-forum ke-RTan dan lain-lainnya. Disamping itu dengan keberagaman pekerjaan, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga dapat menyebabkan perkembangan anak-anak dapat terpengaruh pergaulan yang menjurus pada kenakalan seperti perkelahian, mabuk, perjudian dan lain-lainnya.

Pada kawasan Suburbia kondisinya berbeda, meskipun pertumbuhan penduduknya lebih tinggi, namun tingkat kepadatannya tetap masih lebih rendah dibanding dengan kawasan 'kota utama'. Kepadatan seluruh kawasan adalah 16 jiwa/Ha atau 1.600 jiwa/Km² dan mengalami peningkatan kepadatan sebesar 28,16% dibanding tahun 1990 yang lalu. Penduduk terpadat adalah desa Giyanti (29 jiwa/Ha) kemudian disusul desa Mungseng (26 jiwa/Ha) dan desa Kebonsari (21 jiwa/Ha). Jika dilihat dari perkembangan kepadatan penduduk, desa Kebonsari tertinggi (64,52%), desa Manding (50,45%) dan desa Giyanti (49,70%). Sementara untuk desa paling tidak padat adalah Desa Joho dan desa Tlogorejo, masing-masing dengan 9 jiwa/Km².

TABEL IV.9
KEPADATAN PENDUDUK PERKOTAAN TEMANGGUNG
TAHUN 1990 – 2000

NO	DESA/KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH PENDUDUK /KEPADATAN				r (%)
			1990	Jiwa/Ha	2000	Jiwa/Ha	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kelurahan (core city)						
1	Kel. Temanggung I	29.86	4,466	150	4,592	154	2.82
2	Kel. Temanggung II	67.92	5,609	83	4,348	64	(22.48)
3	Kel. Jampiroso	56.89	4,865	86	4,320	76	(11.20)
4	Kel. Butuh	34.49	3,384	98	3,628	105	7.21
5	Kel. Banyurip	57.44	3,699	64	3,774	66	2.03
6	Kel. Kertosari	152.94	3,978	26	4,599	30	15.61
7	Kel. Jampirejo	216.33	3,826	18	4,264	20	11.45
8	Kel. Kowangan	212.09	2,585	12	2,992	14	15.74
	<i>Jumlah I</i>	827.96	32,412	39	32,517	39	0.32
	Desa kawasan suburbia						
1	Ds. Walitelon	362.28	4,191	12	5,107	14	21.86
2	Ds. Sidorejo	188.05	3,046	16	3,221	17	5.75
3	Ds. Kebonsari	89.8	1,150	13	1,892	21	64.52
4	Ds. Manding	157.44	1,774	11	2,669	17	50.45
5	Ds. Jurang	120.35	1,480	12	2,051	17	38.58
6	Ds. Joho	104.08	841	8	951	9	13.08
7	Ds. Tlogorejo	263.04	2,398	9	2,474	9	3.17
8	Ds. Madureso	206.56	2,219	11	3,073	15	38.49
9	Ds. Giyanti	77.29	1,521	20	2,277	29	49.70

10	Ds. Mungseng	112.58	2,283	20	2,878	26	26.06
11	Ds. Purworejo	121.84	1,232	10	1,815	15	47.32
12	Ds. Mudal	253.75	2,888	11	3,662	14	26.80
	<i>Jumlah II</i>	<i>2,057.06</i>	<i>25,023</i>	<i>12</i>	<i>32,070</i>	<i>16</i>	<i>28.16</i>
	Jumlah I dan II	2,885.02	57,435	20	64,587	22	12.45

Sumber : profil kecamatan ; diolah

4.2.1 Tingkat Pendidikan

Berikut ini disajikan data tentang tingkat pendidikan penduduk perkotaan Temanggung pada tahun 2000.

TABEL IV.10
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK PERKOTAAN TEMANGGUNG
TAHUN 2000

NO	DESA/KELURAHAN	Jumlah Penduduk	Tingkat pendidikan				SD & belum tamat	Tdk./belum Sekolah
			S-1/D-IV	Akademik	SLTA	SLTP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kota utama							
1	Kel. Temanggung I	4,592	44	32	683	705	2477	378
2	Kel. Temanggung II	4,348	178	181	687	780	1708	294
3	Kel. Jampirosa	4,320	51	20	421	516	2485	417
4	Kel. Butuh	3,628	68	17	268	574	1800	607
5	Kel. Banyurip	3,774	159	149	1235	1,227	605	103
6	Kel. Kertosari	4,599	31	53	765	1,206	1805	267
7	Kel. Jampirejo	4,264	113	162	619	753	1788	290
8	Kel. Kowangan	2,992	23	53	359	307	1834	196
	<i>Jumlah I</i>	<i>32,517</i>	<i>667</i>	<i>667</i>	<i>5,037</i>	<i>6,068</i>	<i>14,502</i>	<i>2,552</i>
	Desa/kawasan suburbia							
1	Ds. Walitelon	5,107	72	34	621.00	380	2820	685
2	Ds. Sidorejo	3,221	102	26	834	468	1302	273
3	Ds. Kebonsari	1,892	26	38	286	164	969	255
4	Ds. Manding	2,669	37	24	285	383	1616	35
5	Ds. Jurang	2,051	40	40	300	250	972	260
6	Ds. Joho	951	3	2	66	70	613	116
7	Ds. Tlogorejo	2,474	29	5	341	473	1109	277
8	Ds. Madureso	3,073	83	41	259	197	1826	337
9	Ds. Giyanti	2,277	82	48	495	406	949	148
10	Ds. Mungseng	2,878	53	79	322	418	1577	179
11	Ds. Purworejo	1,815	4	8	128	164	1079	339
12	Ds. Mudal	3,662	5	8	161	354	2292	630
	<i>Jumlah II</i>	<i>32,070</i>	<i>536</i>	<i>353</i>	<i>4,098</i>	<i>3,727</i>	<i>17,124</i>	<i>3,534</i>
	Total I + II	64,587	1,203	1,020	9,135	9,795	31,626	6,086

Sumber : profil kecamatan temanggung, 2000

Berdasarkan data diatas, tingkat pendidikan penduduk kawasan kota utama ternyata tidak jauh berbeda dengan kawasan suburbia, khususnya yang telah tamat perguruan tinggi. Dari 32.070 orang penduduk di kawasan suburbia, sebanyak 536 orang (1,67%) tercatat telah tamat perguruan tinggi dan 353 orang (1,1%) lulus akademi/D-3. Kondisi demikian hampir sama dengan penduduk kawasan kota utama, yang lulusan S-1 tercatat 2,05% dari total penduduk kota utama. Demikian pula dengan tingkatan pendidikan lainnya, seperti SLTA dan SLTP. Untuk tamatan SLTA, penduduk pada kawasan kota utama tercatat 5.037 orang (15,49%), sedangkan di kawasan suburbia tercatat 4.098 atau 12,78% dari jumlah penduduk.

Untuk membuktikan apakah bahwa kondisi tingkat pendidikan pada kedua kawasan, dilakukan uji '*compare mean*' dengan *one sample T-test*. Berdasarkan analisa tersebut diketahui bahwa variabel XI yaitu tingkat pendidikan di kawasan kota utama diperoleh mean 83,3750 sedangkan mean pada kawasan suburbia adalah 44,66. Standart diviasi atau simpangan baku 59,49 dan nilai *t* sebesar **3,964** pada *df.* 7 dan nilai signifikansi sebesar 0,005. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat pada kawasan kota utama dengan tingkat pendidikan di kawasan suburbia.

Selanjutnya analisa dan kajian tingkat pendidikan masyarakat ini, adalah untuk melihat apakah ada keterkaitan antara *tingkat pendidikan masyarakat* dengan *besar kecilnya perkembangan kota*. Analisa ini mendasarkan asumsi bahwa *salah satu dimensi mobilitas tempat tinggal seseorang dipengaruhi oleh penghasilan*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa makin tinggi strata pendidikan seseorang, makin tinggi pula tingkat penghasilan seseorang, sehingga akan menentukan dimana letak tempat tinggalnya.

Menurut tesis Turner, orang yang berpenghasilan rendah, cenderung akan memilih tempat tinggal di pusat kota (CBD), secara bersama-sama dalam rangka mendekati tempat kerja. Sehingga di banyak kota-kota dunia keberadaan golongan ini mengakibatkan '*deteriorisasi lingkungan pemukiman*' dan kondisi tempat tinggal yang *sub standart*. Sementara orang-orang yang berpenghasilan tinggi akan memilih tempat tinggalnya di pinggiran kota, dengan beberapa alasan antara lain di pinggiran kota kondisi lingkungannya masih *nyaman dan natural, terlepas dari kebisingan, harga tanah relatif murah dan mereka dapat membangun rumah-rumah dengan tipe besar dan modern*.

Sementara itu ada anggapan yang berkembang di masyarakat lokal, bahwa kebanyakan orang-orang yang tinggal di kompleks-kompleks perumahan dan kawasan terbangun baru di pinggiran kota adalah mereka yang *berpenghasilan tetap dan relatif tinggi*, seperti para pegawai negeri, pengusaha dan karyawan swasta yang mapan. Kebanyakan dari mereka adalah berpendidikan sarjana atau minimal sarjana muda.

Satu kawasan sampel dipilih untuk mengkaji apakah memang ada keterkaitan antara tingkat pendidikan ini dengan kepemilikan rumah-rumah di kawasan Suburbia. Sampel itu adalah kawasan pemukiman Tawangsari Permai di Desa Kebonsari, menunjukkan bahwa sebanyak 71 orang dari 154 KK penghuni (46,10%) berpendidikan Sarjana (57 orang S-1 dan 14 orang Akademi/D-3). Selanjutnya 69 orang (43,67%) lulus SLTA, 11 orang (7,14%) SLTP dan 5 orang (3,25%) SD/SR. (Perincian data selengkapnya seperti tercantum pada Tabel IV.11.

Selanjutnya berdasarkan data tersebut juga akan diketahui keterkaitan antara besar-kecilnya tipe rumah dengan tinggi rendahnya tingkat pendidikan penghuni. Untuk

rumah tipe besar dengan luas tanah tanah 340 m (unit kapling), dengan penghuni 29 KK, terdapat 11 KK (37,93%) berpendidikan S-1, 2 KK pendidikan Akademi/D-3, 12 KK (41,38%) SLTA, 2 KK pendidikan SLTP dan tidak ada yang berpendidikan SD. Sedangkan untuk type RSS-21 yang berpenghuni 43 keluarga, terdapat 11 KK S-1 (25,58%) , 4 KK D-3, 23 KK SLTA (53,49), 3 KK SLTP dan 2 KK SD.

TABEL IV.11
TINGKAT PENDIDIKAN KEPALA KELUARGA (KK)
PADA SAMPEL KAWASAN

LINGK. RT/ TYPE RUMAH	TINGKAT PENDIDIKAN										JUM LAH
	S-1	%	D-3	%	SLTA	%	SLTP	%	SD	%	
RT.01/ Kapling 340 m2	13	48.10	2	6.90	12	41.38	2	6.90	0	0	29
RT.02/ type RSS-21	11	25.6	4	9.30	23	53.49	3	6.98	2	4.65	43
RT.03/ type RS-21	6	22.2	3	11.11	14	51.85	3	11.11	1	3.70	27
RT.04/ type RS-36&45	14	73.7	2	10.53	2	10.53	1	5.26	0	0.00	19
RT.05/ type RS-21	9	42.9	1	4.76	9	42.86	2	9.52	0	0.00	21
RT.06/ type RS-21	4	26.7	2	13.33	7	46.67	0	0.00	2	13.33	15
JUMLAH	57		14		67		11		5		154
	37.01		9.09		43.51		7.14		3.25		100

Sumber : data kependudukan RW. III Tawangsari; diolah

Selanjutnya pada type RS 36 dan type 45 (menengah) dari 19 Kepala Keluarga yang ada , sebanyak 14 KK berpendidikan S-1 (73,7%), 2 KK berpendidikan D-3 (10,53%) , 2 KK pendidikan SLTA (10,3%) dan 1 KK SLTP (5,26%).

Selanjutnya untuk membuktikan apakah memang ada perbedaan signifikan tingkat pendidikan penghuni berdasarkan tipe rumah yang dipilih/ditempati, dilakukan dengan uji -*Crosstab*, yang menunjukkan nilai *Pearson Chi-Square* sebesar 13,037 dan

asymptotic significant sebesar 0,111. Jika dihubungkan dengan nilai kritis χ^2 (*Chi-kuadrat*) pada d.f 8 dan taraf signifikansi 0,05 sebesar maka berarti H_0 ditolak. Artinya

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.037 ^a	8	.111
Likelihood Ratio	14.309	8	.074
Linear-by-Linear Association	8.970	1	.003
N of Valid Cases	154		

a. 8 cells (53.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.40.

tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat pendidikan penghuni berdasarkan tipe rumah yang ditempati. Satu analisa berdasarkan 'dept-interview', dapat memberikan

jawaban atas keterkaitan tingkat pendidikan dengan type unit rumah yang dihuni, adalah bahwa alasan awal memilih tipe perumahan, para penghuni lebih dipengaruhi oleh keterbatasan pilihan, dimana pada waktu sekitar tahun 1994 (awal dibangunnya kompleks perumahan sample), belum ada perumahan lain dan yang disediakan oleh pengembang baru tipe RSS-21. Oleh karenanya mereka akhirnya memilih tipe rumah yang ada (type kecil), namun pada kemudian hari mereka merencanakan untuk mengembangkan/merenovasi rumah secara sendiri.

4.2.4 Mata Pencaharian

Untuk mengetahui gambaran mata pencaharian penduduk perkotaan Temanggung, khususnya pada kawasan suburbia (pengembangan), akan dilihat banyaknya rumah tangga berdasarkan pengelompokan sektor ekonomi sebagaimana biasa sebagai indikator pendapatan regional (PDRB).

Berdasarkan kompilasi data, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.12, didapat informasi bahwa keluarga yang menggantungkan hidupnya dari sektor non pertanian (*non*

agricultural) yang meliputi usaha industri, tambang/galian, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, perbankan dan jasa-jasa, ada 5.210 KK dari 7.494 KK yang ada, atau meliputi 69,52%. Sedangkan keluarga pertanian (meliputi pertanian dalam arti luas termasuk peternakan, perikanan dan perkebunan) ada 2.284 KK atau 30,48%. Apabila kita bandingkan dengan proporsi lahan sawah dan tegalan yang ada di wilayah *core city* yang meliputi 50,63% dari luas wilayah yang ada, kondisi demikian masih dapat dikatakan wajar. Artinya 30,48% KK pertanian yang ada mengusahakan 50,63% lahan yang ada.

Sebagai *komparasi*, untuk kawasan suburbia keluarga yang menggantungkan hidupnya dari non pertanian masih relatif kecil yaitu 2.710 KK (35,60%) dari jumlah KK di kawasan tersebut. Sedangkan yang hidup dari pertanian sebanyak 4.903 KK atau meliputi 64,40%. Sedangkan lahan pertanian yang terdiri dari sawah dan tegalan di kawasan suburbia, masih terhampar 74,41% dari luas wilayah.

TABEL IV.12
BANYAKNYA RUMAH TANGGA MENURUT SEKTOR EKONOMI
KAWASAN PERKOTAAN TEMANGGUNG
TAHUN 2000

NO	KAWASAN	Pertanian	Pertambangan	industri	bangunan	perdagangan	angkutan	perbankan	jasa jasa	jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Core city									
1	Kel. Temanggung I	297	6	77	54	415	63	2	158	1,072
2	Kel. Temanggung II	275	5	72	49	385	59	2	147	994
3	Kel. Jampiroso	158	3	86	123	251	66	7	162	856
4	Kel. Butuh	475	7	35	177	90	43	4	1	832
5	Kel. Banyurip	57	7	89	76	103	113	12	535	992
6	Kel. Kertosari	170	4	78	270	37	26	9	498	1,100
7	Kel. Jampirejo	441	-	49	140	184	70	20	24	928
8	Kel. Kowangan	411	6	30	153	78	37	4	1	720

	<i>Jumlah</i>	2,284	33	516	1,042	1,543	477	60	1,526	7,494
	(%)	30,48	0,44	6,89	13,90	20,59	6,37	0,80	20,36	
	Kawasan suburbia									
9	Ds. Walitelon	698	27	10	22	68	73	18	217	1,133
10	Ds. Sidorejo	521	20	7	16	51	61	8	161	845
11	Ds. Kebonsari	356	-	1	3	53	4	1	93	511
12	Ds. Manding	364	11	40	26	34	18	6	186	685
13	Ds. Jurang	200	1	50	50	110	15	5	47	478
14	Ds. Joho	175	13	-	6	3	18	1	6	222
15	Ds. Tlogorejo	217	12	41	50	49	91	3	92	555
16	Ds. Madureso	367	-	10	15	197	82	10	2	683
17	Ds. Giyanti	627	1	9	1	8	15	-	1	662
18	Ds. Mungseng	377	1	31	54	99	11	9	23	612
19	Ds. Purworejo	332	-	-	23	28	14	-	23	420
20	Ds. Mudal	669	-	-	83	-	12	-	43	807
	<i>Jumlah</i>	4,903	86	199	349	700	414	61	894	7,613
	(%)	64,40	1,13	2,61	4,58	9,19	5,44	0,80	11,74	

Sumber : profil kecamatan ; diolah

Analisa konsep tentang “*constructs*” (Shevky dan Bell 1955), yaitu suatu pendekatan untuk mengidentifikasi wilayah sosial dalam kota yang disebabkan oleh suatu perubahan skala gaya hidup, yang antara lain diekspresikan oleh **jenjang sosial ‘rang sosial’** . Secara garis besar pendekatan ini memberikan andil yang besar terhadap penjelasan **struktur sosial dan struktur keruangan** pada kota. Selanjutnya *Social rank* diukur dari (1) *perbandingan mata pencaharian yang semi skilled dan unskilled*, dan (2) *perbandingan jumlah penduduk berpendidikan rendah per 1000 penduduk ekonomi aktif*.

Untuk melihat apakah ada *keterkaitan* antara **struktur sosial** yang diekpresikan oleh variabel '*Sosial rank*' dengan struktur ruang kota, maka penelitian ini mengambil langkah sebagai berikut .

Pertama menganalogikan indikator **perbandingan mata pencaharian yang semi skilled dan unskilled** tersebut, sama dengan perbandingan *keluarga yang non pertanian dan pertanian*, sedangkan yang *indikator pendidikan rendah* dilihat dari banyaknya penduduk lulus SLTP dan SD dibanding dengan jumlah penduduk.

Kedua menentukan indikator **struktur ruang kota** diukur dengan **Indeks struktur ruang** yang ditentukan oleh perbandingan *lahan terbangun dengan luas masing-masing kawasan*.

Berdasarkan tabel pengolahan data ketiga indikator sebagaimana tertera pada Tabel IV.13, kemudian dianalisis dengan menggunakan *Uji Regresi Linier* maupun *Pearson Correlation*, ditemukan **R-square** sebesar **0,142**, artinya dua prediktor (variabel perbandingan pekerjaan dan perbandingan pendidikan rendah), hanya memberikan pengaruh terbentuknya ruang kota sebesar 14,2%). Untuk X_1 (perbandingan pekerjaan) berkorelasi positif dengan variabel Y (indeks ruang) sebesar 0,363, sedangkan X_2 (perbandingan pendidikan rendah) bahkan berkorelasi negatif $-0,115$ dengan variabel Y. Signifikansi hitung adalah **0,271** yang ternyata jauh diatas 0,05, sehingga dapat disimpulkan **tidak ada keterkaitan secara nyata** antara variabel *rank sosial* dengan *struktur ruang perkotaan*.

Pada tataran pengamatan kondisi di lapangan, dapat dikatakan bahwa *struktur ruang perkotaan* di Temanggung menyebar merata, tidak membentuk struktur-struktur ruang khusus berdasarkan '*specialization*'-nya. Disamping itu struktur ruang kota dan

sama sekali tidak dipengaruhi oleh adanya jenjang sosial (*social rank*), yang terbentuk dari *jenis pekerjaan, pendidikan* maupun oleh adanya *segregasi sosial* yang terbentuk berdasarkan etnis atau asal-usul penduduk perkotaan. Jika hal ini dikaji lebih jauh, maka kondisi demikian dikarenakan bahwa untuk kota-kota kedua (*secondary city*), seperti Temanggung yang berpenduduk antara 20.000 – 100.000, struktur masyarakatnya relatif masih *homogen*. Pada kebanyakan kota tersebut belum tampak ruang-ruang kota atau adanya unit-unit hunian yang dibangun dan diperuntukkan kepada kelompok-kelompok tertentu, seperti banyak terjadi di kota-kota besar, kecuali hanya satu unit perumahan yang dibangun atas prakarsa KORPRI Kabupaten Temanggung, sehingga unit hnia tersebut juga dinamakan Perumahan KORPRI (lihat penjelasan setelah paragraf ini).

Demikian pula dengan keberadaan perkampungan/unit hunian dengan berdasarkan spesifikasi atau suku/etnis tertentu, seperti perkampungan elit, kampung jawa, kampung Arab, Cina town dan lain sebagainya, tidak ditemukan pada kota kecil seperti Temanggung.

TABEL IV.13
HUBUNGAN *RANK SOSIAL* DENGAN
STRUKTUR RUANG KOTA PERKOTAAN TEMANGGUNG

NO	KAWASAN	Perbandingan pekerja semi skilled/ pekerja unskilled	Perbandingan pendidikan rendah/ penduduk	Perbandingan areal terbangun/ luas wilayah
1	2	3	4	5
	Core city			
1	Kel. Temanggung I	2.61	0.43	0.68
2	Kel. Temanggung II	2.60	0.40	0.50
3	Kel. Jampiroso	4.42	0.40	0.71
4	Kel. Butuh	0.75	0.42	0.60
5	Kel. Banyurip	6.40	0.43	0.38
6	Kel. Kertosari	5.42	0.50	0.37
7	Kel. Jampirejo	1.10	0.49	0.21
8	Kel. Kowangan	0.75	0.61	0.32
	Kawasan suburbia			
9	Ds. Walitlon	0.62	0.33	0.20
10	Ds. Sidorejo	0.62	0.34	0.32
11	Ds. Kebonsari	0.44	0.31	0.27
12	Ds. Manding	0.88	0.71	0.19
13	Ds. Jurang	1.39	0.34	0.20
14	Ds. Joho	0.27	0.39	0.18
15	Ds. Tlogorejo	1.56	0.44	0.15
16	Ds. Madureso	0.86	0.48	0.15
17	Ds. Giyanti	0.06	0.48	0.39
18	Ds. Mungseng	0.60	0.46	0.73
19	Ds. Purworejo	0.27	0.50	0.16
20	Ds. Mudal	0.21	0.45	0.15

Sumber : data diolah

Selanjutnya untuk variabel *segregasi* diperoleh berdasarkan jawaban para responden pada sampel kawasan terpilih (Pemukiman Tawangsari) tentang asal-usul mereka sebelum menghuni perumahan . Dari 30 orang responden, 18 orang (60%) menyatakan berasal dari **kampung dalam kota**, 5 orang (15%) berasal dari **desa/kecamatan lain dalam kabupaten Temanggung** dan 7 orang (25%) berasal dari **luar kabupaten**.

Suatu penemuan dalam penelitian ini yang menarik untuk kasus-kasus kota kecil (secondary city) adalah adanya kompleks perumahan KORPRI, yaitu suatu kompleks hunian yang pada awalnya dibangun dalam rangka menyediakan perumahan sederhana bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Salah satu RT yang diambil sebagai sampel di lokasi hunian Perum KORPRI Maron Permai di Desa Sidorejo didapat data bahwa penghuni saat ini yang berjumlah 22 orang, 16 orang (73%) diantaranya adalah berstatus PNS, lainnya 10% karyawan swasta dan 7 % wirausaha. Hal ini membenarkan adanya *segregasi* berdasarkan status pekerjaan dan apabila ini diprekdisikan ke depan, maka akan terjadi kompleks hunian yang membentuk '*ruang segregasi*' tertentu semacam itu. Namun sebagaimana yang telah disinggung dimuka, rasanya untuk kota-kota kecil semacam Temanggung hal tersebut sulit dilakukan, karena keterbatasan dan scope spesifikasi pekerjaan penduduk serta perkembangan penduduk yang relatif sedikit/lambat dan cenderung bersifat homogen.

IV.3. Kajian Sarana dan Prasarana Pelayanan Kota

Kajian terhadap sarana dan prasarana perkotaan pada dasarnya adalah melihat persebaran ruang yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk kota. Dalam konteks kajian sarana dan prasarana pelayanan kota ini ada 3 (tiga) hal yang akan dituju. **Pertama**, untuk melihat ratio kecukupan/kelengkapan berdasarkan pada standar pelayanan kota. **kedua**, adalah untuk melihat apakah jumlah penduduk ber-korelasi yang signifikan terhadap kelengkapan sarana/prasarana pelayanan. **ketiga**, adalah untuk melihat aspirasi masyarakat terhadap sarana pelayanan yang masih diperlukan/dibutuhkan

Dalam melihat ratio kecukupan/kelengkapan sarana/prasarana pelayanan kota, dilihat dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah sarana pendidikan formal, meliputi :
 - Taman Kanak-kanak (TK);
 - SD;
 - SLTP;
 - SLTA;
 - Perguruan Tinggi/Akademi;
- b. Jumlah sarana kesehatan;
 - Apotik;
 - Puskesmas
 - puskesmas pembantu;
 - Dokter (praktek);
 - Bidan (praktek)
 - Mantri kesehatan (praktek)

- c. Sarana transportasi , meliputi :
 - Jumlah kendaraan umum roda 4;
 - Panjang jalan aspal;
- d. Sarana perdagangan/pemasaran, meliputi ;
 - Pasar desa
 - Jumlah warung;
 - Jumlah kios/toko;
- e. Sarana komunikasi, meliputi :
 - Jumlah kepemilikan TV
 - Jumlah sambungan telepon;
 - Jumlah wartel/kiostel
- f. Sarana air bersih, meliputi :
 - PDAM;
 - Sumur pompa.
- g. Lingkungan permukiman, meliputi :
 - Persampahan ;
 - Saluran pembuangan.

Setiap item/sub indikator yang nilai maksimum absolutnya kurang atau sama dengan sepuluh dinilai/mempunyai skore 1 dan skore 0 untuk yang tidak ada. Ketentuan ini berlaku pada semua item dari indikator prasarana pendidikan formal dan prasarana kesehatan. Sedangkan untuk sub indikator yang nilai maksimum absolutnya lebih dari 10, seperti pada sub indikator kendaraan umum, jumlah warung, kepemilikan TV rumah

tangga dan kepemilikan telepon, diukur berdasarkan proporsi terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi proporsinya semakin tinggi skorenya, yang diklasifikasikan ke dalam 4 klas, dengan jumlah interval tertentu yang disesuaikan dengan selisih nilai minimum dan maksimum.

Hasil pengukuran dengan ketentuan tersebut, perolehan skore masing-masing indikator setiap desa pengembangan, secara lengkap disajikan pada Tabel IV.15. Pada tabel tersebut diketahui bahwa total skore tertinggi adalah 35 yaitu Desa Sidorejo dan terendah 12, yaitu Desa Joho. Dari variasi skore total dapat dibuat rank (tingkatan) desa pada kawasan suburbia dari yang paling urban (tertinggi skore) sampai pada terendah. Keseluruhan Ada 9 rank, yaitu :

- Ranking 1 Sidorejo (paling urban) dengan total skore 35;
- Ranking 2 Madureso, dengan total skore 31;
- Ranking 3 Kebonsari dan Manding dengan total skore 26;
- Ranking 4 Mungseng dan Jurang dengan total skore 25;
- Ranking 5 Tlogorejo, total skore 24;
- Ranking 6 Giyanti dan Mudal, dengan total skore 20;
- Ranking 7 Walitelon, dengan total skore 18;
- Ranking 8 Purworejo, dengan total skore 16;
- Ranking 9 Joho dengan total skore 12.

TABEL IV.16
PENILAIAN SARANA/PRASARANA PELAYANAN KOTA
PER DESA KAWASAN SUB URBIA

NO	DESA	Jml. prasarana pend.										Jml. prasarana kesht.										komunikasi										air bersih					permukiman		skore	rank
		tk	sd	Sltp	sla	Pt	apt	pusk	pusku	dstu	dkrt.	bidan	mantri	prwt	ku-4	asp	ps-ds	wrng	kios	tv,prt	telp	telp.u	wrt	pdam	s.pomp	spn	drains	skore	rank											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29												
1	Ds. Waitelton	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	3	1	2	1	0	0	1	1	1	0	18	7												
2	Ds. Sidorejo	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	4	2	1	2	1	4	3	0	1	3	4	1	35	1												
3	Ds. Kebonsari	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	2	1	2	2	1	0	4	3	1	26	3													
4	Ds. Manding	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	2	1	4	1	1	0	4	2	1	26	3													
5	Ds. Jurang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	4	1	0	1	3	2	1	25	4													
6	Ds. Joho	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	12	9													
7	Ds. Tlogorejo	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	0	3	0	4	1	0	1	2	2	0	24	5													
8	Ds. Madureso	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	4	2	0	1	1	3	4	1	1	3	3	1	31	2													
9	Ds. Giyanti	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	2	2	1	1	2	2	0	20	6													
10	Ds. Mungseng	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	2	1	2	1	0	1	3	4	1	25	4													
11	Ds. Purworejo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	2	0	2	1	0	0	1	2	0	16	8													
12	Ds. Mudal	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	4	1	2	1	0	0	1	1	0	20	6													

KETERANGAN PER KOLON

kolom 3,4,5,6,7 jelas	kolom 15, ku-4 = kendaraan umum roda 4	kolom 26 = persampahan
kolom 8, apt = apotik	kolom 16, j. asp = jalan aspal	kolom 27 = saluran drainase
kolom 9, pusku = puskesmas	kolom 17, ps-ds = pasar desa	
kolom 10, pusku = puskesmas pembantu	kolom 18, wrng = warung	
kolom 11, dokt. = dokter praktik	kolom 19 (jelas)	
kolom 12,13 (jelas)	kolom 20, tv,prt = tv pribadi	
kolom 14, prwt = perawat	kolom 21 = telpon, 22 = telpon umum, 23 = wartel	
	kolom 24 = air PDAM, kolom 25 = sumur pompa	

Selanjutnya pada pembahasan berikut akan dikaji keberadaan sarana pelayanan yang ada, dikaitkan dengan standar perencanaan/pelayanan umum yang berlaku dalam bidang ke-Cipta karya.

IV.3.1 Sarana pendidikan.

Berdasarkan kompilasi data sebagaimana tabel IV.17 dibawah ini dapat diketahui jumlah dari masing-masing tingkatan sekolah. Di seluruh wilayah perkotaan Temanggung, tercatat ada 32 buah TK, terdiri dari 15 buah di kawasan 'core city' dan 17 di kawasan Suburbia. Jika dibandingkan dengan standar perencanaan penyediaan fasilitas umum, dimana setiap 1 TK minimal harus didukung 1000 jiwa, maka jumlah TK yang ada relatif memadai bahkan cenderung kurang. (setiap 2.018 jiwa penduduk terdapat 1 buah TK; jumlah penduduk perkotaan 64.587 orang).

Selanjutnya jumlah Sekolah Dasar (SD/ sederajat) di wilayah perkotaan adalah 41 buah, terdiri dari 19 buah di kawasan kota utama dan 22 buah tersebar di desa-desa kawasan Suburbia. Jika dikaitkan dengan standar perencanaan, ternyata setiap 1 buah SD didukung kurang lebih 1.575 jiwa. Ini berarti hampir persis dengan persyaratan standart. Satu hal kenapa jumlah SD bisa lebih banyak dari TK ?. Salah satu faktornya adalah bahwa TK adalah termasuk pendidikan pra-sekolah yang pengurusan/pengelolaannya termasuk penyediaan gedung-gedung sekolahnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab masyarakat. Sedangkan untuk SD, yang memang menjadi tanggungjawab pemerintah, banyak dibangun dimana-mana, khususnya pada era orde baru, dimana pada waktu itu populer dengan Program SD Inpres.

TABEL IV.17
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN
DIPERINCI MENURUT DESA/KELURAHAN
DI KAWASAN PERKOTAAN TEMANGGUNG TAHUN 2000

NO	DESA	Jumlah	Jml. prasarana pend. Formal				
		Penduduk	tk	sd	sltp	sia	Pt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kelurahan (core city)						
1	Kel. Temanggung I	4,592	1	2	0	4	0
2	Kel. Temanggung II	4,348	3	4	3	1	0
3	Kel. Jampiroso	4,320	2	4	2	0	0
4	Kel. Butuh	3,628	2	1	0	0	0
5	Kel. Banyurip	3,774	2	2	0	0	0
6	Kel. Kertosari	4,599	2	2	0	0	0
7	Kel. Jampirejo	4,264	2	2	1	4	0
8	Kel. Kowangan	2,992	1	2	0	1	0
	<i>Jumlah</i>	<i>32,517</i>	<i>15</i>	<i>19</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>-</i>
	Desa kawasan suburbia						
1	Ds. Walitelon	5,107	2	3	1	0	0
2	Ds. Sidorejo	3,221	2	3	0	1	1
3	Ds. Kebonsari	1,892	1	1	0	0	0
4	Ds. Manding	2,669	1	1	0	0	0
5	Ds. Jurang	2,051	1	1	0	1	0
6	Ds. Joho	951	1	1	0	0	0
7	Ds. Tlogorejo	2,474	1	2	1	1	0
8	Ds. Madureso	3,073	2	1	0	0	1
9	Ds. Giyanti	2,277	2	2	0	1	0
10	Ds. Mungseng	2,878	1	2	0	1	0
11	Ds. Purworejo	1,815	1	1	0	0	0
12	Ds. Mudal	3,662	2	4	1	0	0
	<i>Jumlah</i>	<i>32,070</i>	<i>17</i>	<i>22</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>2</i>

Sumber : Profil Desa; Kantor PMD

Untuk sekolah SLTP dan SLTA cenderung terkonsentrasi di kawasan kota utama. Dari 9 buah SLTP yang ada, 6 diantaranya terletak di kota utama dan 3 di kawasan Suburbia. Demikian pula dengan SLTA, yang jumlahnya 15 buah, sebanyak 10 buah berada di kawasan kota utama dan 5 di suburbia. Jumlah SLTA lebih banyak dari SLTP karena pada awalnya sekolah-sekolah SLTA (urnum dan kejuruan) dibangun tidak hanya

untuk menampung lulusan SLTP dalam perkotaan saja, namun juga dari SLTP yang tersebar pada hampir setiap kecamatan yang ada di wilayah kabupaten. Jadi awalnya kota Temanggung sebagai ibukota Kabupaten, menjadi konsentrasi pendidikan dengan pendirian sekolah SLTA negeri (terdapat 3 SMU negeri, 1 MAN dan 2 SMK negeri). Dan baru pada tahun 1984, mulai dibangun SMU negeri di luar kota Temanggung, yang sampai saat ini jumlahnya sudah ada 4 sekolah SMU negeri, untuk menampung lulusan SLTP sekitarnya.

Selanjutnya sampai saat ini di perkotaan Temanggung juga sudah ada 2 perguruan tinggi (Akademi Keperawatan dan STAINU), yang duan-duanya dibangun di kawasan suburbia. Hal ini disebabkan karena lahan di kawasan kota utama terbatas dan relatif mahal, sehingga alternatifnya adalah di kawasan suburbia, disamping masih dimungkinkan untuk pengembangan lokasi yang masih luas.

Untuk melihat seberapa jauh tingkat pemerataan persebaran lokasi sekolah, akan dikaji apakah *banyak-sedikitnya jumlah sekolah tertentu berhubungan dengan jumlah penduduk* pada masing-masing desa/kawasan. Pengujian akan dilakukan dengan 'Pearson correlation'. Untuk sekolah TK dengan jumlah penduduk 'koefisien korelasi'-nya sebesar 0,619 dengan *siginifikansi* sebesar 0,004. Sedangkan antara sekolah SD dengan Jumlah penduduk koefisien korelasinya menunjukkan angka 0,613 dengan *signifikansi* 0,004. Selanjutnya untuk sekolah SLTP koefisien korelasi-nya adalah 0,463 dengan angka *signifikansi* sebesar 0,040.

Dengan demikian *hepotesa alternatif (Ha)* yang menyatakan *terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah sekolah TK, SD dan SLTP dengan jumlah penduduk*, diterima, karena *signifikansi* hitung lebih kecil dari angka sig. Tabel (0,05) dengan

derajat kepercayaan 95% atau 0,01 (derajat kepercayaan 99%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *tingkat persebaran lokasi sekolah dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi penduduk di perkotaan Temanggung sudah merata.*

Sedangkan untuk sekolah SLTA ternyata tidak berhubungan secara nyata dengan jumlah penduduk, karena *koefisien korelasi*-nya adalah 0,281 (dibawah r tabel = 0,339) dan signifikansinya 0,23 (diatas 0,05). Hal ini disebabkan karena pada awalnya pembangunan sekolah SLTA di Temanggung adalah untuk memwadhahi seluruh lulusan SLTP dalam cakupan kabupaten dan terkonsentrasi pada kelurahan tertentu saja, yaitu Temanggung I (4 SLTA) dan Jampirejo (4 SLTA), hal ini tidak dapat dilepaskan dari kebijaksanaan Pemerintah pada saat pembangunannya, bahwa cakupan layanan SLTA adalah diperuntukkan bagi seluruh penduduk dalam kabupaten. Jika dilihat dalam konteks ini, maka dengan jumlah penduduk sebanyak 654.000 jiwa pada tahun 2000, di seluruh Kabupaten Temanggung terdapat tidak kurang dari 32 sekolah SLTA/MA baik negeri maupun swasta. Berarti standar cakupan layanan untuk 1 SLTA minimal 42.000 penduduk pendukung sudah dapat terlampaui. Dengan kata lain jumlah SLTA yang ada seharusnya sudah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah yang bersangkutan.

Selanjutnya kajian berdasarkan jajak pendapat terhadap 30 responden masyarakat perkotaan, didapat data bahwa yang menyatakan perlunya fasilitas sekolah ditambah adalah sebagai berikut : Untuk perguruan tinggi (PT) ada 12 responden (40%), dan 18 orang menyatakan sudah cukup. Untuk SLTA ada 7 orang (23,3%) dan SLTP ada 6 responden (20%). Sedangkan untuk SD dan TK, seluruh responden menyatakan sudah cukup dan tidak perlu ditambah.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa masyarakat sudah merasa 'cukup' terhadap fasilitas pendidikan yang ada, kecuali hanya sebagian kecil yang menghendaki ditambah, khususnya untuk perguruan tinggi (PT). Namun untuk dapat merealisasikan aspirasi ini jelas dibutuhkan pengkajian lanjut, utamanya menyangkut 'demand' dari masyarakat terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan.

IV.3.2 Sarana Kesehatan.

Jenis sarana kesehatan yang terdata adalah Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, apotik, dokter praktek, mantri kesehatan, bidan dan perawat (paramedis). Dari kompilasi data sebagaimana disajikan pada tabel IV.18 dapat dilihat bahwa Rumah Sakit di kota Temanggung ada 2, yaitu RSUD dan RSB (bersalin). 1 Puskesmas dan 1 puskesmas pembantu. 16 orang dokter praktek, 31 orang bidan, 19 orang mantri kesehatan dan 33 orang perawat (paramedis) dan 35 orang bidan. Sedangkan Balai Kesehatan/Klinik hanya ada satu yaitu di RSUD.

Dilihat dari distribusi masing-masing kawasan relatif bervariasi antar jenis sarana. Rumah Sakit (2) dan Apotik (4) misalnya seluruhnya berada di kawasan kota utama. Selanjutnya dokter praktek dari 16 orang, 13 orang diantaranya tinggal dan berpraktek di kota utama. Sedangkan untuk sarana/prasarana kesehatan lain seperti puskesmas, mantri, perawat dan bidan persebarannya hampir merata. Persebaran sarana/prasarana kesehatan yang tersebut terakhir ini bukan semata-mata disengaja atau direncanakan, karena masalah *tempat tinggal* seseorang tidak dapat diintervensi. Seperti perawat dan dokter praktek, alasan mereka tinggal dan membuka praktek di suatu kawasan kota utama atau suburbia ,

terlepas sama sekali dengan jumlah penduduk. Dan oleh karena itu meskipun persebarannya relatif merata tidak akan diuji apakah ada hubungan antara kedua variabel.

TABEL IV.18
DISTRIBUSI SARANA/PRASARANA KESEHATAN
PERKOTAAN TEMANGGUNG TAHUN 2000

NO	DESA	Jumlah Penduduk	Jumlah prasarana kesehatan							
			RS	Pusk.	pustu	apt.	dokt.	mantri	prwt	bidan
1	2	3	4	5	6	7				8
	Kelurahan (core city)									
1	Kel. Temanggung I	4,592	1	0	0	3	3	3	1	1
2	Kel. Temanggung II	4,348	0	1	0	0	5	0	0	0
3	Kel. Jampiroso	4,320	0	0	0	1	3	0	0	2
4	Kel. Butuh	3,628	1	0	1	0	0	0	1	2
5	Kel. Banyurip	3,774	0	0	0	0	0	1	2	1
6	Kel. Kertosari	4,599	0	0	0	0	0	1	1	1
7	Kel. Jampirejo	4,264	0	0	0	0	1	0	0	2
8	Kel. Kowangan	2,992	0	0	1	0	1	2	0	0
	<i>Jumlah</i>	<i>32,517</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>13</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>9</i>
	kawasan suburbia									
1	Ds. Walitelon	5,107	0	0	0	0	0	1	3	1
2	Ds. Sidorejo	3,221	0	0	0	0	3	2	2	2
3	Ds. Kebonsari	1,892	0	0	0	0	0	1	4	3
4	Ds. Manding	2,669	0	0	0	0	0	1	2	1
5	Ds. Jurang	2,051	0	0	0	0	0	0	1	10
6	Ds. Joho	951	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Ds. Tlogorejo	2,474	0	0	1	0	0	0	4	1
8	Ds. Madureso	3,073	0	0	0	0	0	2	3	1
9	Ds. Giyanti	2,277	0	0	0	0	0	2	3	1
10	Ds. Mungseng	2,878	0	0	0	0	0	1	2	2
11	Ds. Purworejo	1,815	0	0	0	0	0	1	3	2
12	Ds. Mudal	3,662	0	1	0	0	0	1	1	1
	<i>Jumlah</i>	<i>32,070</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>12</i>	<i>28</i>	<i>26</i>

Sumber : profil desa, kantor PMD Kab. Temanggung th. 2001

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pendapat atau aspirasi masyarakat terhadap sarana/prasarana pelayanan kesehatan yang meliputi penyediaan Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Kesehatan di perkotaan Temanggung, dapat dilihat pada Tabel IV.19.

TABEL IV.19
PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG
KECUKUPAN FASILITAS KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SUDAH CUKUP	PERLU DITAMBAH	N
1	Rumah Sakit	24 (80%)	6 (20%)	30
2	Puskesmas	23 (76,7%)	7 (23,3%)	30
3	Balai kesehatan/Klinik	21 (70%)	9 (30%)	30

Sumber : data primer, diolah

Dari tabel tersebut diketahui bahwa **sebagian besar** masyarakat di perkotaan Temanggung, merasa sudah '**cukup**' terhadap fasilitas kesehatan yang ada yang meliputi RS, Puskesmas dan Balai Kesehatan/klinik. Dari 30 orang responden misalnya, hanya 6 orang (20%) yang menyatakan bahwa Rumah Sakit di Temanggung perlu ditambah. Sedangkan untuk puskesmas dan kilinik masing-masing 23,3% dan 30% yang menyatakan perlu ditambah.

Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas/pustu dan balai kesehatan **belum perlu ditambah**. Terlepas dari persebaran antar kawasan yang relatif kurang merata, namun untuk konteks perkotaan Temanggung, akses menuju pelayanan kesehatan Rumah Sakit maupun sarana kesehatan yang lain seperti Puskesmas, ternyata dianggap oleh masyarakat **sudah memadai**.

IV.3.3 Transpotasi

Dalam mengkaji sarana transpotasi, yang terpenting adalah dengan melihat dari indikator prasarana jalan dan sarana transpotasi umum. Untuk menilai bagaimana kondisi prasarana jalan antar desa/kawasan suburbia perkotaan Temanggung, diteliti dari

proporsi panjang ruas jalan beraspal terhadap seluruh jalan yang ada dalam wilayah desa yang bersangkutan. Berdasarkan 'range' data yang berhasil dikumpulkan, dari 12 desa pengembangan, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu : (1) *desa dengan proporsi jalan beraspal 100% dan (2) desa dengan proporsi jalan beraspal antara 80 hingga 99%*. Dari 2 kategori tersebut diperoleh simpulan bahwa untuk kategori 1 terdapat 4 desa yaitu *desa Sidorejo, Kebonsari, Manding dan Madureso*. Sedangkan yang termasuk kategori 2 ada 8 desa, yaitu *desa Walitelon, Jurang, Joho, Tlogorejo, Giyanti, Mungseng, Purworejo dan desa Mudal*.

Selanjutnya untuk melihat aspirasi masyarakat yang direpresentasikan oleh responden, tentang bagaimana pelayanan di bidang transportasi yang meliputi angkutan umum dan jaringan jalan dapat dilihat pada tabel IV.20 berikut :

TABEL IV.20
PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG
KECUKUPAN PELAYANAN TRANSPOTASI

NO	JENIS PELAYANAN TRANSPOTASI	SUDAH CUKUP	PERLU DITAMBAH	N
1	Jaringan Jalan	13 (42,8%)	17 (57,2%)	30
2	Angkutan umum	30 (100%)	0 (0%)	30

Sumber : data primer, diolah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk jaringan jalan sebanyak 13 responden (42,8%) menyatakan sudah cukup sedangkan 17 lainnya (57,2%) menyatakan perlu ditambah. Sedangkan untuk angkutan umum seluruh responden (100%) menyatakan **sudah cukup/tidak perlu ditambah**. Jika dilihat dengan seksama perolehan data ini menunjukkan kontradiksi antar keduanya. Logikanya jika angkutan umum sudah cukup

(tidak perlu ditambah) mestinya jaringan jalanpun sudah memadai (tidak perlu ditambah). Setelah dilakukan 'cross-check' kepada beberapa orang responden secara acak, yang dimaksudkan menambah jaringan jalan bagi masyarakat adalah *peningkatan kualitas jalan* yang sebagian telah rusak dan juga beberapa yang perlu pelebaran jalan yang menghubungkan antar perdesunan/lingkungan dalam wilayah desa yang bersangkutan.

IV.3.4 Permukiman

Untuk mengetahui dan mengkaji kondisi permukiman masing-masing desa dalam kawasan suburbia, dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu (1) proporsi jumlah pelanggan PDAM (2) pelayanan persampahan dan (3) fasilitas saluran pembuangan (drainase). Untuk pelanggan PDAM satuannya jelas yaitu prosen; untuk pelayanan persampahan dikategorikan sebagai desa dimana layanan sampah sudah dilayani oleh pemerintah atau belum, sedangkan untuk fasilitas drainase dilihat apakah sebagian besar permukiman yang ada telah dilengkapi dengan jaringan pematusan atau belum.

Dari tampilan data sebagaimana tabel IV.21, diketahui bahwa jumlah pelanggan PDAM di seluruh perkotaan Temanggung adalah 6.474 pelanggan atau mencakup 42,85% dari total jumlah keluarga yang ada. Untuk masing-masing kawasan (core city dan suburbia) ternyata rataan proporsi pelanggan tidak jauh berbeda, yaitu 48,47% untuk kota utama dan 37,33% untuk kawasan Suburbia.

TABEL IV.21
PROPORSI PELANGGAN PDAM
PERKOTAAN TEMANGGUNG

NO	KAWASAN	PDAM (KK)	JUMLAH KK	%
1	2	3	4	5
	Core city			
1	Kel. Temanggung I	451	1072	42.07
2	Kel. Temanggung II	574	994	57.75
3	Kel. Jampiroso	800	856	93.46
4	Kel. Butuh	217	832	26.08
5	Kel. Banyurip	833	992	83.97
6	Kel. Kertosari	175	1100	15.91
7	Kel. Jampirejo	281	928	30.28
8	Kel. Kowangan	301	720	41.81
	<i>Jumlah</i>	3,632	7,494	48.47
	Suburbia			
9	Ds. Walitelon	241	1133	21.27
10	Ds. Sidorejo	337	845	39.88
11	Ds. Kebonsari	284	511	55.58
12	Ds. Manding	506	685	73.87
13	Ds. Jurang	350	478	73.22
14	Ds. Joho	0	222	0.00
15	Ds. Tlogorejo	122	555	21.98
16	Ds. Madureso	325	683	47.58
17	Ds. Giyanti	229	662	34.59
18	Ds. Mungseng	271	612	44.28
19	Ds. Purworejo	0	420	0.00
20	Ds. Mudal	177	807	21.93
	<i>Jumlah</i>	2,842	7,613	37.33
	total	6,474	15,107	42.85

Sumber : profil desa; diolah

Selanjutnya untuk mengetahui apakah jumlah pelanggan PDAM ini *berhubungan secara nyata dengan jumlah rumah tangga yang ada*, dilakukan test statistik dengan menggunakan *Analisa Regresi*. Hasil pengujian secara *Regresi* akan diketahui apakah kedua variabel berhubungan atau tidak, sehingga dapat dipakai untuk menyusun kesimpulan lanjutan, yaitu *apabila berhubungan secara signifikan*, dapat dikatakan

bahwa pelayanan PDAM kepada masyarakat perkotaan dapat dikatakan **merata**, namun apabila keduanya *tidak berhubungan signifikan*, maka dikatakan pelayanan PDAM, khususnya dalam hal pemerataan dan persebarannya antar kawasan **kurang merata**.

Hasil uji *Regresi Linier* menunjukkan bahwa nilai **r hitung** sama dengan **0,478** dengan *signifikansi* **0,033** dan nilai *R-square* **0,228**. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pelanggan PDAM **berhubungan secara positif** dengan jumlah rumah tangga yang ada. Pengaruh tersebut meskipun tidak begitu kuat, (nilai *R-square* **0,228** menunjukkan bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung sebesar **22,8%**), namun kedua variabel **tetap berhubungan signifikan** karena nilai **Sig.F. change-nya adalah 0,033** yang berarti lebih kecil dari **0,05** (tarap *signifikansi* **0,05**). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan PDAM terhadap kebutuhan air bersih masyarakat relatif **merata**, khususnya bila dilihat dari segi persebaran antar kawasan baik di kawasan kota utama (*core city*) maupun kawasan suburbia.

Selanjutnya secara kasuistik dari persebaran data PDAM pada kawasan Suburbia, ternyata ada 2 (dua) desa yang pelanggan PDAM-nya masih nol, dalam arti tidak ada sama sekali yang berlangganan PDAM. Setelah dilakukan *cross-check*, di lapangan ternyata pada kedua desa tersebut (Desa Joho dan Desa Jurang), belum terpasang saluran/jaringan PDAM. Setelah dikonfirmasi kepada pejabat PDAM, ternyata ada **tiga alasan** kenapa di kedua desa tersebut belum ada saluran/jaringan PDAM, yaitu :

- A. jumlah rumah tangga (KK) di kedua desa tersebut relatif kecil,
- B. letak geografisnya yang relatif jauh dari jaringan primer (jaringan induk), sehingga kalau dibangun jaringan menuju kawasan tersebut *cost-nya* terlalu tinggi

C. debit air kurang. (saat ini untuk melayani jaringan yang sudah ada di beberapa kawasan diterapkan sistem gilir, yaitu hanya hidup pada jam-jam tertentu).

Oleh karena itu di waktu yang akan datang, apabila PDAM sudah dapat menambah tingkat ketersediaan air (menambah debit atau mengurangi tingkat kebocoran), maka diharapkan kedua desa pada kawasan Suburbia tersebut akan dapat menikmati fasilitas air bersih PDAM.

IV.4 Kajian Manajemen Pembangunan Kota

Sehubungan pada bagian depan telah dikaji tentang 3 (tiga) variabel pokok dalam Manajemen Pembangunan Kota, yaitu morfologi, kondisi sosial ekonomi dan prasarana (infrastruktur), maka selanjutnya pada variabel Manajemen Pembangunan Kota, akan dilihat melalui tiga indikator, yang berkaitan secara langsung bagaimana sebenarnya implementasi manajemen pembangunan kota tersebut dijalankan. Tiga aspek/indikator penting tersebut adalah : (1) *kelembagaan/ aparatur* , (2) *keuangan (finance)*, dan (3) *kebijaksanaan perencanaan kota..*

IV.3.1 Kelembagaan dan Aparatur (*institution and labour*)

Manajemen pembangunan kota di perkotaan Temanggung tidak dapat dipisahkan dari struktur pemerintahan daerah, baik daerah Kabupaten ataupun Daerah Kota, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut pasal 32 ketentuan Undang-Undang tersebut, daerah yang berstatus kabupaten dipimpin oleh seorang kepala daerah yang diberi sebutan **Bupati**, sedangkan untuk daerah Kota dipimpin oleh kepala daerah yang diberi sebutan **Walikota** (menurut UU 5/74 sebutannya **Walikotamandya**). Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, di daerah dibentuk Perangkat Daerah. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Saat ini perangkat daerah di Kabupaten Temanggung terdiri dari Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 Asisten Sekertaris Daerah, 11 Bagian, 7 Dinas dan 12 lembaga teknis daerah (2 Badan dan 10 Kantor). Sebelas bagian dalam lingkup Sekertariat Daerah dapat diperinci sebagai berikut :

- A. Asisten I Bidang Pemerintahan, membawahi 4 bagian, yaitu :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan ;
 - 2. Bagian Hukum;
 - 3. Bagian Organisasi dan Tata laksana;
 - 4. Bagian Humas.

- B. Asisten II Bidang Ekonomi dan pembangunan, membawahi 4 bagian, yaitu :
 - 5. Bagian Perekonomian;
 - 6. Bagian Lingkungan Hidup;
 - 7. Bagian Pengendalian program;
 - 8. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- C. Asisten III Bidang Administrasi, membawahi 4 bagian, yaitu :
 - 9. Bagian Keuangan ;
 - 10. Bagian Kepegawaian;
 - 11. Bagian Umum;

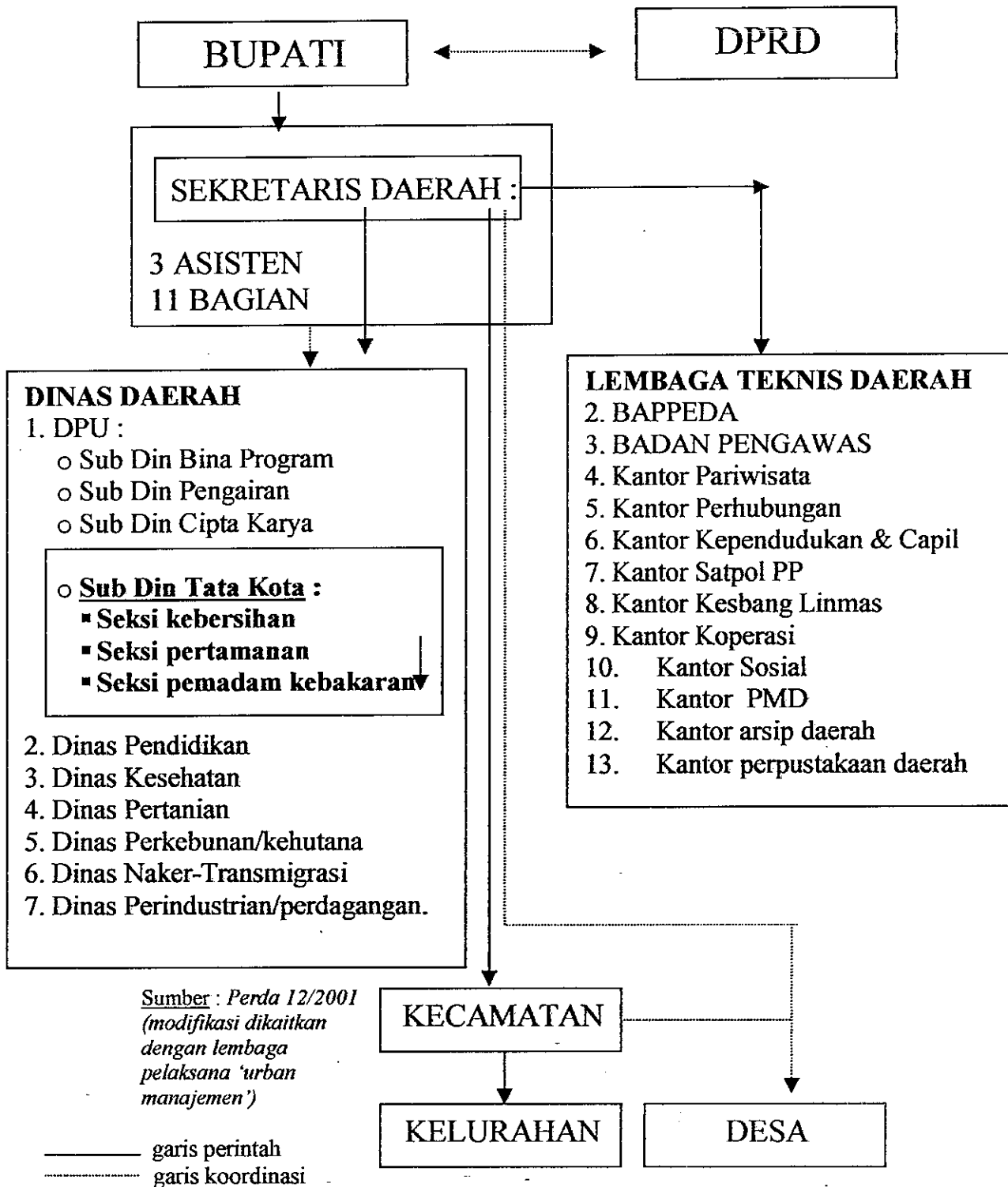
Selanjutnya 7 (tujuh) Dinas yang dibentuk sebagai unit pelaksana daerah, dengan kedudukan kepala/pimpinan adalah jabatan eselon II, adalah sebagai berikut :

- 1. Dinas Pekerjaan Umum (DPU);
- 2. Dinas Pendidikan;
- 3. Dinas Kesehatan;
- 4. Dinas Perindustrian dan perdagangan;
- 5. Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi;
- 6. Dinas Pertanian;
- 7. Dinas Perkebunan dan kehutanan.

Sedangkan pembentukan lembaga teknis daerah (Lemtekda) ada 12 instansi yang terdiri dari 2 (dua) badan (eselon II) dan 10 Kantor (eselon III), sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
2. Badan Pengawas;
3. Kantor Pariwisata;
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Kantor Perhubungan;
7. Kantor Pemberdayaan Masyarakat (PMD);
8. Kantor Pelayanan Sosial;
9. Kantor Koperasi;
10. Kantor Arsip dan
11. Kantor Perpustakaan.

(secara hirarkhi struktur kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Gambar 4.5)



GAMBAR.4.5
STRUKTUR ORGANISASI PEMKAB TEMANGGUNG

Dari keseluruhan perangkat daerah tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung belum membentuk instansi/lembaga mandiri yang menangani masalah perkotaan. Padahal sebenarnya amanat Pasal 90 Undang-Undang 22 tahun 1999, meletakkan dasar pijakan untuk pengelolaan (manajemen) perkotaan di Indonesia, baik itu kota, yang dimaksud dengan daerah Kota atau daerah perkotaan dalam sebuah wilayah kabupaten atau bahkan kawasan perkotaan lintas daerah. Salah satu point mendasar dari pasal tersebut menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan perkotaan perlunya dibentuk **kawasan perkotaan** dan dapat pula dibentuk badan pengelola pembangunan kawasan yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Fenomena mengenai struktur lembaga pemerintahan yang ada di Temanggung, adalah salah satu contoh dari beragamnya struktur pemerintahan di daerah kabupaten/kota di Indonesia pada era reformasi ini. Karena berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 1999, daerah diberi kebebasan untuk membentuk perangkat daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi maupun karakteristik daerah dan kesepakatan politik antar elit di daerah. Oleh karena itu, kondisi lembaga perangkat daerah antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam.

Misalnya untuk menangani kawasan perkotaan, ada daerah yang membentuk Dinas Tata Kota atau Bagian Perkotaan. Sebaliknya ada daerah yang masalah perkotaan hanya dipercayakan pada salah satu bidang/seksi di Dinas Pekerjaan Umum seperti yang terjadi di Temanggung. Namun ada pula tidak satupun lembaga/sub di daerah yang secara eksplisit tidak menunjukkan nomen klatur perkotaan. Tugas-tugas yang terkait dengan masalah kota seperti jalan diampu oleh Sub Dinas Bina Marga, Air bersih oleh PDAM, Persampahan oleh Kantor kebersihan dan lain sebagainya.

Untuk perkotaan Temanggung dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah, masalah perkotaan diampu oleh **Sub Dinas Tata Kota**, yang merupakan bagian dari **Dinas Pekerjaan Umum (DPU)**. Sub Dinas tata Kota terdiri dari 3 seksi yaitu :

1. Seksi kebersihan (dulu sebelum SOT/Susunan Organisasi dan Tatakerja baru dalam rangka otonomi ada Dinas Kebersihan dan Pertamanan).
2. Seksi Pertamanan.
3. Seksi Pemadam Kebakaran.

Dilihat dari struktur yang ada di Sub Dinas Tata Kota, secara konseptual terlihat bahwa komponen-komponen penting kota bahkan tidak diampu. Misalnya jalan kota, perumahan dan permukiman, tata ruang maupun tata bangunan. Sehingga pada prakteknya pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut komponen perkotaan tersebut diampu oleh sub din atau seksi lain. Oleh karena itu karena pekerjaan menjadi tidak optimal. Salah satu contoh yang berkaitan dengan penelitian ini, ternyata sulit memperoleh data sebenarnya berapa unit rumah yang telah dan akan dibangun oleh pengembang, atau tentang konsep peruntukan kawasan serta 'progres-nya'. Permasalahan seperti ini mungkin dapat diminimalisir dengan membentuk sebuah lembaga/instansi yang secara spesifik menangani dan mengelola kota, khususnya mengantisipasi pertumbuhan kawasan pinggiran kota.

Satu lagi kajian tentang pelaksanaan pembangunan kota ini dikaitkan dengan hirarkhi kelembagaan di bawahnya. Tugas-tugas perkotaan yang telah dirancang oleh Sub Dina Tata Kota ini, sepanjang bukan merupakan pekerjaan fisik yang membutuhkan perancangan '*design*' dan teknis pelaksanaan yang rumit, selanjutnya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Camat Kota, Kepala Kelurahan/Kepala Desa, Kepala Dusun/Kepala

Lingkungan sampai dengan RT/RW. Misalnya adalah *penanganan masalah persampahan*; Dalam hal ini Sub Dinas hanya menyediakan/membangun fasilitas *transfer depo* , sedangkan kotak-kotak sampah di lingkungan permukiman warga yang menyediakan secara swadaya yang ditangani secara kolektif oleh RT/RW (khusus untuk kotak sampah di pinggir jalan yang disediakan oleh Sub Dinas).

Ada hal pokok kajian masalah kelembagaan dalam manajemen perkotaan dalam penelitian ini, yaitu keberadaan **Pemerintah Kelurahan** dan Pemerintah Desa. Pemerintah Kelurahan berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2001 tentang *Pedoman Pembentukan , Pemecahan ,Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan*, menyebutkan bahwa kelurahan dapat dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan *luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat*.

Kelurahan adalah wilayah kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan sebagai perangkat daerah dan menangani *tugas dekosentrasi* (pemberian tugas; bukan pelimpahan wewenang) dari atasan (Camat, Kepala Sub Dinas atau bahkan langsung dari Bupati). Sedangkan untuk Pemerintah Desa, terdapat lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai *lembaga legislatif* di tingkat desa, pada dasarnya mempunyai kewenangan penuh mengatur rumah tangga desanya berdasarkan adat istiadat dan budaya setempat termasuk menggali sumber-sumber keuangannya. Dengan kata lain Pemerintah Desa mempunyai hak otonomi mengatur desa-nya yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kelurahan. Oleh karena itu untuk membentuk satu kawasan perkotaan dengan manajemen yang terarah, terpadu serta lintas wilayah/desa perlunya struktur kelembagaan perkotaan yang tersistem dengan baik. Artinya dalam konteks ini paradigma 'uniformitas'

atau penyeragaman dalam tingkat tertentu menjadi pilihan terbaik, dengan tetap memperhatikan atau melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil. Solusi ini lebih ringan dari 'ego desa' yang mungkin timbul dari fenomena otonomi desa dengan BPD-nya.

Selanjutnya dari hasil pengumpulan data baik secara tertulis (questioner) maupun wawancara yang dilakukan terhadap 12 orang Kepala Desa kawasan Suburbia Kota Temanggung, menyatakan bahwa status kelurahan ternyata lebih dipilih dari pada status desa. Terhadap pertanyaan apakah setuju/tidak setuju jika desa Saudara dirubah statusnya menjadi Kelurahan, seluruh **responden (100%)** menyatakan **setuju**. Alasan pokoknya antara lain, bahwa jika menjadi 'kelurahan', maka status perangkat desa akan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan ini dari segi kesejahteraan dinyatakan jelas akan *lebih baik* dibanding dengan hasil produksi/penjualan tanah bengkok yang selama ini menjadi kompensasi bagi perangkat desa. Hal ini sebanding dengan *kepadatan kerja* yang selama ini dilakukan sebagai perangkat desa di daerah pengembangan kota, yang menurutnya *telah sama atau minimal mendekati kepadatan kerja* di kelurahan-kelurahan di kawasan kota utama. Disamping itu urusan-urusan desa seperti Pilkades (Pilihan Kepala Desa), pilihan perangkat, pilihan BPD (Badan Perwakilan Desa) yang dilaksanakan setiap 5 tahun dapat menimbulkan 'kerawanan' bagi persatuan dan kesatuan masyarakat desa yang bersangkutan.

Berdasarkan aspirasi tersebut dan dengan mempertimbangkan nilai skor kenampakan fisik perkotaan per desa sebagaimana disajikan pada tabel IV. 16 diatas, sebenarnya Pemerintah Kabupaten sudah dapat mempertimbangkan **pembentukan kelurahan** di kawasan suburbia. Dengan pembentukan kelurahan ini diharapkan

manajemen pembangunan perkotaan dapat lebih terintegrasi, terkoordinasi dan berdaya guna serta berhasil guna dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah kawasan perkotaan.

Sedangkan masalah aparatur Pemerintah Desa (perangkat desa) yang status desanya berubah menjadi Kelurahan, sepanjang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian pula dengan dengan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa seluruhnya diserahkan menjadi aset dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah (pasal 7 – 8 Perda Kabupaten Temanggung No. 12 Tahun 2001).

Selanjutnya kembali mengenai kelembagaan yang mengelola perkotaan di tingkat atas (kabupaten) perlu dibentuk lembaga sendiri yang merupakan pengembangan dari **Sub Dinas Tata kota**, dapat berbentuk **Dinas, Kantor atau Badan Pengelola**. Karena kalau urusan pengelolaan kawasan perkotaan ini hanya ditangani oleh Sub Dinas yang merupakan sub ordinasi dari DPU, maka bisanya keputusan-keputusan penting tetap di tangan Bupati atau paling tidak Kepala DPU. Sedangkan Kepala Sub Din hanya melaksanakan tugas-tugas operasional yang telah ditetapkan oleh atasannya. Jadi kesimpulannya *gagasan ideal* agar dalam menangani masalah perkotaan, perlu dibentuk/dipimpin oleh '*manajer-kota*' yang merupakan jabatan non-politis sebagaimana layaknya para '*urban manager*' di Amerika. Dengan status demikian diharapkan '*manajer kota*' dapat bekerja secara profesional, bersikap independen serta lepas dari campur tangan politis dan kepentingan lain yang dapat merugikan masyarakat kota.

IV.3.2 Keuangan.

Masalah keuangan dalam Manajemen Pembangunan Kota, sangat erat kaitannya dengan keuangan daerah sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam mengkaji aspek keuangan ini akan dilihat berapa proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sektor perkotaan dari jumlah total alokasi anggaran belanja pembangunan. Alokasi untuk sektor perkotaan antara lain meliputi 6 (enam) komponen yaitu jalan kota, drainase, sanitasi, air bersih, persampahan

Selama dekade terakhir yaitu tahun 1992/93 – 2001 alokasi anggaran untuk sektor perkotaan rata-rata hanya 8,51% dari total anggaran belanja pembangunan dalam APBD Kabupaten. Setiap tahun jumlahnya mengalami fluktuasi, seperti pada tahun-tahun pelaksanaan P3KT alokasi anggaran sektor perkotaan mencapai 12,90% (1995/1996) dan 12,86% pada tahun 1996/1997. Kemudian setelah pasca pelaksanaan P3KT proporsi alokasi anggaran sektor perkotaan kembali hanya berkisar antara 3 – 5%. Kondisi demikian terjadi pada tahun 2001, tahun dimana pelaksanaan otonomi daerah dengan jatah DAU yang besar sehingga total anggaran belanja pembangunan pada waktu itu naik sekitar 500% dari tahun sebelumnya (2000).

TABEL IV.22
ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN
UNTUK SEKTOR PERKOTAAN KAB. TEMANGGUNG
(1992/1992 – 2001)

NO	TAHUN	ANGGARAN PEMBANGUNAN (Rp. X 000)	ANGGARAN SEKTOR PERKOTAAN (Rp. X 000)	%
1	2	3	4	5
1	1992/1993	6,789,250	260,000	3.83
2	1993/1994	6,800,000	657,400	9.67
3	1994/1995	7,240,000	420,000	5.80
4	1995/1996	9,892,173	1,276,000	12.90
5	1996/1997	11,337,982	1,457,845	12.86
6	1997/1998	15,358,676	1,670,800	10.88
7	1998/1999	10,420,517	850,650	8.16
8	1999/2000	10,881,962	911,650	8.38
9	2000	12,687,500	1,350,000	10.64
10	2001	67,890,725	3,749,340	5.52

Sumber : perhitungan APBD; diolah

Untuk melihat apakah besaran alokasi anggaran pembangunan sektor perkotaan berkorelasi positif dengan total besaran anggaran pembangunan, ditest dengan *uji- Regresi linier*. Hasil test menunjukkan nilai R sama dengan **0,938** dan *R square* = 0,879. Sedangkan nilai F hitung 58,204 lebih tinggi dari nilai F tabel (1% = 7,50 dan 5% = 4,15) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian alokasi anggaran perkotaan setiap tahun berhubungan secara positif dan signifikan dengan total anggaran belanja pembangunan pada tahun yang bersangkutan. Artinya jumlah alokasi anggaran untuk sektor perkotaan pada periode 1992/93 sampai dengan 2001, sangat dipengaruhi oleh besaran atau jumlah anggaran pembangunan, meskipun di depan sudah dinyatakan bahwa secara jumlah absolut untuk anggaran perkotaan melonjak tajam, khususnya pada saat pelaksanaan program P3KT antara tahun 1994/1995 - 1998/1999. Hal ini menunjukkan

adanya *kemaunan politis* dari elit di daerah yang bertanggungjawab pada manajemen pembangunan kota, untuk memperhatikan pelayanan di sektor perkotaan yang senantiasa disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.

IV. 3.3 Kabijaksanaan Perencanaan Kota

Masalah perencanaan kota yang dikaji dalam penelitian ini tentang perencanaan kota adalah sejauhmana perencanaan tersebut disusun dan bagaimana capaian pelaksanaan. Kebijaksanaan perencanaan kota Temanggung terakhir disusun dalam dokumen Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Temanggung 1997/1998 – 2007/2008 yang dibuat pada tahun 1996/1997. Rumusan perencanaan pengembangan kota Temanggung sebagaimana tertera dalam RUTRK secara garis besar berisi tentang kebijaksanaan dan strategi penetapan fungsi dan peran kota, pengembangan jaringan jalan dan transportasi serta pengembangan perumahan dan utilitas (jaringan penatusan, jaringan air bersih, pengelolaan sampah).

Kebijaksanaan dan strategi penetapan fungsi dan peran kota menurut RUTRK adalah sebagai berikut :

- A. Kota Temanggung sebagai pusat pelayanan pemerintahan tingkat kabupaten;
- B. Sebagai permukiman penduduk kota;
- C. Sebagai kota perdagangan dan jasa;
- D. Sebagai kota transit Semarang – Temanggung – Wonosobo/Purwokerto dan Temanggung dengan kota sekitarnya.

Sebagai pusat pelayanan pemerintahan jelas, karena di ota inilah terdapat kantor Bupati sebagai Kepala Daerah berada yang membawahi 20 kecamatan dan 288

desa/kelurahan. Sebagai permukiman penduduk kota dapat dilihat bahwa selama 3 tahun perjalanan RUTRK (sampai dengan tahun 2000) realisasi jumlah penduduk perkotaan Temanggung adalah 64.587 jiwa, sedangkan menurut proyeksi penduduk dalam RUTRK penduduk perkotaan Temanggung pada tahun 2000 akan mencapai 67.365 orang. Selisih tersebut terletak pada asumsi dasar proyeksi pertumbuhan penduduk yang dipakai dalam RUTRK yaitu sebesar 1,36%. Proyeksi tersebut memakai kecenderungan penambahan penduduk tahun-tahun sebelumnya, yang ternyata tidak terjadi pada era setelah tahun 1999, yang pertumbuhannya hanya mencapai 1,21%.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, perkotaan Temanggung mengalami kemajuan yang cenderung lamban. Hal ini dapat dilihat dari penambahan fasilitas perdagangan yang relatif tidak berubah. Perdagangan di Kota Temanggung sifatnya hanya melayani kepentingan lokal dan kawasan sekitarnya, sehingga belum banyak menarik para pembeli dari luar kota/kabupaten. Bahkan kenyataan yang ditemui di lapangan, masyarakat kota Temanggung lebih sering membelanjakan ke luar kota Temanggung, khususnya Magelang atau Yogyakarta yang memang secara fasilitas lebih memadai. (Sampai sekarang baru ada satu toserba/supermarket lokal di Temanggung, lainnya hanya toko-toko klontong kecil, yang terkonsentrasi di sekitar lokasi pasar).

Sebagai kota transit jalur transportasi Semarang – Temanggung – Wonosobo/Purwokerto. Upaya ke arah itu sampai saat ini belum banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan kota Temanggung. Sampai saat ini gejala 'transit' sebagai potensi, hanya diperlihatkan oleh salah satu restoran yang ada di kota (RM Ngesti Rahayu) di Kowangan yang banyak disinggahi oleh para 'travel'.

Kebijaksanaan pengembangan jaringan jalan dan transportasi yang salah satu strategi pengembangan kota, adalah membangun jalan lingkar/alternatif kota (*outer ring road*), sampai saat ini terealisasi 65%, karena masih ada satu ruas jalan yang belum dibangun badan jalannya. Keberadaan jalan lingkar yang sudah saat ini antara lain berfungsi untuk menghubungkan/membuka akses kawasan suburbia dengan pusat kota sebagai orientasi kegiatan. Ada 4 desa di kawasan suburbia yang terkena langsung pembangunan jalan lingkar, sehingga kondisi 4 desa tersebut yang tadinya secara fisik masih cenderung 'rural' saat ini sudah mulai dibangun beberapa kompleks perumahan (permukiman) dan bangunan lain seperti gudang, toko-toko, khususnya pada pertigaan-pertigaan strategis, sehingga mampu menumbuhkan kegiatan ekonomi kawasan.

Kebijaksanaan pengembangan air minum atau memberikan pelayanan air bersih kepada penduduk kota. Sampai saat ini baru terlayani 48,2%. Menurut rencana sampai tahun 2008, penyediaan layanan air bersih ini ditargetkan dapat menjangkau 90% penduduk perkotaan. Melihat kenyataan yang ada khususnya juga berkaitan dengan keterpurukan ekonomi akibat krisis multi-dimensional yang melanda bangsa Indonesia, rasanya target tersebut sulit akan tercapai. Disamping masalah keuangan daerah sendiri, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sendiri sedang menghadapi masalah internal, berupa kewajiban-kewajiban pengembalian atas hutang yang ditanggung dalam program P3KT.

Melihat dari kebijaksanaan mengenai perencanaan kota seperti diuraikan didepan, jika dilakukan evaluasi secara kuantitatif sebagaimana proyeksi RUIRK, ternyata penyimpangannya tidak terlalu besar. Misalnya untuk proyeksi jumlah penduduk 12 desa kawasan suburbia pada tahun 2000 yang diperkirakan berjumlah 34.289 jiwa, pada

kenyataannya jumlah penduduk mencapai 32.070 jiwa atau terdapat selisih 2.219 jiwa. Selanjutnya jika dilihat dari rataan penyimpangan per desa maka selisih absolut 185 orang dengan simpangan baku 283.

BAB V PENUTUP

5.1. Temuan.

5.1.1 Morfologi Kota

- A. Total luas wilayah perkotaan Temanggung (secara administratif) adalah 2.885,02 Ha, meliputi 28,70% berada di 8 (delapan) kelurahan, yang dalam penelitian ini disebut kawasan kota utama (*core city*) dan meliputi 71,70% berada pada 12 (duabelas) desa pengembangan, yang dalam konteks penelitian ini disebut kawasan suburbia. Proporsi Tata guna lahan perkotaan yang merupakan komponen utama dari morfologi kota; untuk lahan terbangun adalah 26,90% , sawah dan tegalan/lahan kering mencapai 66% dan sisanya 7,10% berupa tanah lainnya seperti lapangan, pekuburan dan fasilitas umum lainnya.
- B. Proporsi luasan area/lahan terbangun untuk kawasan Kota utama adalah 37,26% sedangkan untuk kawasan Suburbia 22,73%. Tingkat perkembangan lahan terbangun selama 10 tahun pengamatan (periode 1990 – 2000), untuk kawasan kota utama 8,60%. Sedangkan untuk kawasan Suburbia lahan terbangunya mengalami peningkatan 37,96%, dengan prosentase pertumbuhan lahan terbangun paling tinggi adalah 163,86% yaitu desa Mungseng dan paling rendah 11,41% yaitu desa Walitelon.
- C. Dengan menggunakan *Uji Regresi*, ternyata terdapat pengaruh yang nyata antara jarak suatu kawasan dari pusat kota dengan perkembangan lahan terbangun, pada taraf kepercayaan 95%, dengan nilai $R = 0,565$ dan $F \text{ hitung} = 4,696$. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semakin jauh suatu kawasan/desa dari pusat kota akan semakin kecil/rendah perkembangan lahan terbangunya dan sebaliknya

semakin dekat kawasan dengan pusat kota akan semakin tinggi perkembangan lahan terbangunnya.

- D. Variabel pertumbuhan lahan terbangun ternyata juga berhubungan secara signifikan dengan variabel unit hunian yang dibangun oleh 'developer' pada – masing-masing desa/kawasan. Artinya semakin banyak unit hunian (kompleks perumahan) yang dibangun semakin tinggi pertumbuhan areal/lahan terbangun dan sebaliknya.
- E. Pola jaringan jalan di pusat (kota utama) Kota Temanggung sebagaimana kecenderungan kota-kota kabupaten di Jawa, cenderung bersifat Radial Konsentrik (*Radial Concentric System*) dengan pusat alun-alun dan pendopo kabupaten. Pola jaringan jalan di Temanggung kawasan suburbia cenderung 'irreguler system' sejak muncul pengkaplingan-pengkaplingan tanah yang mulai menggejala pada awal tahun 1980-an. Perkembangan jaringan jalan paling besar terjadi pada waktu Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) pada tahun 1994/1995 – 1997/1998, dengan dana konsorsium antara daerah, pusat dan ADB (Asean Development Bank).
- F. Dengan menggunakan *Uji. Chi kuadrat (X^2)* didapat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perkembangan atau penambahan jaringan jalan dan atau transportasi dengan perkembangan luas lahan terbangun, dengan nilai Asimp. Sig 0,021, lebih kecil dari nilai siginifikasi 0,05. Dengan kata lain bahwa hepotesa yang menyatakan bahwa jika pada suatu kawasan dibangun jalan baru, atau ada peningkatan kualitas/fungsi jalan maka pada kawasan tersebut

cenderung akan mempercepat laju perkembangan lahan terbangun, adalah terbukti.

- G. Dengan menggunakan Uji '*Nearest-Neighbour Analysis*' (Analisa Tetangga Terdekat), Pola sebaran kenampakan fisik kekotaan (lahan terbangun) di perkotaan Temanggung cenderung 'Random' (*menyebar dan tidak teratur*) dengan nilai hitung $T = 0,82$ (nilai 1 adalah random sempurna). Hal ini dikarenakan adanya unit-unit hunian (komplek perumahan) yang cenderung dibangun menyebar belum adanya peraturan 'zoning' bagi pembangunan fisik di wilayah perkotaan Temanggung.

5.1.2 Demografi dan Sosial Ekonomi

- A. Jumlah penduduk perkotaan Temanggung pada tahun 2000 adalah 64.587 jiwa yang meliputi 50,35% menghuni 8 kelurahan di kawasan kota utama dan 49,65% berada di kawasan suburbia (12 desa pengembangan). Selama periode tahun pengamatan (1990 - 1995 - 2000) rata-rata perkembangan penduduk perkotaan Temanggung 1,36% ; untuk kawasan kota utama 0,21% dan untuk kawasan suburbia 2,57%. Berdasarkan pengamatan pada desa sampel, pertumbuhan penduduk pada kawasan Suburbia pada tahun 2000, paling banyak adalah jumlah kelahiran (60,53%) , dan penduduk pendatang (35,59%).
- B. Pertumbuhan penduduk pendatang di kawasan suburbia (khususnya) yang bertempat tinggal di unit-unit hunian baru (komplek perumahan ataupun perkawlingan) sebagian besar (67%) berasal dari penduduk dalam kota Temanggung yang ingin mencari tempat tinggal/hunian yang segal dan alami, disamping faktor

lingkungan sosial yang dinilai cocok serta faktor kemudahan transportasi. Selanjutnya untuk penduduk penghuni perumahan juga menganggap adanya Kredit Pemilikan Rumah (KPR/BTN) sebagai alasan utama yang lain kepindahan mereka dari tempat tinggal semula di kampung/kelurahan dalam kawasan core city yang kebanyakan juga masih kontrak (sewa).

- C. Untuk mengetahui lebih dalam apakah jumlah pertumbuhan penduduk pada suatu kawasan/desa dipengaruhi oleh adanya penyediaan unit-unit hunian oleh 'developer' dilakukan dengan Uji Regresi dengan perolehan nilai R hitung = 0,323 dan nilai F (signifikansi) = 0,104. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara pertumbuhan penduduk dengan penyediaan unit-unit hunian yang dibangun developer, meskipun berhubungan secara positif tetapi hubungannya tidak signifikan. Disamping faktor terbesarnya adalah jumlah kelahiran anak, dalam uji Regresi tersebut, untuk variabel peubahnya (unit hunian) menggunakan satuan unit rumah yang dibangun developer pada masing-masing kompleks, sedangkan untuk unit-unit hunian yang dibangun perseorangan (jumlahnya mungkin lebih banyak dan lebih merata) tidak ikut dihitung dengan alasan data sulit diperoleh.
- D. Tingkat kepadatan bruto penduduk perkotaan Temanggung tahun 2000 adalah 22 orang/Ha atau 2.200/Km², terdiri dari 3.900 orang/km² pada kawasan kota utama dan 1.600 jiwa/km² pada kawasan Suburbia.
- E. Dengan menggunakan *Uji-Compare mean*, ternyata kondisi tingkat pendidikan masyarakat pada kawasan kota utama dengan masyarakat pada kawasan suburbia, terdapat perbedaan secara signifikan, dengan nilai $t = 3,964$ dan $asimp.sig = 0,005$. Selanjutnya untuk mengetahui apakah tinggi rendah tingkat pendidikan

mempengaruhi pemilihan jenis rumah yang ditempati, maka berdasarkan hasil analisa Crosstab diperoleh nilai χ^2 hitung = 13,037 dan Asimp.sig. 0,111 yang berarti H_0 ditolak. Dengan kata lain tidak ada perbedaan signifikan antara penghuni rumah kecil (T-21, T-27) dengan rumah menengah (T-36 & T-54) dengan penghuni rumah besar (Tipe diatas 54). Faktor yang cukup mempengaruhi kepemilikan/pemilihan jenis Tipe rumah pada suatu kompleks hunian (perumahan) lebih disebabkan karena keterbatasan pilihan, dimana pada awalnya pengembang tidak menyediakan rumah tipe besar/menengah, sehingga bagi keluarga dengan pendidikan tinggi tidak dapat memilih tipe besar/menengah.

- F. Rumah tangga non pertanian pada kawasan kota utama meliputi 69,52% dari jumlah rumah tangga yang ada. Sedangkan untuk kawasan suburbia Rumah Tangga non pertaniannya hanya 35,60%. Selanjutnya antara jenis mata pencaharian dan tingkat pendidikan, yang selanjutnya disebut '*Rank Sosial*' dengan '*struktur keruangan*' kota yang diekspresikan oleh ratio lahan terbangun terhadap luas wilayah, ternyata tidak berhubungan secara nyata, dengan nilai Asimp.Sig.= 0,271 (lebih besar dari 0,05). Artinya untuk kota-kota kecil seperti Temanggung, belum atau tidak membentuk struktur keruangan berdasarkan spesialisasinya, sebagaimana menggejala di kota-kota besar.

5.1.3 Sarana dan Prasarana Pelayanan Kota

- A. Hasil kajian terhadap kapasitas kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kota masing-masing desa pengembangan diukur melalui 23 jenis indikator, Desa

Sidorejo menunjukkan desa paling urban, dengan total skore 35, disusul kemudian Desa Madureso (skore 31) dan desa Kebonsari dan Manding (skore 26).

- B. Untuk sarana pendidikan, khususnya sekolah TK, SD dan SLTP persebarannya sudah merata antar desa/kawasan dan berhubungan secara signifikan dengan jumlah penduduk. Artinya letak dan jumlah sekolah ketiga tingkatan tersebut sudah memperhatikan jumlah penduduk yang dilayani, TK koefisien korelasi-nya/ R hitung = 0,619, SD R hitung = 0,613 dan SLTP R hitung = 0,463 (R tabel pada $df.4 = 0,339$). Sedangkan untuk SLTA R hitung-nya = 0,281 (dibawah R tabel) yang berarti letak dan jumlah SLTA tidak berhubungan dengan jumlah penduduk di perkotaan Temanggung. Hal ini disebabkan karena pada awalnya sekolah SLTA yang dibangun terkonsentrasi pada satu lokasi/kawasan tertentu, adalah untuk melayani seluruh penduduk kabupaten. Selanjutnya berdasarkan aspirasi masyarakat, hanya 23,3% dari jumlah responden yang menghendaki sekolah SLTA ditambah.
- C. Untuk sarana kesehatan, sebagian besar masyarakat menyatakan 'sudah memadai' . Dari 30 responden hanya 20% yang menghendaki Rumah Sakit ditambah, sedang untuk Puskesmas dan lain-lain menyatakan sudah cukup. Hal ini disebabkan karena akses untuk mencapai sarana kesehatan dianggap mudah, meskipun kebanyakan untuk dokter praktek misalnya banyak terkonsentrasi di kawasan kota utama.
- D. Terdapat 4 desa di kawasan suburbia yang prasarana jalannya sudah beraspal 100% sedang 8 desa lainnya beraspal antara 80% sampai 90% dari seluruh panjang ruas jalan yang ada di desa yang bersangkutan. Aspirasi masyarakat

untuk prasarana jalan menyatakan perlu ditambah, berupa peningkatan kualitas jalan atau pelebaran jalan antar dusun. Sedangkan untuk angkutan umum (angkutan kota) menyatakan sudah memadai.

- E. Pelayanan pada sarana permukiman, untuk air bersih (PDAM) penduduk terlayani baru mencakup 42,85%. Selanjutnya *Uji Regresi* menunjukkan bahwa jumlah pelanggan PDAM pada suatu kawasan/desa berhubungan secara signifikan dengan besaran jumlah penduduk (R hitung = 0,478 nilai F sig. = 0,033). Artinya pelayanan yang diberikan oleh PDAM kepada masyarakat baik yang ada di kawasan kota utama maupun yang berada di kawasan Suburbia dapat dikatakan relatif merata.
- F. Untuk pelayanan persampahan dan kecukupan jaringan pembuangan (penatusan) sebagian besar desa kawasan suburbia belum terlayani dengan memadai. Hal ini disebabkan karena jumlah fasilitas persampahan yang dimiliki oleh SubDinas Tata Kota belum dapat menjangkau seluruh kawasan. Demikian pula untuk jaringan/saluran pembuangan, kesulitan dalam men-design bagi permukiman-permukiman eksisting (desa asli), karena kurang teraturnya struktur ruang dan kondisi geografis, disamping masalah keterbatasan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten.

5.1.4 Kelembagaan, Keuangan dan Perencanaan Kota.

- A. Dari aspek Kelembagaan dan Aparatur, manajemen pembangunan Kota di perkotaan Temanggung, ditangani oleh Sub Dinas Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum, dengan eselon pimpinan III/a. Hirarkhi pelaksanaan tugas-tugas perkotaan

secara berjenjang dilaksanakan oleh Camat Kota Temanggung, Kepala Kelurahan (kawasan core city) dan Kepala Desa (kawasan Suburbia).

- B. Berdasarkan aspirasi para Perangkat Desa (para Kepala Desa) di kawasan Suburbia dengan didasari bahwa kondisi masyarakat yang sudah cenderung urban, padat pelayanan serta untuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para perangkat desa, maka seluruh responden (100%) menyatakan setuju jika desanya, dirubah status-nya (ditingkatkan) menjadi kelurahan.
- C. Besaran alokasi anggaran sektor perkotaan Temanggung selama periode pengamatan (1992/1993 – 2001), berkisar antara 3-5% dari total anggaran pembangunan. Alokasi anggaran mengalami kenaikan tajam sampai lebih dari 12%, ketika dilaksanakan Program P3KT di tahun 1995/1996 – 1998/1999. Berdasarkan *Uji-Regresi* menunjukkan bahwa anggaran sektor perkotaan berbanding positif dengan jumlah belanja pembangunan dalam APBD. (nilai R hitung = 0,938 dan F sig. = 0,000). Dengan kata lain besar kecilnya anggaran perkotaan sangat dipengaruhi oleh besaran anggaran belanja pembangunan setiap tahun.
- D. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Temanggung sampai saat ini belum berbentuk Peraturan Daerah (Perda), sehingga beberapa ketentuan ‘zoning’ belum dapat diberlakukan secara efektif. Rencana untuk menjadikan Temanggung sebagai kota perdagangan dan jasa, juga cenderung lamban, karena minimnya investasi. Salah satu faktor sosio-kultural masyarakat Temanggung yang lebih suka dan lebih bergengsi jika ‘berbelanja’ diluar kota (Magelang-Yogyakarta).

5.2. Kesimpulan

Dengan memperhatikan beberapa analisa dan temuan hasil kajian pada kawasan suburbia perkotaan Temanggung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- A. Tingkat urbanisasi (proses pengkotaan) yang terjadi pada kawasan Suburbia kota Temanggung, lebih dominan dilihat dari aspek morfologi atau kenampakan fisik kota-nya (3,79% per tahun) daripada pertumbuhan penduduknya (1,36% per tahun). Peruntukkan terbesar lahan terbangun adalah untuk perumahan/permukiman (57%), pergudangan/perindustrian (23%), fasilitas umum/sosial (20%).
- B. Kenampakan fisik kekotaan (morfologi) kawasan suburbia tumbuh menyebar, tidak teratur dan mendekati random sempurna (nilai kontinum $T = 0,81$). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan '*urban sprawl*' di kawasan suburbia belum terkendali. Pada kasus yang demikian, konversi lahan pertanian ke non pertanian yang terjadi sepenuhnya berdasarkan '*demand dan suplay*' masyarakat, dimana pada satu sisi ada seseorang yang ingin membeli tanah untuk dibangun, disatu sisi ada seseorang yang ingin menjual tanahnya.
- C. Perkembangan morfologi kota (lahan terbangun) dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan unit hunian/perumahan dan perkembangan jaringan jalan/transpotasi dan jarak kawasan dari pusat kota. Kesimpulan ini didukung adanya fakta bahwa penduduk kawasan suburbia, yaitu yang bertempat tinggal di perumahan/unit hunian baru, seluruhnya (100%) merupakan penduduk pindahan dari luar desa di kawasan suburbia, antara lain 67% dari kampung/permukiman dalam kota (core city) dan 27% dari kota luar wilayah kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukkan dengan sangat jelas adanya '*push and pull factor*' bagi mobilitas penduduk dari

pusat kota menuju kawasan pinggiran yang secara spesifik (merupakan temuan penelitian ini) merupakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak-anak (generasi) penerus, disamping dianggap sebagai tempat hunian yang segar, alami.

- D. Jumlah penduduk kawasan suburbia kota Temanggung lebih sedikit dibanding jumlah penduduk pada kota utama, namun mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih besar. Bahkan terdapat dua kelurahan (di kota utama) yang mengalami pertumbuhan minus. Dengan fakta ini, sebetulnya orientasi manajemen pembangunan kota sudah harus diarahkan pada pertumbuhan kawasan suburbia.
- E. Pertumbuhan penduduk di kawasan Suburbia ternyata disebabkan karena faktor kelahiran 54% dan 46% penduduk pendatang yang sebagian besar adalah para pemukim unit-unit permukiman/perumahan baru. Jika 46% penduduk pendatang tersebut memilih tempat tinggal di unit-unit perumahan yang disediakan oleh pengembang, maka sebenarnya manajemen pembangunan kota dapat diarahkan bagi terbukanya peluang untuk investasi dibidang perumahan. Disamping itu dilihat dari cakupan layanan penyediaan perumahan baru mencapai 60,63%, maka sebenarnya investasi ini masih cukup prospektif.
- F. Tingkat persebaran dan pemerataan sarana/prasarana perkotaan yang meliputi pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi dan air bersih sudah merata dan telah memenuhi standart daya dukung penduduk. Sedangkan untuk jalan, jaringan penatusan dan persampahan beberapa desa/lingkungan permukiman masih perlu di tingkatkan. Berdasarkan agregat nilai kelengkapan/kecukupan fasilitas pelayanan kota ini, diketahui bahwa terdapat 4 desa kondisi sudah paling

urban dibanding 9 desa lainnya, 5 desa cukup urban dan 3 desa yang lain kondisi urbannya paling kurang.

- G. Manajemen pembangunan kota di Temanggung belum didukung adanya sistem kelembagaan yang efektif, meskipun pada kenyataannya seluruh sistem organisasi/kelembagaan yang ada merupakan termasuk dalam satu sistem organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten. Peningkatan Sub Dinas Tata Kota menjadi instansi mandiri (sehingga dapat berfungsi sebagai '*urban manager*') dan peningkatan status Desa menjadi Kelurahan adalah satu solusi awal memperbaiki kinerja manajemen perkotaan, menuju pelayanan terbaik kepada masyarakat.

5.3. Rekomendasi

Dari hasil analisa dan kesimpulan sebagaimana diuraikan pada bab di muka, maka penelitian ini menghasilkan beberapa rumusan rekomendasi sebagai berikut :

5.3.1 Ditujukan kepada dunia Ilmu Perkotaan/Pengembangan Wilayah;

Sebagai sebuah studi awal yang mencoba melihat sebagian besar (untuk tidak menyebut keseluruhan) gambaran tentang bagaimana kasus perkembangan Kota Temanggung, yang mungkin mewakili satu prototipe kota-kota kedua (Secondary City) di Indonesia, khususnya Ibukota Kabupaten pedalaman , maka kajian dasar ini memerlukan penelitian-penelitian/kajian lebih lanjut, antara lain :

- Kajian tentang dampak dari perkembangan morfologi (area terbangun) terhadap produksi pertanian/ketersedian pangan di daerah;
- Studi pengaturan tata ruang (zoning).

5.3.2 Kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- A. Dengan melihat bahwa pola sebaran kenampakan fisik kekotaan yang cenderung bersifat 'Random' (acak dan sporadis), maka seyogjanya Pemerintah Kabupaten Temanggung, mulai lebih bersifat selektif dalam pemberian ijin-ijin membangun (mekipun tidak harus membatasi), khususnya yang berskala besar yang pada akhirnya dapat mengganggu sistem pertanian dan beberapa spekulasi harga tanah;
- B. Perlu diadakan Studi tentang Pengaturan Tata Ruang Kota (RUTRK) yang ditindak lanjuti dengan pengesahannya menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat. Kajian RUTRK dalam jangka panjang harus dapat mengarah pada pembangunan terpola, yang pada akhirnya mampu menjadi sebagai *Bufferzone ekologis* antara rural dan urban (rurban).
- C. Perlunya pembenahan di bidang kelembagaan yang terkait dengan tugas pemerintahan dan manajemen pembangunan perkotaan, mulai dari peningkatan status SubDinas Tata kota menjadi Badan Pengelola Perkotaan, sehingga mampu berperan sebagai 'urban manajer' yang merupakan jabatan terpisah dari Bupati selaku pemangku jabatan politis. Disamping itu pembentukan kelurahan-kelurahan pada desa-desa pengembangan yang sudah dikategorikan 'urban' sudah harus menjadi prioritas dalam rangka menyempurnakan sistem organisasi Pemerintah Kabupaten secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 1999.

5.3.3 Kepada dunia usaha/investor/pengembang.

Cakupan layanan di bidang properti (penyediaan perumahan) yang baru mencapai 60%, pertumbuhan penduduk sekitar 1,36% per tahun serta daya dorong/daya tarik (push dan pull forces), terhadap keberadaan hunian yang lebih segar di luar kota (core city), merupakan peluang investasi yang menjanjikan, dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Branch C. Malville, 1996, *Perencanaan kota komprehensif : Pengantar dan Penjelasan*, Gadjah Mada University Yogyakarta.

Chema, GS, 1993, *Urban Mangement: Policies and Innovations ini Developing Countries*, Ricardson HW.

Daldjoeni, N, 1997, *Geografi Baru, Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek*, Alumni bandung..

Daldjoeni, N, 1997, *Geografi Kota dan Desa*, Alumni Bandung.

Daldjoeni, N, 1997, *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Alumni bandung.

Djayadinata T Johara, 1999, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, ITB Bandung.

Ever, Hans-Dieter, 1982, *Sosiologi Perkotaaan*, LP3ES Jakarta ..

Freeman, TW, 1968, *Geography and Planning*, Hutcinson University Library, London..

Moh. Amaludin, 1987, *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial*, Seri Thesis UI Press Jakarta.

Rondenelly, Dennis A, 1983, *Secondary Cities in Developing Countries; Policies For Diffusing Urbanization*, Beverly Hill, Sage Publication, Inc.

R. Bintarto, 1979, *Metode Analisa Geografi*, LP3ES Jakarta.

Shevky , E and Bell, W, 1965, *Social Area Analysis*, Stanford University Press .

Sidney Siegel, 1990, *Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial*, PT. Gramedia Jakarta .

Singarimbun Masri dan Sofyan Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3S Jakarta.

Soesila L. Nining, 2000, *Ekonomi Perencanaan Manajemen Kota*, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia Jakarta.

Soesilo L. Nining, 2000, *Reformasi Pembangunan dengan Langkah Manajemen Strategik*, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Univ. Indonesia, Jakarta.

Sugiyono, 1999, *Statistika Untuk Peneliti*, CV Alfabeta Bandung.

Sugiyono, 2001, *Statistika Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS 10.0 For Windows*, Pen. Alfabeta, Bandung.

Surachmad W, 1970, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, CV. Transito Bandung.

Warpani Suwardjoko, 1984, *Analisis Kota dan Daerah*, Pen. ITB Bandung.

Yunus Sabari H, 2000, *Struktur Tata Ruang Kota*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

ARTIKEL/TERBITAN TERBATAS

Soegiono Soetomo, 2002, *Strategi Design Ruang Sub-urban dalam Menopang Pembangunan yang berkelanjutan; merajut ruang yang beragam dari pedesaan ke perkotaan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Teknik UNDIP, Semarang.

Yunus Sabari, H, 1987, *Beberapa Determinan Perkembangan Permukiman Kota; Dampak dan Pengelolaannya*; Kumpulan Kuliah, Fak. Geografi UGM Yogyakarta ;

Dirjen CIPTA KARYA dan IAP, 1997, *Kamus Tata Ruang*, Jakarta;

UNS, Jounal Geografi, No. 27/XIV/Des/2000 ISSN 0852-2682.

TESIS

Nugroho, Prihadi, 1997, *Karakteristik Kota-kota Kedua di Propinsi Jawa Tengah*, Tugas Akhir tidak diterbitkan, MPWK, FT UNDIP Semarang

DOKUMEN/LAPORAN/PERATURAN

UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

PUSLITBANGKIM, *Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman*, departemen Pekerjaan Umum, Bandung 1988.

Buletin Tata Ruang, BKTRN Jakarta ed. kelima Tahun . 2000

Pemerintah Kabupaten Temanggung, *Final Report RPJM-PPWT, 1999/2000*

BPS Kabupaten Temanggung, *Hasil Sensus Penduduk Tahun 1980*

BPS Kabupaten Temanggung, *Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*

Pemerintah Kabupaten Temanggung, *Temanggung Dalam Angka Tahun 2000*

Bappeda Kabupaten Temanggung, *Profil Kecamatan Tahun 2000*